LAPORAN KINERJA

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2024

@bp2sdmlhk Bp2sdm_lhk BP2SDM LHK

LAPORAN KINERJA 2024

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Disusun dan diterbitkan oleh Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Naskah dan tata letak disiapkan oleh Dwi Arianto, Hasto Nugroho, Sofian Hadi Prasetyo, Nindia Bella Ardianti. Editor Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, mengucapkan terimakasih kepada Pusat Penyuluhan, Pusat Perencanaan Pengembangan SDM, Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK, Pusat Pengembangan Generasi LHK, 7 Balai Pelatihan LHK dan 5 SMKKN yang telah berkontribusi menyumbangkan data, gagasan, ide, serta dokumentasi sehingga Laporan Kinerja Badan P2SDM Tahun 2024 ini dapat tersusun.

Dokumen dapat diunduh melalui tautan:

Kaleidoskop BP2SDM Th. 2024

Januari

- Dialog Menteri LHK dengan Para Penyuluh Kehutanan lingkup UPT KLHK di Surabaya, Jawa Timur
- Penguatan Profil Pelajar Pancasila di KHDTK Tabo - Tabo, Makassar
- Pembinaan Karakter dan Kewiraan Siswa SMKKN Manokwari Bersama FASHARKAN TNI AL di Manokwari

Februari

- Uji Kompetensi Keahlian siswa - siswi SMK Kehutanan Negeri Makassar di KHDTK Tabo - Tabo
- Patroli Gabungan BPLHK Kadipaten dengan anggota Koramil Kadipaten Majalengka di KHTDK Sawala Mandapa
- Kunjungan Dinas LH Tangerang ke Bank Sampah Gemilang di Pusat PGL LHK

Maret

- Penanaman Serentak Kepala BP2SDM dalam memperingati Hari Bakti Rimbawan di Kalimantan Barat
- Aksi Bersih Negeri Seluruh Indonesia dalam rangka Memperingati HPSN di Riau
- Bazzar Ramadhan BPLHK Bogor untuk memperkenalkan produk - produk KTH Binaan

Juli

- BP2SDM Mengikuti kegiatan Talkshow dalam rangka World Water Forum di Nusa Dua, Bali
- Verifikasi Lapangan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, di Wisata Hutan Pinus Loji Blitar
- Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat di Jawa Timur

Agustus

- Pemberian Penghargaan Teladan Wana Lestari tingkat Nasional Th. 2024 di Jakarta
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Angkatan XVII SMKKN Manokwari
- Pelatihan Pembuatan Pupuk Bokashi Angkatan VI Metode Blended Learning Th. 2024 di KTH binaan BPLHK Pekanbaru

September

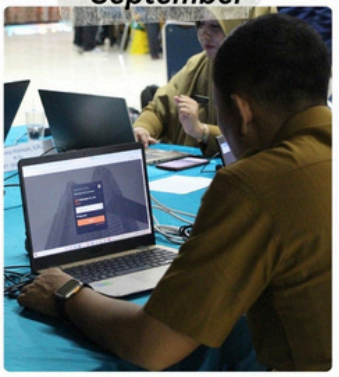

- Uji Kompetensi Keahlian terhadap Fungsional Binaan Kementerian LHK di Jakarta
- Siswa SMKKN mempelajari Alat Theolodite untuk Pemetaan
- Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni 1 yang dilaksanakan oleh BPLHK Pematang Siantar

SCAN ME!

April

- Penutupan Diklat Pembentukan Polhut 2024 yang dilaksanakan di Setukpa Lemdiklat Polri, Sukabumi
- Kunjungan Wamen LHK ke SMKKN Samarinda
- Patroli Gabungan BPLHK Bogor dengan Muspika Rumpin dalam Pengamanan KHDTK HD Rumpin

Mei

- Wisuda Serentak siswa - siswi kelas XII SMKKN secara serentak oleh Menteri LHK di Jakarta
- Rakor Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Diklat Kehutanan di Majalengka
- BPLHK Pekanbaru dan P3E Sumatera kolaborasi untuk mengelola Bank Sampah Wana Asri

Juni

- Pelatihan Jasa Lingkungan Wisata Alam Tahap II di KHDTK Pondok Buluh yang dilaksanakan oleh BPLHK Pematang Siantar
- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kelas X yang dilaksanakan di Seluruh SMK Kehutanan Negeri di Indonesia
- Pengambilan Data Karbon di Plot KHDTK Sawala Mandapa

Oktober

- Penyerahan dan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional Th. 2024 oleh Wakil Menteri LHK di Jakarta
- Pengukuhan Angkatan XVII siswa/i baru SMKKN Makassar oleh Sekretaris BP2SDM
- Marhing Band SMKKN Kadipaten dalam Pengukuhan Siswa

November

- Benchmarking Kinerja BP2SDM Kementerian LHK dengan BPPSDMKP Kementerian KKP di Jakarta
- Praktik Kerja Lapang siswa - siswi SMK Kehutanan Negeri
- BP2SDM ikut memeriahkan "Langkah Membumi Festival" yang diselenggarakan di Senayan, Jakarta

Desember

- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan Apresiasi kepada KTH terbaik dengan NTE pada Rakor Penyuluh Kehutanan di Jakarta
- Penyerahan Piagam Perpanjangan Sekolah Adiwiyata Mandiri (SAM) dan Adiwiyata Nasional (SAN) yang dilaksanakan secara daring

PENGANTAR

Kepala Badan

Penyuluhan dan Pengembangan SDM

drh. Indra Exploitasia Semiawan, M.Si

Kepala Badan P2SDM
drh. Indra Exploitasia Semiawan, M.Si

Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (P2SDM) Tahun 2024 dapat disusun dengan baik dan lancar. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat uraian mengenai target kinerja yang telah diperjanjikan, capaian yang diraih sepanjang tahun 2024, kendala serta tantangan yang dihadapi, dan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Melalui upaya tersebut, diharapkan terwujud efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara optimal. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja, guna memperkuat prinsip *good governance* dan *clean government* pada seluruh unit kerja di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, kami ucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan, serta kepada seluruh pegawai dan mitra kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atas dedikasi dan kerja samanya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di tahun 2024. Semoga sinergi dan kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan, seiring dengan upaya kami dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang unggul, profesional, dan berdaya saing.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak sebagai bahan evaluasi, acuan perbaikan, dan motivasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2025
Kepala Badan,

drh. Indra Exploitasia Semiawan, M.Si
NIP. 19660618 199203 2 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Setiap tahunnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senantiasa berusaha menjaga kinerja dalam upaya mendukung penguatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kinerja yang baik ditunjukan dari rata-rata capaian kinerja tahun 2024 sebesar 112,48%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian kinerja meningkat sebesar 2,87% (YoY). Peningkatan ini menunjukan bahwa Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat berkinerja lebih efektif dengan nilai efektivitas sebesar 1,03. Penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja pada Tahun 2024 sebesar Rp354.857.226.302,00 (93,32%) dari pagu anggaran sebesar Rp380.261.239.000,00, dengan demikian, nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar 0,83.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Eselon I pendukung di Kementerian LHK yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan. Dukungan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 6 Indikator Kinerja Program yang ada di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- IKP 1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan mencapai kinerja sebesar 1,433 Triliun atau mencapai presentase maksimal 150% dari target kinerja Rp0,5 T. Menunjukan bahwa aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh KTH yang dibina sudah sesuai dengan target.
- IKP 2 Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya mencapai kinerja sebanyak 15.738 orang (101,30% dari target) mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari realisasi tahun sebelumnya sebanyak 15.536 orang. Hal ini disebabkan adanya intervensi anggaran untuk pelaksanaan pelatihan dengan mekanisme kerjasama sehingga dapat diperhitungkan sebagai capaian kinerja pada perjanjian kinerja.
- IKP 3 Jumlah Lulusan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat mencapai kinerja sebanyak 487 orang (99,19% dari target 491 Orang).
- IKP 4 Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan mencapai kinerja sebesar 75,26 Poin dari target 70 Poin (107,51%). Nilai ini menunjukan bahwa pengelolaan KHDTK sudahsesuai efektif dalam memfasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi.
- IKP 5 Jumlah Lembaga/Komunitas serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup mencapai kinerja 3.368 Lembaga dari target 3.368 Lembaga (100,00%). Capaian ini mengindikasikan semakin banyaknya komunitas yang peduli dan menerapkan upaya perlindungan lingkungan hidup.
- IKP 6 Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM mencapai kinerja sebesar 87,77 Poin dari target 80 Poin (109,71%).

Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 tidak terlepas dari kendala terutama adanya beberapa kegiatan yang terkena blokir anggaran *automatic adjustment* maupun pencapaian Renstra Tahun 2020-2024 yang belum optimal. Menindaklanjuti hal tersebut, tahun 2024 merupakan momentum Badan P2SDM untuk menyusun perencanaan kinerja jangka menengah yang lebih matang dengan target kinerja yang lebih rasional.

Tahun 2024 merupakan masa transisi pemisahan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Sebagai bagian dari Kementerian Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kedepan akan memfokuskan perannya untuk mendukung pembangunan kehutanan secara berkelanjutan melalui pengembangan kompetensi sumber daya manusia, baik aparatur maupun non-aparatur, yang terlibat dalam pengelolaan kehutanan, serta pelaksanaan program penyuluhan berbasis masyarakat guna mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya hutan. Dengan berbagai kegiatan yang akan dilakukan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkomitmen menjadi motor penggerak pembangunan kehutanan dengan menyediakan SDM yang adaptif terhadap tantangan global, sekaligus berkontribusi pada pencapaian target pengelolaan hutan yang lestari.

POTRET KINERJA BP2SDM TAHUN 2024

1. Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan
   Target : 0,5 T
   Realisasi : 1,433 T
   150 %

2. Jumlah SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya
   Target : 15.536 orang
   Realisasi : 15.738 orang
   101,30 %

3. Jumlah Lulusan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat
   Target : 491 Orang
   Realisasi : 487 orang
   99,18 %

4. Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan
   Target : 70 Poin
   Realisasi : 75,26 Poin
   107,51 %

5. Jumlah Lembaga/Komunitas Serta Generasi Peduli dan /atau berbudaya Lingkungan Hidup
   Target : 3.368 Lembaga
   Realisasi : 3.368 Lembaga
   100,00 %

6. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Badan P2SDM
   Target : 80 Poin
   Realisasi : 87,77 Poin
   109,71 %

7. Nilai Kinerja Anggaran Badan P2SDM
   Target : 82,5 Poin
   Realisasi : 98,72 Poin
   119,66 %

112,48 %

Rata-rata Pencapaian Kinerja Tahun 2024

93,32 %

Presentase serapan anggaran tahun 2024

Pagu : Rp380.261.239.000

Realisasi : Rp354.857.226.302

DAFTAR ISI

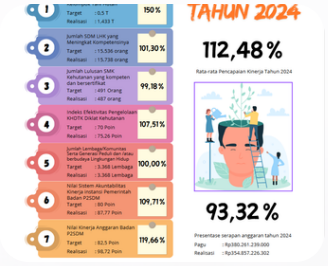

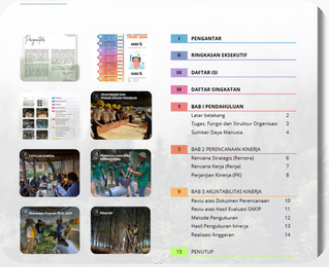

v **PENGANTAR**

vi **RINGKASAN EKSEKUTIF**

viii **DAFTAR ISI**

ix **DAFTAR SINGKATAN**

1 **BAB I PENDAHULUAN**

Latar belakang 2
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 3
Sumber Daya Manusia 5

6 BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) 7
Rencana Kerja (Renja) 11
Perjanjian Kinerja (PK) 17

18 BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Reviu atas Dokumen Perencanaan 19
Reviu atas Hasil Evaluasi SAKIP 22
Metode Pengukuran 24
Hasil Pengukuran kinerja 25
Realisasi Anggaran 86

89 PENUTUP

DAFTAR SINGKATAN

Badan P2SDM	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BPLHK	Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
GEMILANG	Gerakan Masyarakat Bela Lingkungan
IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
IKP	Indikator Kinerja Program
KHDTK	Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
KSDAE	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
KTH	Kelompok Tani Hutan
LHK	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LKj	Laporan Kinerja
LMS	Learning Management System
LP2UKS	Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya
LSP	Lembaga Sertifikasi Profesi
PBLHS	Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah
PDASRH	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
PGL	Pengembangan Generasi Lingkungan
PHLHK	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PHL	Pengelolaan Hutan Lestari
PJJ	Pembelajaran Jarak Jauh
PK	Perjanjian Kinerja
PKTL	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
PPI	Pengendalian Perubahan Iklim
PPKL	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
PPKM	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PSKL	Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
PSLB3	Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun
PTM	Pembelajaran Tatap Muka
Renja	Rencana Kerja
Renstra	Rencana Strategis
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SDM	Sumber Daya Manusia
SMKK	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan
TIPH	Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan
TKSH	Teknik Konservasi Sumber Daya Hutan
TPHH	Teknik Produksi Hasil Hutan
TRRH	Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
TUK	Tempat Uji Kompetensi
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
YoY	Year over Year

1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan memegang peranan sentral dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan melestarikan keanekaragaman hayati. SDM yang kompeten dan memiliki pengetahuan luas berperan sebagai agen perubahan yang efektif, baik dalam menerapkan praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan maupun dalam mengembangkan solusi inovatif untuk menjawab tantangan, seperti deforestasi, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan yang ramah lingkungan, sekaligus menjamin kelestarian ekosistem bagi generasi mendatang. Beberapa isu permasalahan/tantangan dalam pengembangan SDM diantaranya:

- Adanya kebutuhan pengembangan kompetensi ASN secara terus menerus sesuai peraturan.
- masih diperlukannya penyiapan SDM baik kualitas dan kuanitas sebagai implementasi dari UUCK.
- pemanfaatan manajemen talenta di lingkungan Kementerian LHK masih terbatas.
- Terdapat sekitar 26 ribu KTH di seluruh indonesia yang sebagian besar masih dalam kategori pemula dengan NTE yang rendah.
- penguatan portofolio lulusan SMK Kehutanan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri sektor LHK

Penting untuk dicatat bahwa penyusunan laporan kinerja ini masih berdasarkan perencanaan kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengingat penetapan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai bagian dari Kementerian Kehutanan baru akan berlaku efektif pada akhir Desember 2024. Oleh karena itu, laporan ini sesungguhnya mencerminkan kinerja yang telah dicapai dalam konteks kebijakan dan peraturan yang berlaku sebelum pemisahan kementerian.

"Kesuksesan hari ini adalah hasil kerja keras kemarin; perbaikan hari ini adalah fondasi untuk keberhasilan esok"

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senantiasa berkomitmen untuk mendukung tersedianya SDM LHK yang unggul dan berkualitas melalui berbagai upaya pengembangan kompetensi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menetapkan bahwa Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bertanggung jawab dalam memastikan ketersediaan SDM LHK yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sesuai dengan dinamika dan tantangan terkini dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam menjalankan tugasnya selama tahun 2024, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan tugas dengan enam Indikator Kinerja Program yang menjadi tanggung jawab Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu:
(1) Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (triliun);
(2) Jumlah SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya;
(3) Jumlah Lulusan SMK Kehutanan yang Kompeten dan bersertifikat;
(4) Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan;
(5) Jumlah Lembaga/Komunitas Serta Generasi Peduli dan /atau berbudaya Lingkungan Hidup (Lembaga);
(6) Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM;
(7) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Menteri atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024. Laporan ini diharapkan dapat menjadi refleksi dari pencapaian kinerja selama tahun 2024 serta menjadi umpan balik bagi pengambil keputusan dalam memperkuat perencanaan kinerja dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di masa mendatang.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Selama periode Januari hingga Oktober 2024, Badan P2SDM melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam masa ini, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berperan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan dan melaksanakan fungsi sebagaimana berikut:

Tugas

Menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan

Fungsi

1. Penyusunan kebijakan teknis penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan lingkungan hidup ;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan lingkungan hidup;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Pelaksanan tugas administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sejalan dengan kebijakan pemerintahan baru, pada Oktober 2024 terjadi perubahan struktur Kementerian dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Peraturan tersebut menetapkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan resmi dipisahkan menjadi dua entitas terpisah yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Perubahan ini bertujuan meningkatkan fokus dan efektivitas masing-masing kementerian dalam menangani isu lingkungan hidup dan pengelolaan kehutanan.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2024, Badan P2SDM ditetapkan sebagai salah satu unit eselon I di lingkup Kementerian Kehutanan. Penetapan ini memberikan landasan bagi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk lebih fokus dalam mendukung pembangunan kehutanan melalui pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pelaksanaan penyuluhan berbasis masyarakat guna mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024, Badan P2SDM didukung oleh Sekretariat Badan, 4 Pusat serta 12 Unit Pelayanan Teknis yang tersebar di seluruh Indonesia. Struktur Organisasi pada Badan P2SDM sebagaimana bagan berikut:

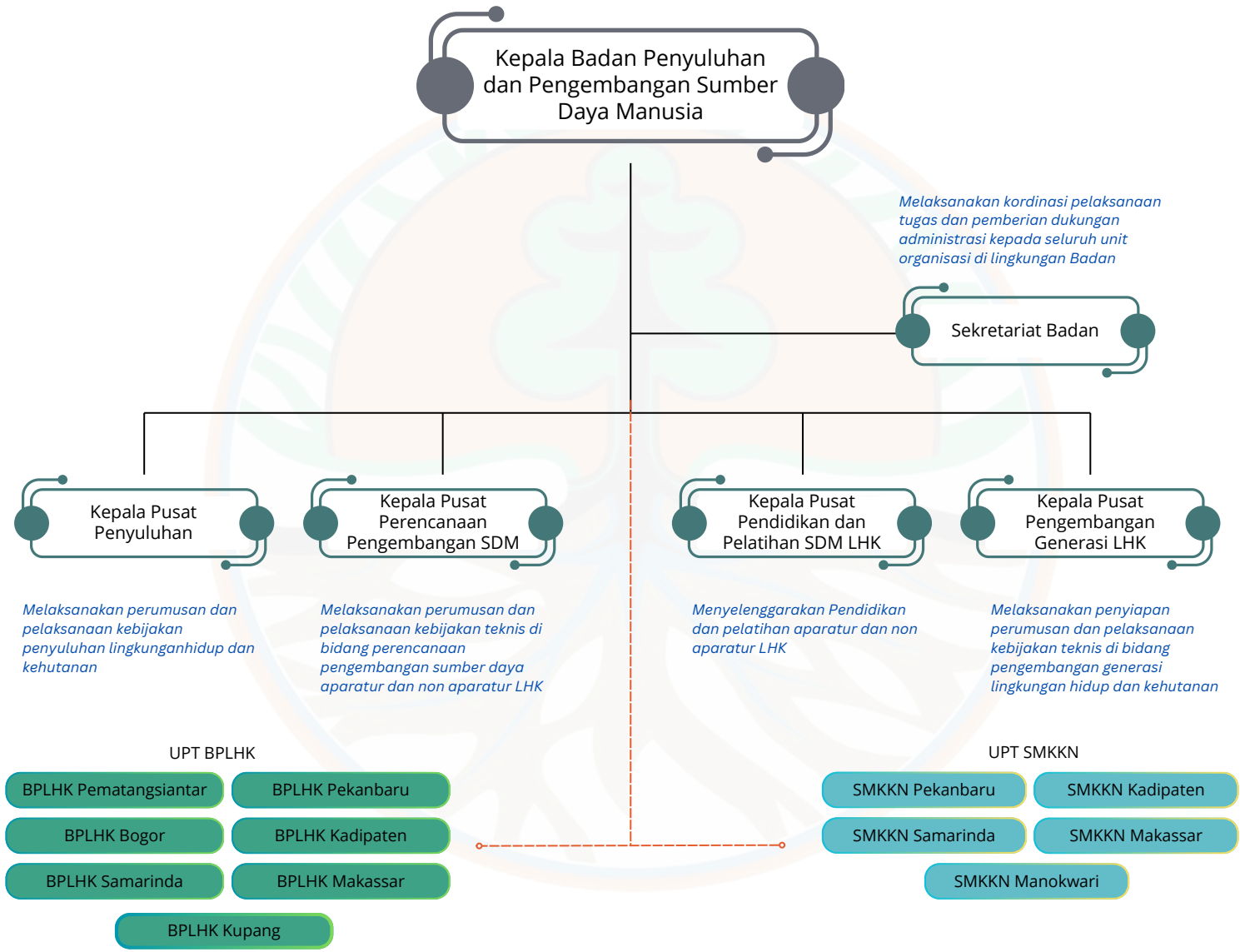

C. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data dari Sistem Kepegawaian Kementerian LHK, Badan P2SDM didukung oleh sebanyak 1.007 orang pegawai yang tersebar di 17 Satker. Rincian pegawai tersebut terdiri dari ASN sebanyak 837 orang dan PPNPN sebanyak 170. Secara umum sebaran pegawai di setiap Satker cukup merata antara 42-96 orang. Sebanyak 61,27% pegawai memiliki tingkat Pendidikan S1 sampai S3, dan sebanyak 73,19% pegawai berada pada golongan III dan IV maupun P3K golongan IX, hal ini menunjukan potensi yang besar untuk menunjang pencapaian kinerja secara optimal.

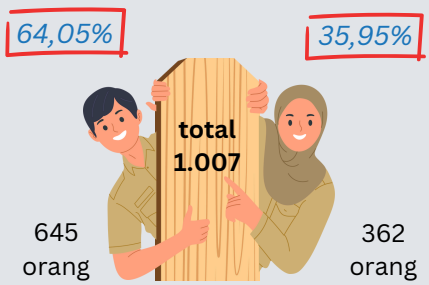

Sebaran pegawai berdasarkan jenis kelamin

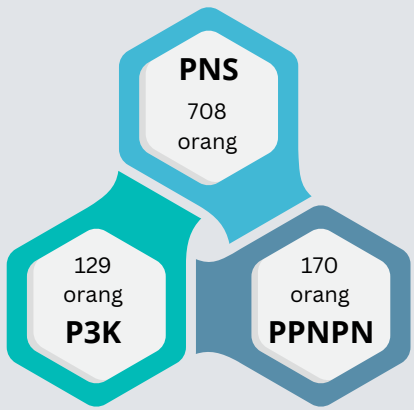

Sebaran pegawai berdasarkan Status kepegawaian

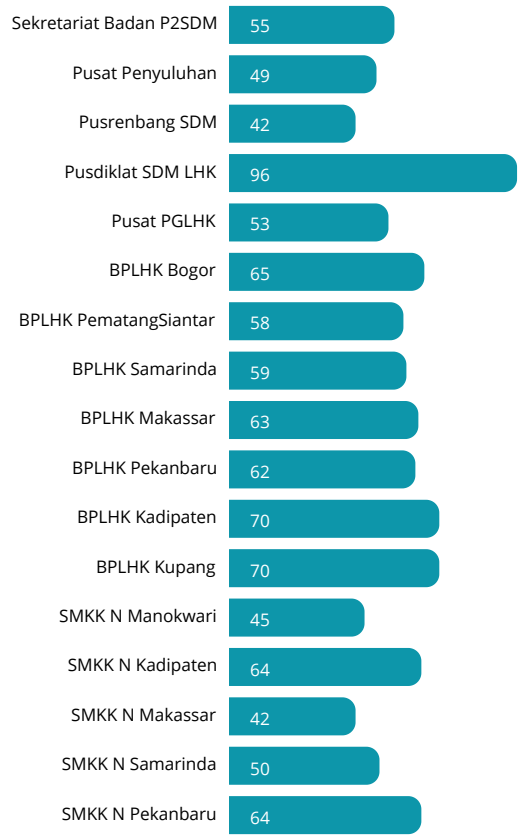

Sebaran pegawai berdasarkan satuan Kerja

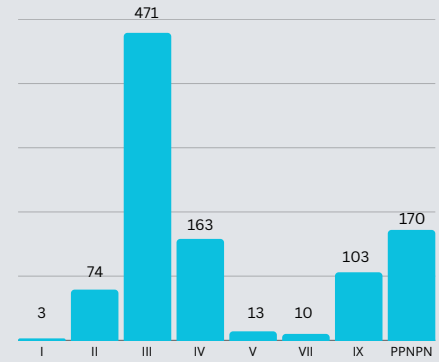

Sebaran pegawai berdasarkan golongan

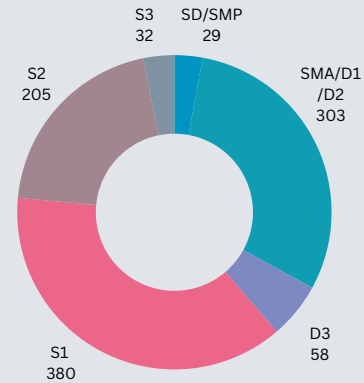

Sebaran pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berkenaan dengan pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, saat ini Badan P2SDM sedang melakukan penataan pegawai maupun penyesuaian tata hubungan kerja.

2

PERENCANAAN KINERJA

Patroli gabungan pengamanan KHDTK Sawala dan Mandapa

A. Rencana Strategis

Program dan Kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pembangunan lingkugan hidup dan kehutanan tidak terlepas dari kontribusi sumber daya manusia yang mengelolanya. sumber daya manusia LHK harus dapat bersaing secara global, dapat beradaptasi dan berdaya saing dengan kemajuan teknologi. Sejalan dengan hal tersebut langkah Kementerian LHK dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan tidak hanya fokus pada kebijakan sumber daya alam saja, tetapi juga diikuti dengan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Untuk memberikan arah pengembangan sumber daya manusia LHK, pada tahun 2022 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 revisi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor SK.9/P2SDM/SET.11/REN.2/4/2022. Berdasarkan dokumen tersebut, pelaksanaan tugas Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berfokus mendukung tiga program yang ada di Kementerian LHK dengan penjabaran selanjutnya pada 5 Kegiatan Utama dan 1 Kegiatan Dukungan Manajemen yang masing-masing kegiatan menggambarkan tugas dan fungsi dari masing-masing unit Eselon II lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Program 1	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi** Sasaran Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan
Program 2	**Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** Sasaran Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan
Program 3	**Program Dukungan Manajemen** Sasaran Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

***Cascading* Kinerja**

Sebagai upaya untuk menjabarkan dan menyelaraskan Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, disusunlah peta *cascading* arsitektur kinerja. Peta ini berfungsi sebagai alat yang menggambarkan hubungan dan konsistensi antara Sasaran dan Indikator Kinerja Kementerian KLHK dengan Sasaran dan Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Melalui peta *cascading* ini, ditunjukkan secara rinci kontribusi dan dukungan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mencapai Sasaran Strategis Kementerian KLHK. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki keterkaitan langsung dengan prioritas strategis kementerian, sehingga mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Peta *cascading* arsitektur kinerja juga berperan penting dalam mempermudah proses monitoring dan evaluasi, dengan memberikan gambaran yang jelas mengenai keterhubungan antara tingkat kebijakan strategis dengan implementasi di lapangan. Adapun rincian *cascading* arsitektur kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	IKU / IKP (IOP)	IKP	IKK
T4.S1 meningkatnya SDM KLHK yang Berkualitas	T4..S1.1 Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	T4.S1.1.1.1 Jumlah SDM LHK yang meningkat Kompetensinya	1. Lulusan Diklat Aparatur LHK 2. Lulusan Diklat Non Aparatur LHK 3. Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha 4. Lulusan Pendidikan Karyasiswa 5. Jumlah SDM LHK Bersertifikat Kompetensi 6. Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK 7. Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK
		T4.S1.1.1.2 Jumlah lulusan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	1. Jumlah Lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat
		T4.S1.1.1.3 Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	1. Nilai KHDTK yang Dikelola
		T4.S1.1.1.4 Jumlah Lembaga/ Komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup	1. Jumlah Satuan Pendidikan dan Lembaga Masyarakat/ Kominitas yang Peduli dan Berbudaya LHK 2. Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang LHK pada lembaga masyarakat dan komunitas
T2..S2 Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Hutan yang Berkelanjutan	T2.S2.1 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan Harga Berlaku	T2.S1.1.4.1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	1. Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh Handal) 2. Jumlah KT (KTH Mandiri) 3. Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan
T4..S2 Meningkatnya Birokrasi dan Layanan Publik yang agile, efektif dan efisien	T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 2. Level Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 3. Laporan Keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang Tertib dan Akuntabel 4. Nilai Kinerja Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Pohon Kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pohon kinerja merupakan alat bantu untuk mengawal struktur logika hubungan sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan untuk menghasilkan outcome. Penyusunan pohon kinerja diibaratkan seperti mengurai jalur kinerja secara logis yang dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome sehingga peran dari setiap tingaktan organisasi dapat terjabarkan dan Indikator Kinerja terbagi habis dari tingkat Kementerian sampai dengan tingkat Satuan Kerja. Penjabaran kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mencapai sasaran Strategis Kementerian LHK selengkapnya sebagaimana berikut:

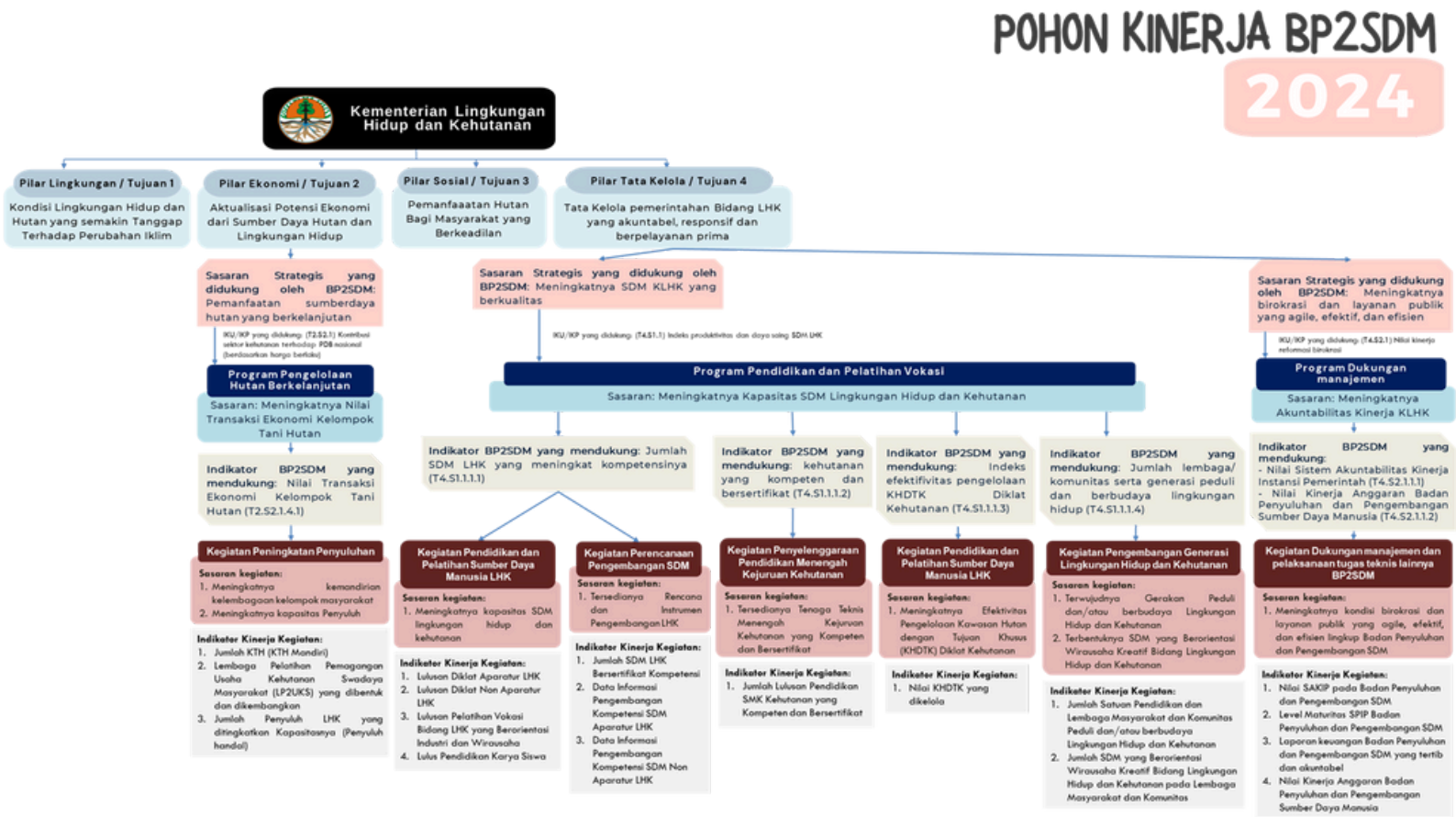

Indikator Kinerja Program 2020-2024

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran program, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyusun Indikator Kinerja Program (IKP). IKP berfungsi sebagai alat evaluasi utama yang dirancang dengan kriteria spesifik, terukur, relevan, dan berbasis hasil yang diharapkan. IKP memberikan gambaran komprehensif tentang sejauh mana pelaksanaan program sesuai dengan rencana strategis organisasi.

IKP juga menjadi dasar untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari berbagai program yang dilaksanakan. Selain itu, IKP berperan sebagai panduan dalam monitoring dan evaluasi program serta mendukung proses perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, IKP membantu memastikan bahwa program mencapai hasil yang optimal. Target IKP setiap tahun telah dirumuskan secara rinci dan dicantumkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang telah direvisi, sebagaimana berikut:

Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024
IKP 1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	Triliun Rupiah	2,5	0	0	0	2	2,5
IKP 2 Jumlah SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya	Orang	91.104	10.803	6.424	2.700	35.588	35.589
IKP 3 Jumlah Lulusan SMK Kehutanan yang kompeten dan Bersertifikat	Orang	2.364	466	478	475	472	473
IKP 4 Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	Poin	70	66,5	67	68	69	70
IKP 5 Jumlah Lembaga/Komunitas Serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Unit	4.128	77	260	230	1.780	1.781
IKP 6 Nilai SAKIP Badan P2SDM	Poin	80	72	74	76	78	80

B. Rencana Kerja Tahunan

Target dan Indikator Kinerja Program Tahun 2024

Dokumen Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 disusun sebagai penjabaran rencana kerja Kementerian LHK Tahun 2024 dan Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020-2024 (revisi) yang berisikan rincian kegiatan dan strategi pelaksanaan yang akan dilakukan oleh dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan bidang LHK. Dokumen Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor SK.32/P2SDM/SET.11/KEU.0/12/2023. Mengingat keterbatasan anggaran, berdasarkan trilateral meeting (KLHK, Kementerian Keuangan dan Bappenas) target yang ditetapkan di Renja tahun 2024 tidak dapat sesuai dengan target yang ditetapkan di Renstra pada beberapa Indikator Kinerja Program. selain itu, pada Tahun 2024 terdapat kebijakan baru di Kementerian LHK dengan menambahkan Indikator Kinerja baru yaitu Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mulai dari tingkat Kementerian, Eselon I sampai dengan tingkat Satker.

Selama pelaksanaan tahun 2024, terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhi target kinerja diantaranya penyesuaian pagu, dan adanya anggaran yang terkena blokir *automatic adjustment* (AA). Selain itu, satuan kerja di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga menjalin kerjasama dengan berbagai mitra. Oleh karena itu dilakukan penyesuaian pada target kinerja Tahun 2024 sesuai arahan dari Sekretariat Jenderal KLHK. Adapun target kinerja pada Indikator Kinerja Program Tahun 2024 berdasarkan target kinerja revisi pada Renja maupun Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

1	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Triliun)	0,5 Triliun
2	Jumlah SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya (orang)	15.536 Orang
3	Jumlah Lulusan SMK Kehutanan yang kompeten dan Bersertifikat (orang)	491 Orang
4	Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan (Poin)	70 Poin
5	Jumlah Lembaga/Komunitas Serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Unit)	3.368 Unit
6	Nilai SAKIP Badan P2SDM (Poin)	80 Poin
7	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan P2SDM (Poin)	82,5 Poin

Target dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024

Indikator Kinerja Program (IKP) yang diampu oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kemudian diajabarkan lebih lanjut menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang diimplementasikan oleh unit-unit Eselon II maupun UPT di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. IKK berperan sebagai indikator untuk mengukur capaian kegiatan yang spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pusat di bawah koordinasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Target dari masing-masing IKK dirancang untuk mencerminkan kebutuhan aktual serta mendukung pencapaian IKP Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Rincian IKK beserta targetnya yang telah direvisi dapat dilihat pada tabel berikut:

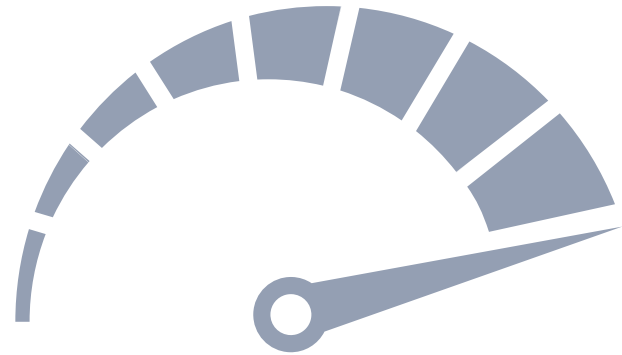

Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
5439	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan P2SDM Sasaran: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi dan birokrasi pada unit Badan P2SDM	Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 80 Poin
		Level Maturitas SPIP, level 4
		Laporan Keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang tertib dan akuntabel, 1 Laporan
		Nilai Kinerja Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 82,5 Poin
5444	Peningkatan Penyuluhan Sasaran : Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat	Jumlah KTH (KTH Mandiri), 100 Unit
		Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat / LP2UKS yang terbentuk dan dikembangkan, 50 Unit
		Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (penyuluh handal), 4.500
6745	Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK Sasaran: Meningkatnya kapasitas SDM LHK	**Lulusan diklat aparatur LHK, 3.659 Orang**
		Lulusan Diklat Non Aparatur LHK, 2.466 Orang
		Lulusan Pendidikan Karyasiswa, 10 Orang
		Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha, 7.871 Orang
		Nilai KHDTK yang dikelola, 70 Poin

Lanjutan

Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
6746	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan Sasaran : Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	**Jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat, 491 orang**
6747	Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sasaran: Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan hidup	**Jumlah Satuan Pendidikan dan Lembaga yang peduli dan Berbudaya LHK, 3.368 Unit** Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang LHK pada lembaga masyarakat dan komunitas, 720 Orang
6748	Perencanaan dan Pengembangan SDM Sasaran: Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kompeten	Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK, 5 Jenis Jabatan Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK, 5 Jenis Jabatan **Jumlah SDM LHK Bersertifikat Kompetensi, 1.500 orang**

IKK yang dicetak tebal merupakan Pengungkit IKU/IKP Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alokasi Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka mendukung pembiayaan kegiatan pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, pada Tahun 2024 Badan P2SDM didukung alokasi pagu anggaran awal sebesar Rp377.617.591.000,00. Seiring perjalanan selama tahun 2024, Badan P2SDM melakukan 7 kali penyesuaian anggaran karena adanya luncuran SBSN tahun 2023, Penambahan BOP, dan perubahan belanja pegawai sehingga pada akhir tahun anggaran pagu Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi sebesar Rp380.261.239.000,00. Adapun rincian anggaran terakhir pada tahun 2024 sebagai berikut:

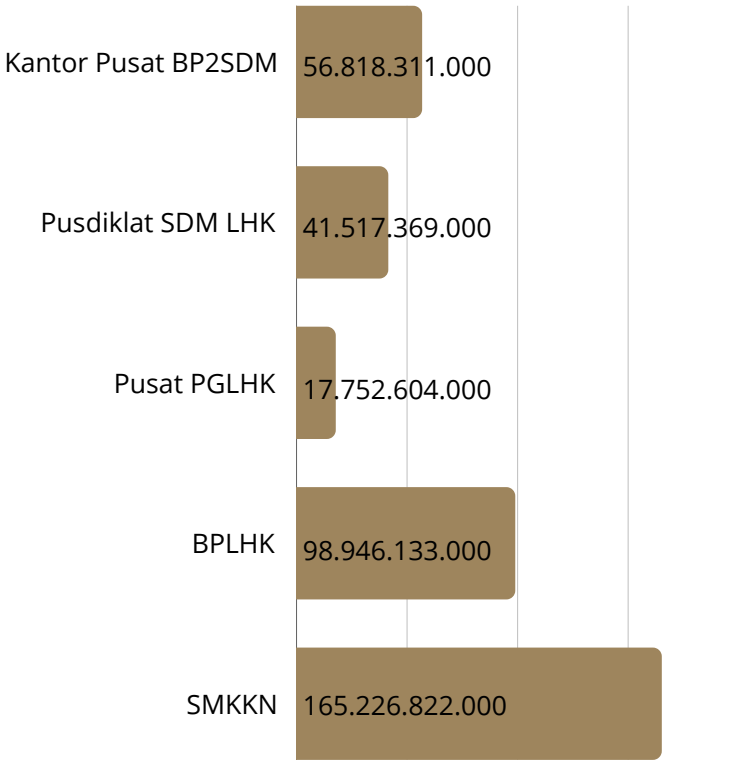

Komposisi Anggaran Per Program

Satker	Pagu	%
Dukman	192.371.234.000	50,59%
Diklat Vokasi	182.566.398.000	48,01%
PHB	5.323.607.000	1,40%
Total	380.261.239.000	100,00%

Komposisi Anggaran Sumber Dana

Sumber Dana	Pagu	%
RM	267.694.378.000	70,40%
PNBP	60.161.255.000	15,82%
SBSN	52.405.606.000	13,78%
Total	380.261.239.000	100,00%

Komposisi Anggaran Per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu	%
Belanja Pegawai	125.844.302.000	33,03%
Belanja Barang	123.745.435.000	48,43%
Belanja Modal	18.104.641.000	18,48%
Total	380.261.239.000	100,00%

Perjalanan Pagu Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

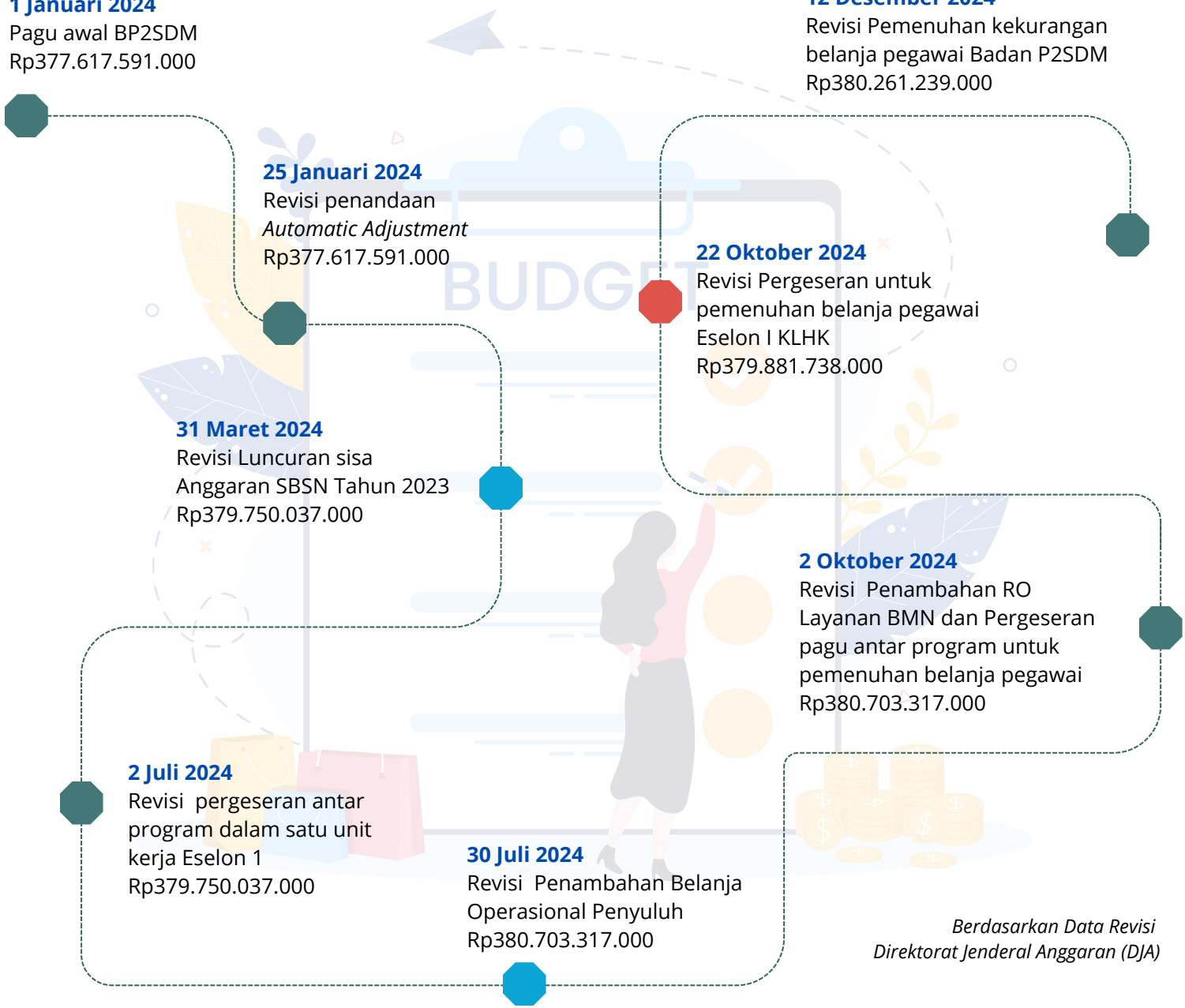

Berdasarkan Data Revisi Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

Perjalanan Pagu Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

Berdasarkan Memorandum Menteri LHK M.3/MENLHK/SETJEN/REN.0/4/2023 tentang Pagu Indikatif Kementerian LHK Tahun 2024, pada awal tahun 2024 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memperoleh anggaran sebesar Rp377.617.591.000,00 untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia. Rincian pagu anggaran Badan P2SDM pada awal tahun meliputi belanja pegawai sebesar Rp113.206.294.000,00, belanja barang sebesar Rp196.573.671.000,00 dan belanja modal sebesar Rp67.837.626.000,00.

Mempertimbangkan kondisi keuangan negara, Pemerintah kembali menerapkan kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) sehingga pada pada tanggal 25 Januari 2024 dilakukan revisi DJA pertama untuk mengakomodir pencadangan/blokir dalam DIPA Badan P2SDM sebesar Rp14.650.016.000,00. Selanjutnya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dari sumber dana SBSN yang tidak terserap secara maksimal di Tahun 2023, maka dilakukan luncuran sisa pagu anggaran SBSN tersebut sebesar Rp2.132.446.000,00 sehingga pada tanggal 31 Maret 2024 dilakukan revisi kedua yang mengakibatkan peningkatan pagu anggaran menjadi Rp379.750.037.00,00.

Sehubungan dengan terdapat peningkatan kebutuhan belanja pegawai akibat terbitnya Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan KLHK maka pada tanggal 2 Juli 2024 dilakukan revisi DJA ketiga dengan melakukan optimalisasi belanja internal berupa pergeseran antar jenis belanja dan antar program dalam Eselon I yang sama untuk memenuhi sebagian kekurangan belanja pegawai sebesar Rp10.209.482.000. Revisi DJA keempat dilakukan pada tanggal 31 Juli 2024 penambahan pagu dari pergeseran antar Eselon I dalam satu program yang sama lingkup KLHK sebesar Rp953.280.000,00- guna memenuhi kekurangan Biaya Operasional Penyuluh (BOP). Penambahan tersebut mengakibatkan perubahan pagu Badan P2SDM menjadi Rp380.703.317.000,00.

Selanjutnya, pada Bulan Oktober, Badan P2SDM dihimbau untuk melakukan optimalisasi belanja internal kembali untuk pemenuhan belanja pegawai tahap kedua, maka dilakukan Revisi DJA kelima berupa pergeseran antar jenis belanja dan antar program dalam Eselon I yang sama sebesar Rp2.662.541.000,00-. Selain revisi belanja pegawai tersebut, pada Revisi DJA kelima ini dilakukan pergeseran antar Rincian Output (RO) dalam satuan kerja yang sama untuk penambahan RO Layanan BMN pada seluruh Satker lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp35.100.000,00-. Hal ini merupakan strategi Badan P2SDM untuk dapat mencapai Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) yang baik mengingat adanya perubahan tata cara perhitungan yang membutuhkan penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK).

Revisi DJA keenam dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2024 berupa pergeseran anggaran antar Eselon I sebesar Rp821.579.000,00- untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai Eselon I lainnya lingkup KLHK sehingga mengakibatkan penurunan pagu anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi Rp379.881.738.000,00-.

Berdasarkan perhitungan Penyesuaian PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Aplikasi Gaji Web terdapat penyesuaian kebutuhan belanja pegawai di lingkup Badan P2SDM Tahun 2024 sehingga terdapat selisih kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp379.501.000,00-. Untuk itu dilakukan revisi DJA ketujuh pada tanggal 12 Desember 2024 berupa pergeseran antar Eselon I lingkup KLHK yang mengakibatkan penambahan pagu anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi Rp380.261.239.000,00.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Badan P2SDM telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Badan P2SDM dan Menteri LHK pada tanggal 28 Desember 2023. Dalam perjalanannya, terdapat revisi Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan P2SDM dengan Menteri Kehutanan sebagai pengampu DIPA BA.029 TA. 2024. Perubahan tersebut juga mencakup rasionalisasi target kinerja akibat adanya penyesuaian anggaran akibat kebijakan blokir anggaran *automatic adjusment (AA)*. Biro Perencanaan KLHK memfasilitasi perubahan perjanjian kinerja tersebut pada bulan Desember 2024. Adapun perubahan target pada beberapa IKP sebagaimana tabel berikut.

Sasaran UKE I	Indikator Kinerja Program	Target Awal	Target Revisi
Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi KTH	1. Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (KTH)	0,5 T	0,5 T
Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	14.915 Orang	15.536 Orang
	3. Jumlah lulusan SMK Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat	491 Orang	491 Orang
	4. Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	70 Poin	70 Poin
	5. Jumlah Lembaga Komunitas serta Generasi Peduli dan Berbudaya LH	3.368 Unit	3.368 Unit
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	6. Nilai SAKIP Badan P2SDM	80 Poin	80 Poin
	7. Nilai Kinerja Anggaran Badan P2SDM	97,25 Poin	82,5 Poin

3

AKUNTABILITAS KINERJA

Kegiatan ujian tertulis siswa Sekolah Menenga Kejuruan Kehutanan Negeri Makassar

A. Reviu Atas Dokumen Perencanaan

Pada Tahun 2024, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Badan P2SDM) melaksanakan pembaruan dokumen Rencana Kerja melalui penerbitan Suplemen Rencana Kerja Badan P2SDM Tahun 2024. Dokumen ini disusun sebagai respons terhadap dinamika perencanaan kinerja yang muncul sepanjang tahun, termasuk kebutuhan untuk menyesuaikan alokasi anggaran dan mendukung kegiatan yang dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama.

Perubahan alokasi anggaran di Badan P2SDM pada tahun tersebut terjadi sebanyak 7 kali sesuai dengan Revisi Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Adapun rincian dari perubahan tersebut mencakup pergeseran prioritas kegiatan, penyesuaian terhadap kebijakan strategis kementerian, serta penambahan atau pengurangan anggaran pada program tertentu yang mendukung pencapaian target kinerja Badan P2SDM Tahun 2024. Rincian lebih lanjut mengenai pergerakan anggaran tersebut dijelaskan dalam tabel berikut.

No	Pagu Semula	Pagu Menjadi	Tanggal Perubahan	Keterangan
1	377.617.591.000	377.617.591.000	25 Januari 2024	Revisi Automatic Adjustment Belanja TA. 2024 Lingkup BP2SDM sebesar Rp14.650.016.000,00
2	377.617.591.000	379.750.037.000	31 Maret 2024	Revisi luncuran pada Tahun 2023 ke Tahun 2024 pada kegiatan BP2SDM dengan sumber dana SBSN berupa Pembangunan Kampus II SMKKN Manokwari di Sorong sebesar Rp2.132.446.000,00
3	379.750.037.000	379.750.037.000	2 Juli 2024	Revisi Anggaran berupa pergeseran antar program dalam satu unit kerja Eselon 1 yang mengakibatkan perubahan DIPA dalam rangka pemenuhan belanja pegawai operasional Rp10.209.482.000,00
4	379.750.037.000	380.703.317.000	30 Juli 2024	Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah berupa penambahan pagu sumber dana RM pada Satuan Kerja Kantor Pusat Badan P2SDM (465019) sebesar Rp953.280.000,- yang berasal dari pergeseran anggaran antar Unit Eselon I lainnya dalam 1 (satu) Program yang sama lingkup KLHK
5	380.703.317.000	380.703.317.000	2 Oktober 2024	- Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap berupa pergeseran antar RO untuk pemenuhan RO generik baru (RO SBKU) lingkup Badan P2SDM sebesar Rp35.100.000,00 - Revisi Anggaran pada K/L berupa pergeseran antar program dalam satu unit kerja Eselon 1 yang mengakibatkan perubahan DIPA dalam rangka pemenuhan belanja pegawai operasional sebesar Rp2.662.541.000,-.
6	380.703.317.000	379.881.738.000	22 Oktober 2024	Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah berupa pergeseran antar Unit Kerja Eselon I Kementerian LHK dalam satu program yang mengakibatkan perubahan DIPA dalam rangka pemenuhan belanja pegawai operasional lingkup KLHK sebesar Rp821.579.000,- .
7	379.881.738.000	380.261.239.000	12 Desember 2024	Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah berupa penambahan berupa pergeseran antar jenis belanja dan antar Unit Kerja Eselon I Kementerian LHK dalam satu program yang mengakibatkan perubahan DIPA dalam rangka pemenuhan belanja pegawai operasional lingkup BP2SDM sebesar Rp379.501.000,-.

Dokumen Suplemen Rencana Kerja Badan P2SDM Tahun 2024 menjelaskan perubahan target Indikator Kinerja Kegiatan lingkup Badan P2SDM Tahun 2024 sebagai upaya penyesuaian strategi dan prioritas kegiatan dengan perkembangan kebutuhan organisasi, alokasi sumber daya dan hasil monitoring atas kinerja yang dipantau secara berkala di tahun berjalan. terdapat 5 dari 18 Indikator kinerja kegiatan yang mengalami perubahan target kinerja selama tahun 2024. Adapun rincian perubahan tersebut tergambarkan sebagaimana infografis berikut:

Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Awal	Target Akhir
5439 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan P2SDM Sasaran: *Meningkatnya tata kelolapemerintahan yang baiksesuaikerangka reformasi dan birokrasi pada unit Badan P2SDM*	Nilai SAKIP Badan P2SDM	80 Poin	80 Poin
	Level Maturitas SPIP	Level 4	Level 4
	Laporan Keuangan Badan P2SDM yang tertib dan akuntabel	1 Dokumen	1 Dokumen
	Nilai Kinerja Anggaran Badan P2SDM	97,25 Poin	82,5 Poin
5444 Peningkatan Penyuluhan Sasaran : Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat	Jumlah KTH (KTH Mandiri)	100 Kelompok	100 Kelompok
	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat / LP2UKS yang terbentuk dan dikembangkan	50 Kelompok	50 Kelompok
	Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	1.000 Orang	4.500 Orang
6745 Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK Sasaran: Meningkatnya kapasitas SDM LHK	Lulusan Diklat Aparatur LHK	4.335 Orang	3.659 Orang
	Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	1.240 Orang	2.506 Orang
	Lulusan Pendidikan Karyasiswa	10 Orang	10 Orang
	Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha	7.850 Orang	7.871 Orang
	Nilai KHDTK yang dikelola	70 Poin	70 Poin

Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Awal	Target Revisi
6746 Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan Sasaran : Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	Jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	491 Orang	491 Orang
6747 Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sasaran: Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan hidup	Jumlah Satuan Pendidikan dan Lembaga yang peduli dan Berbudaya LHK	3.386 lembaga	3.386 lembaga
	Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang LHK pada lembaga masyarakat dan komunitas	720 Orang	720 Orang
6745 Perencanaan dan Pengembangan SDM Sasaran: Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kompeten	Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	5 Dokumen	5 Dokumen
	Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	5 Dokumen	5 Dokumen
	Jumlah SDM LHK Bersertifikat Kompetensi	1.500 orang	1.500 orang

Berdasarkan infografis diatas, terdapat peningkatan target kinerja pada IKK Lulusan Diklat Non Aparatur LHK dan Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha mengalami peningkatan akibat adanya dukungan kerjasama pelatihan dengan berbagai pihak mulai dari sisi pengajar, sarana prasarana maupun anggaran. Selain itu, peningkatan juga terjadi pada Indikator Kinerja Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan Kapasitasnya, hal ini didukung dengan penyesuaian metode pelaksanaan peningkatan kapasitas dari semula dilaksanakan secara tatap muka menjadi dilaksanakan secara virtual pada beberapa gelombang. Disisi lain, terdapat penurunan target kinerja pada Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA) akibat penyesuaian terhadap perubahan kebijakan pengukuran NKA setelah diterbitkannya Peraturan Menteri LHK nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Indikator Kinerja Lulusan Diklat aparatur LHK juga mengalami penurunan target kinerja yang disebabkan *refocusing* anggaran untuk mendukung peningkatan tunjangan kinerja di lingkup Kementerian LHK pada tahun 2024.

Seluruh perubahan pada Indikator Kinerja lingkup Badan P2SDM telah disesuaikan pada dokumen perencanaan (Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja maupun RKA-KL) dan telah dilakukan penyelarasan dengan Biro Perencanaan KLHK untuk melakukan penyesuaian pada dokumen perencanaan Kementerian LHK melalui Nota Dinas Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM nomor: ND. 753/ SETBP2SDM/ PEHKT/ REN.2.7B/12/ 2024 tentang Revisi Perjanjian Kinerja BP2SDM Tahun 2024.

B. Reviu Atas Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Pada tahun 2024, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia meraih nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 87,77 poin dengan predikat Memuaskan. Pencapaian ini didasarkan pada Surat Inspektur Jenderal KLHK Nomor SP.75/ITJEN/ITWIL.2/RHS/WAS.2.1/4/2024 tanggal 17 April 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2024 pada Badan P2SDM. Nilai tersebut melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu 80 poin untuk tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, terdapat peningkatan sebesar 11,58 poin, yang menunjukkan komitmen Badan P2SDM dalam melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola kinerja. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas langkah-langkah strategis yang telah dilakukan, termasuk penguatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.

Namun demikian, meskipun nilai SAKIP 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik, terdapat sejumlah rekomendasi dari evaluasi tersebut yang perlu diperhatikan untuk mendorong peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti sepenuhnya oleh Badan P2SDM, dengan fokus pada peningkatan aspek tertentu dalam tata kelola kinerja, seperti konsistensi pelaporan, penguatan manajemen risiko, dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Rincian tindak lanjut atas rekomendasi tersebut dapat dilihat pada tabel penjelasan berikut.

No	Rekomendasi	Upaya Tindak Lanjut
1	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja pada website secara tepat waktu	Badan P2SDM telah menginventarisir kembali dokumen perencanaan maupun pelaporan tahun 2024 untuk dapat diunggah tepat waktu.
2	Menyusun dan mentapkan Indikator Kinerja dengan memperhatikan seluruh aspek dan risiko agar sustainable, dan dapat direalisasikan, menantang serta realistis	Badan P2SDM akan menyusun Indikator Kinerja Program dan Kegiatan di dokumen Renstra Badan P2SDM Tahun 2025 - 2029 dan Renja Badan P2SDM 2025 yang memperhatikan seluruh aspek dan risiko agar sustainable, dan dapat direalisasikan, menantang serta realistis
3	Menetapkan kebijakan penempatan/penghapusan jabatan dengan mempertimbangkan hasil kinerja yang telah dilaksanakan	Badan P2SDM saat ini sedang menyusun analisis kebutuhan pengembangan kompetensi untuk mendukung meritokrasi & manajemen talenta lingkup Kementerian Kehutanan.
4	melaksanakan kegiatan survei yang relevan dan sesuai kebutuhan	Badan P2SDM akan menyiapkan perangkat survei yang relevan dan sesuai kebutuhan serta melaksanakan survei sesuai dengan yang dibutuhkan

(lanjutan)

No	Rekomendasi	Upaya Tindak Lanjut
5	Menyempurnakan metode penilaian dan pengumpulan data kinerja agar dapat dijadikan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja secara memadai	Badan P2SDM telah melakukan revisi pada Pedoman pengukuran kinerja dengan menyempurnakan alur pengumpulan data kinerja melalui Keputusan Kepala Badan P2SDM nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan P2SDM nomor SK.30/P2SDM/SET.11/REN0/12/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja Rencana Strategis Tahun 2020-2024
6	Melakukan pengawasan secara lebih intensif pada penyusunan dokumen capaian kinerja sehingga data dan informasi yang tersedia bisa berkesinambungan	Badan P2SDM akan melakukan pemantauan secara intensif dan periodik melalui kegiatan rekonsiliasi data capaian kinerja lingkup Badan P2SDM yang menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Capaian Kinerja Badan P2SDM
7	pelaporan untuk lebih informatif sehingga dapat memengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	Badan P2SDM akan menyusun laporan kinerja yang lebih informatif dan disampaikan ke seluruh pegawai dan stakeholder terkait (salah satunya melalui website/media sosial) sebagai sarana penyampaian informasi sehingga dapat memengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

C. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Proses ini dilakukan sebagai upaya memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan dan memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran organisasi. Pengukuran dilakukan melalui empat metode utama, yaitu presentase capaian kinerja, progress terhadap pelaksanaan Renstra, efektivitas kinerja dan efisiensi kinerja. Adapun perhitungan menggunakan formula sebagai berikut:

Presentase Capaian Kinerja

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target Kinerja Tahun 2024

$$\textbf{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Efisiensi

Membandingkan antara capaian anggaran dengan capaian kinerja fisik Tahun 2024

$$\textbf{Efisiensi} = \frac{\%\ \text{Keuangan Tahun Berjalan}}{\%\ \text{Fisik Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

Efisiensi > 1 maka Belum Efisien
Efisiensi ≤ 1 maka Efisien

1

2

3

4

Efektivitas

Membandingkan % kinerja Tahun 2024 dengan %capaian kinerja tahun 2023

$$\textbf{Efektivitas} = \frac{\%\ \text{Fisik Tahun Berjalan}}{\%\ \text{Fisik Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

Efektivitas ≥ 1 maka efektif
Efektivitas < 1 maka Belum Efektif

Progres Renstra

Membandingkan capaian selama periode Renstra dengan target Renstra 2020-2024

$$\textbf{Capaian Renstra} = \frac{\sum\text{Realisasi 2020 s.d 2024}}{\text{Target 2020 s.d 2024}} \times 100\%$$

D. Hasil Pengukuran Kinerja

1. Presentase Capaian Kinerja

Hasil evaluasi kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (P2SDM) secara umum telah berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja revisi. Rata-rata capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja revisi mencapai 112,48%, mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan telah memberikan hasil yang sangat memuaskan dan bahkan melebihi ekspektasi.

Capaian ini mencerminkan keberhasilan Badan P2SDM dalam mengoptimalkan sumber daya, memitigasi hambatan, dan menjalankan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan sumber daya manusia di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Namun demikian, meskipun secara umum kinerja Badan P2SDM menunjukkan hasil yang baik, terdapat satu indikator kinerja program yang tidak mencapai target, yaitu Jumlah Lulusan SMK Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat. Target ini tidak tercapai akibat adanya 4 siswa SMK Kehutanan Negeri yang tidak lulus.

Tabel capaian IKP Badan P2SDM Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Program	Target PK	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (KTH)	0,5 Triliun	1,43 Triliun	150,00%
2	Jumlah SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya	15.536 Orang	15.738 Orang	101,30%
3	Jumlah lulusan SMK Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat	491 Orang	487 Orang	99,18%
4	Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	70 Poin	75,26 Poin	107,51%
5	Jumlah Lembaga Komunitas Serta Generasi Peduli dan Berbudaya LH	3.368 Lembaga	3.368 Lembaga	100,00%
6	Nilai SAKIP Badan P2SDM	80 Poin	87,77 Poin	109,71%
7	Nilai Kinerja Anggaran Badan P2SDM	82,5 Poin	98,72 Poin	119,66%
	Rata-rata Presentase Capaian Kinerja			112,48%

1. Presentase Capaian Kinerja (lanjutan)

Pengukuran capaian kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi pada Tahun 2024 dengan target yang ada pada RPJMN sebagai standar nasional. Adapun terdapat beberapa Indikator Kinerja Program yang tidak masuk dalam RPJMN karena bukan merupakan Prioritas Nasional. Rincian capain kinerja disajikan pada tabel di bawah. Berdasarkan data tersebut seluruh Indikator Kinerja di lingkup Badan P2SDM yang tercantum dalam RPJMN dapat tercapai seluruhnya berdasarkan target tahunan.

Tabel capaian IKP Badan P2SDM Tahun 2024 terhadap RPJMN

No	Indikator Kinerja Program	Target RPJMN	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (KTH)	-	1,43 Triliun	-
2	Jumlah SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya	10.210 Orang	15.738 Orang	150%*
3	Jumlah lulusan SMK Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat	473 orang	487 Orang	102,96%
4	Indeks Efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	-	75,26 Poin	-
5	Jumlah Lembaga Komunitas Serta Generasi Peduli dan Berbudaya LH	1.080 Lembaga	3.368 Lembaga	150%*
6	Nilai SAKIP Badan P2SDM	-	87,77 Poin	-
7	Nilai Kinerja Anggaran Badan P2SDM	-	98,72 Poin	-
	Rata-rata Presentase Capaian Kinerja			134,32%

2. Efektivitas Kinerja

Rata-rata capaian kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 meningkat 2,87% (YoY) jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini mengakibatkan rata-rata efektivitas kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 sebesar 1,03 (termasuk dalam kategori efektif). Peningkatan kinerja paling signifikan terlihat pada Indikator Kinerja Program Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 dari capaian sebesar 97,71% pada tahun 2023 menjadi 109,71% pada tahun 2024. Hal ini didukung dengan penggunaan aplikasi eSAKIP KLHK untuk melakuakan evaluasi implementasi SAKIP dari tingkat satuan kerja dan unit kerja sampai dengan tingkat kementerian sehingga penilaian dapat dilakukan lebih transparan, mendetail dan objektif. Perhitungan efektivitas kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Berdasarkan tabel tersebut, meskipun efektivitas capaian kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sudah masuk alam kategori efektif (1,03), namun masih terdapat 2 Indikator Kinerja Program (IKP) yang perlu mendapatkan perhatian lebih yaitu IKP Jumlah SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya dengan nilai efektifitas sebesar 0,99 serta IKP Lulusan SMK Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat dengan nilai efektivitas sebesar 0,99. Untuk itu, pada tahun selanjutnya Badan P2SDM akan lebih berupaya untuk meningkatkan kinerja pada kedua Indikator Kinerja tersebut melalui optimalisasi sistem pelatihan dengan metode *full e-learning* maupun *massive online open courses* (MOOC) serta melaksanakan pembinaan secara intensif pada siswa SMK Kehutanan agar dapat memenuhi standar kelulusan baik dari sisi kompetensi akademis maupun ketertiban/kedisiplinan siswa.

Tabel Efektivitas Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Program	% Capaian Kinerja		Efektivitas
		2023	2024	
1	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (KTH)	150,00%	150,00%	1,00
2	Jumlah SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya	101,90%	101,30%	0,99
3	Jumlah lulusan SMK Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat	100,00%	99,19%	0,99
4	Indeks Efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	108,04%	107,51%	1,00
5	Jumlah Lembaga Komunitas Serta Generasi Peduli dan Berbudaya LH	100,00%	100,00%	1,00
6	Nilai SAKIP Badan P2SDM	97,71%	109,71%	1,12
7	Nilai Kinerja Anggaran Badan P2SDM	-	119,66%	-
	Rata-rata Presentase Capaian Kinerja	109,61%	112,48%	1,03

3. Efisiensi Kinerja

Realisasi anggaran Badan P2SDM pada tahun 2024 sebesar Rp354.857.226.302,00 atau sebesar 93,32% dari pagu anggaran Rp380.261.239.000,00. Pencapaian anggaran tersebut tidak maksimal karena adanya anggaran yang terkena blokir *automatic adjusment* dan tidak terserapnya seluruh anggaran dari sumber dana SBSN.

Secara umum kinerja Badan P2SDM pada Tahun 2024 sudah efisien, hal ini ditunjukan dari rata-rata nilai efisiensi sebesar 0,82 yang berarti penggunaan anggaran Badan P2SDM telah optimal untuk mencapai target IKP. Tingginya nilai efisiensi pada Tahun 2024 ditunjang oleh tingginya presentase capaian Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan dan dan Nilai Kinerja Anggaran Badan P2SDM dari target. Rincian efisiensi kinerja disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel Efisiensi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Program	% Capaian Kinerja		Efisiensi
		Fisik	Keuangan	
1	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (KTH)	150,00%	88,30%	0,59
2	Jumlah SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya	101,30%	97,88%	0,97
3	Jumlah lulusan SMK Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat	99,19%	88,16%	0,89
4	Indeks Efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	107,51%	98,71%	0,92
5	Jumlah Lembaga Komunitas Serta Generasi Peduli dan Berbudaya LH	100,00%	97,94%	0,98
6	Nilai SAKIP Badan P2SDM	109,71%	97,07%	0,88
7	Nilai Kinerja Anggaran Badan P2SDM	119,66%	97,07%	0,81
	Rata-rata Presentase Capaian Kinerja	112,48%	93,32%	0,83

4. Progres Renstra

Untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian kinerja terhadap perencanaan jangka menengah yang telah disusun dalam Rencana Strategis, dilakukan pengukuran progres pencapaian Renstra Tahun 2020-2024. Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata progres capaian Renstra Badan P2SDM s.d Tahun 2024 sebesar 87,13%. Masih terdapat 2 Indikator kinerja dengan capaian rendah yaitu IKP 1 dan IKP 2. Beberapa Upaya yang akan dilaksanakan BP2SDM pada tahun 2024 untuk memperbaiki perencanaan kinerja menengah selanjutnya yaitu:

1. Menggiatkan sosialisasi kepada KTH maupun penyuluh kehutanan untuk berpartisipasi aktif dalam penginputan data omzet KTH sertapendampingan KTH secara lebih intensif untuk meningkatkan aktivitas ekonomi KTH
2. Meningkatkan alokasi anggaran pada kegiatan pelatihan, melanjutkan intervensi anggaran pada pelatihan kerjasama dan mengoptimalkan penggunaan e-learning sehingga target pada tahun 2024 dapat meningkat cukup signifikan
3. Melakukan pencermatan yang lebih matang dalam menentukan target kinerja yang ingin dicapai dengan memperhatikan tren kinerja di tahun-tahun sebelumnya.

Tabel Progres Capaian Renstra Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Program	Target 2020-2024	Realisasi						%
			2020	2021	2022	2023	2024	s.d 2024	
1	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (KTH) (Triliun)	2,50	-	-	-	0,687	1,430	1,430	57,20%
2	Jumlah SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya (orang)	91.104	10.803	8.419	2.388	6.475	15.738	43.823	48,10%
3	Jumlah lulusan SMK Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat (Orang)	2.364	466	475	470	472	487	2.370	100,25%
4	Indeks Efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan (Poin)	70	66,50	67,81	74,86	74,55	75,26	75,26	107,51%
5	Jumlah Lembaga Komunitas Serta Generasi Peduli dan Berbudaya LH (Lembaga)	4.128	77	260	176	247	3.368	4.128	100,00%
6	Nilai SAKIP Badan P2SDM (Poin)	80,00	80,82	71,75	71,75	76,21	87,77	87,77	109,71%
7	Nilai Kinerja Anggaran Badan P2SDM (Poin)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rata-rata Presentase Capaian Kinerja								87,13%

Benchmarking Kinerja

BP2SDM KLHK dengan BPPSDMKP KKP

"**Benchmarking** merupakan **salah satu langkah** untuk **meningkatkan Akuntabilitas Kinerja**, yang bertujuan untuk membandingkan kinerja kedua instansi guna **memperoleh gambaran objektif** serta mendapatkan **langkah-langkah inovatif** yang dapat **diadopsi.**"

Benchmarking **Kinerja**

Pada tanggal 13 November 2024, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (P2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan kegiatan *benchmarking* kinerja dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Benchmarking* kinerja merupakan proses pembandingan kinerja antara dua atau lebih organisasi yang memiliki fungsi atau tujuan serupa, yang memungkinkan instansi untuk belajar dari praktik terbaik yang telah diterapkan oleh pihak lain serta mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Kegiatan benchmarking ini bertujuan untuk membandingkan kinerja kedua instansi guna memperoleh gambaran yang objektif mengenai pencapaian yang telah diraih, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah inovatif yang dapat diadopsi.

Badan P2SDM dan BPPSDMKP memiliki kesamaan dalam fungsi pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, di mana keduanya berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan strategis kementerian masing-masing melalui penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, melalui pertukaran informasi, pengalaman, dan praktik terbaik, diharapkan kedua instansi dapat memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dari kegiatan *benchmarking*, terdapat beberapa indikator kinerja yang sama diantaranya:

INDIKATOR KINERJA 2024

1. Jumlah SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya (15.536 orang).
2. Nilai SAKIP BP2SDM (80 poin)
3. Nilai Kinerja Anggaran Badan P2SDM (82,5 Poin)
4. Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat / LP2UKS yang terbentuk dan dikembangkan (50 Unit)
5. Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (4.500 orang)

1. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (5.423 orang).
2. Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP (81 poin)
3. Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMKP (86 Poin)
4. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan yang dibentuk (4.000 Kelompok)
5. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan yang ditigkatkan kapasitasnya (2.000 Kelompok)

Dari indikator kinerja BPPSDMKP terdapat indikator yang tidak hanya berorientasi pada *ouput* semata, namun sudah berorientasi pada *outcome*. Sementara itu, dari 7 indikator kinerja di Badan P2SDM, baru satu indikator yang berorientasi pada *outcome* yaitu Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (NTE KTH) yang menghitung omzet perputaran usaha KTH yang merupakan dampak dari intervensi Badan P2SDM kepada KTH dan penyuluh pendamping.

Beberapa Indikator kinerja BPPSDMKP yang sudah berorientasi *outcome* antara lain:

1. Presentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (72%)
2. Lulusan Pendidikan dan Pelatihan yang Membentuk *Star Up* (usaha rintisan) (402 orang)
3. Desa/kawasan mitra yang menerapkan IPTEK Kelautan dan Perikanan (Desa Perikanan Cerdas) (15 Desa)

Dari ketiga indikator kinerja di atas, Badan P2SDM dapat mengapdosinya untuk merestrukturisasi indikator kinerjanya "Tenaga Teknis Kejuruan Menengah Kehutanan yang bersetifikat kompeten" yang pada saat ini hanya berorientasi pada output (jumlah lulusan) dapat ditingkat menjadi "Jumlah Lulusan Sekolah Menengah Kehutanan yang Bekerja di Sektor Kehutanan" dengan satuan persen bekerja.

Beberapa hasil diskusi yang diperoleh berdasarkan hasil diskusi kinerja dan dapat menjadi input untuk peningkatan kinerja Badan P2SDM diantaranya:

1. Indikator kinerja yang dimiliki BPPSDMKP tidak hanya berorientasi pada *ouput* semata, namun beberapa sudah berorientasi pada *outcome*. Sementara itu, dari 7 indikator kinerja di Badan P2SDM, baru satu indikator yang berorientasi pada *outcome* yaitu Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (NTE KTH) yang menghitung omzet perputaran usaha KTH yang merupakan dampak dari intervensi Badan P2SDM kepada KTH dan penyuluh pendamping. Untuk itu dalam perencanaan kinerja jangka menengah selanjutnya perlu merumuska indikator-indikator kinerja berbasis *outcome*.
2. BPPSDMKP telah menyusun Manual IKU yang sudah lengkap sesuai dengan kebutuhan pengisian data pada aplikasi SMART terbaru. Badan P2SDM saat ini juga memiliki dokumen sejenis yaitu Pedoman Pengukuran Kinerja lingkup Badan P2SDM yang dapat disempurnakan dengan mengadopsi dokumen Manual IKU BPPSDMKP.
3. Berdasarkan struktur kelembagaan, penyuluh perikanan dan kelautan pada BPPSDMKP berada langsung di bawah Kementerian, hal ini memudahkan dalam tata hubungan kerja dan menjangkau masyarakat di tingkat tapak. Hal yang berbeda pada Badan P2SDM, secara jumlah pada saat ini Penyuluh Kehutanan lebih banyak berada di Pemerintah Daerah (sesuai dengan UU 23 Tahun 2014) sehingga koordinasi kepenyuluhan kurang berjalan dengan optimal dalam peningkatan pendampingan.
4. Pembagian kinerja di BPPSDMKP dapat terbagi rata dari tingkat pimpinan tertinggi sampai ke seluruh pelaksana karena telah tercermin pada 22 Indikator Kinerja yang diampu.

IKP 1

Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan

Pelaksana : Pusat Penyuluhan

CAPAIAN KINERJA

Nilai Transaksi Ekonomi KTH

Sejak tahun 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mulai mengambil langkah strategis baru untuk menghitung kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Langkah ini dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2024, dengan memasukkan Indikator Kinerja berupa Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Perhutanan Sosial dan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH). Target yang ditetapkan untuk indikator ini berkisar antara Rp2 hingga Rp9 triliun. Meskipun langkah ini masih merupakan pendekatan baru, NTE KTH berpotensi menjadi alternatif signifikan dalam meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB Nasional. Selain itu, indikator ini mendukung peran pelaku utama di tingkat tapak dalam perekonomian nasional, sekaligus diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut.

Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (disingkat NTE KTH) didefinisikan sebagai nilai rupiah yang dihasilkan dari aktivitas usaha kelompok tani hutan. Definisi ini merujuk pada Peraturan Kepala Badan P2SDM Nomor P.5/P2SDM/SET.11/SET.1/11/2022 tentang pengukuran nilai transaksi ekonomi kelompok tani hutan. Perhitungan NTE mencakup penjumlahan omzet seluruh KTH, yang meliputi produk barang dan/atau jasa, termasuk hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, serta produk turunan lainnya yang berkontribusi terhadap omzet. NTE KTH diadopsi sebagai salah satu Indikator Kinerja Program pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sejak tahun 2023 berdasarkan Revisi Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Indikator ini digunakan untuk mengukur dampak intervensi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui program pembinaan kelembagaan kelompok masyarakat dan peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan yang dilaksanakan oleh Pusat Penyuluhan, bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam berbagai kegiatan penyuluhan kehutanan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Menteri LHK Tahun 2024, target NTE KTH ditetapkan sebesar Rp0,5 triliun. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi NTE KTH pada Tahun 2024 dapat mencapai Rp. 1,433 Triliun atau sebesar 150% dari target (dibatasi 150%). Capaian ini meningkat bila dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2023 yang sebesar Rp686.78 Milyar. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target akhir pada Renstra tahun 2020-2024 yang sebesar Rp2,5 Triliun, maka kinerja NTE KTH pada tahun 2024 baru dapat mencapai 57,20% dari target Renstra. Hal ini menjadi pertimbangan bahwa dalam penentuan target kinerja jangka menengah pada Renstra harus dapat lebih cermat sesuai dengan potensi yang dapat diraih. Pada proses perencanaan kinerja tahun 2024-2029, Badan P2SDM akan menetapkan target NTE KTH yang lebih meningkat dibandingkan capaian kinerja tahun 2024 namun dengan memperhatikan tren peningkatan NTE tahun 2023-2024 serta melakukan upaya maupun intervensi yang lebih terhadap kelompok guna mendorong peningkatan produksi barang dan jasa dari KTH.

Pencapaian NTE KTH Tertinggi pada tahun 2024 diperoleh Provinsi Jawa Timur sebesar Rp624.529.390.335 yang didukung oleh produksi jenis barang dan jasa seperti hasil hutan kayu. Secara Nasional, jenis barang dan jasa yang memiliki NTE paling tinggi yaitu Hasil Hutan Kayu dengan transaksi sebesar Rp410.578.207.407. Hal ini menunjukan bahwa produksi kayu hutan rakyat yang dilakukan oleh kelompok masyarakat masih menjadi usaha kehutanan yang dominan dan menjadi salah satu sumber utama pendapatan masyarakat. Teridentifikasinya produk barang dan jasa yang dihasilkan di setiap daerah melalui pencatatan NTE KTH ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan kebijakan dan penyusunan program pendampingan di setiap daerah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya Kelompok Tani Hutan.

Rp1.433.074.741.397,00

Capaian NTE 2024
dengan partisipasi KTH sebanyak 6.511KTH

Mekanisme Pengumpulan Data NTE

1. Penyuluh Kehutanan PNS memperoleh akses masuk (akun) SIMLUH dan melakukan pendampingan KTH di lapangan
2. Penyuluh Kehutanan PNS mengumpulkan hasil pencatatan omzet KTH per produk barang dan jasa
3. Penyuluh Kehutanan PNS menginput data omzet KTH per produk badang/jasa pada aplikasi SIMLUH sesuai dengan panduan

Propinsi dengan NTE tertinggi

1. **Jawa Timur** Rp. 624.529.390.355
2. **Jawa Barat** Rp. 332.555.476.456
3. **Lampung** Rp. 323.206.307.012
4. **Jawa Tengah** Rp. 66.951.836.338
5. **Sulawesi Tengah** Rp. 17.246.026.376

Jenis Barang Jasa dengan NTE tertinggi

1. **Hasil Hutan Kayu** Rp. 410.578.207.407
2. **Kopi** Rp. 354.773.834.359
3. **Tanaman Pangan Agroforestry** Rp. 173.441.131.663
4. **Buah Buahan dan Biji-Bijian** Rp.118.437.764.190
5. **Hasil Wana Ternak (silvopastura)** Rp. 51.418.714.773

Berdasarkan Aplikasi SIMLUH tanggal 31 Desember 2024

Tabel Rekapitulasi Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan

No	Provinsi	NTE 2023		NTE 2024	
		Rp	Partisipasi KTH	Rp	Partisipasi KTH
1	ACEH	525.993.000	12	182.925.000	8
2	SUMATERA UTARA	3.047.365.000	13	1.500.000	1
3	SUMATERA BARAT	839.503.000	57	257.331.000	24
4	RIAU	237.905.000	4	327.930.000	9
5	JAMBI	4.192.848.000	34	10.462.277.300	68
6	SUMATERA SELATAN	2.307.753.500	4	680.100.000	9
7	BENGKULU	13.738.452.000	21	13.873.375.500	26
8	LAMPUNG	234.767.159.636	893	323.206.307.012	898
9	BANGKA BELITUNG	382.329.000	16	263.540.500	16
10	KEPULAUAN RIAU	0	0	0	0
11	DKI JAKARTA	71.559.000	9	144.312.000	8
12	JAWA BARAT	87.175.908.742	700	332.555.476.456	2.246
13	JAWA TENGAH	72.593.745.525	464	66.951.836.338	324
14	D.I. YOGYAKARTA	4.366.346.420	80	5.669.990.000	135
15	JAWA TIMUR	189.007.510.786	735	624.529.390.335	2.025
16	BANTEN	4.233.522.300	34	6.225.098.900	95
17	BALI	395.200.000	9	823.861.972	6
18	NUSA TENGGARA BARAT	23.721.420.051	74	4.993.607.500	28
19	NUSA TENGGARA TIMUR	4.288.020.750	106	517.313.607	63
20	KALIMANTAN BARAT	4.108.974.300	19	3.266.083.500	27
21	KALIMANTAN TENGAH	5.428.360.000	45	3.897.634.598	30
22	KALIMANTAN SELATAN	1.843.026.569	67	3.854.778.952	140
23	KALIMANTAN TIMUR	522.130.000	19	1.343.366.500	20
24	KALIMANTAN UTARA	143.100.000	6		0
25	SULAWESI UTARA	4.570.423.000	27	1.732.454.000	2
26	SULAWESI TENGAH	1.002.790.000	24	17.246.026.376	124
27	SULAWESI SELATAN	18.995.345.035	152	6.673.157.635	108
28	SULAWESI TENGGARA	544.659.900	40	273.550.016	22
29	GORONTALO	1.647.710.000	12	910.832.000	9
30	SULAWESI BARAT	1.176.900.000	12	1.403.715.000	12
31	MALUKU	285.661.000	10	216.701.250	9
32	MALUKU UTARA	461.015.000	23	342.068.150	14
33	PAPUA BARAT	0	0	70.000.000	1
34	PAPUA	156.800.009	4	178.200.000	4
35	PAPUA TENGAH	0	0	0	0
36	PAPUA PEGUNUNGAN	0	0	0	0
37	PAPUA SELATAN	0	0	0	0
	Total	686.779.436.523	3.725	1.433.074.741.397	6.511

Merujuk pada tabel rekapitulasi NTE KTH di samping, pada tahun 2024 Provinsi Jawa Timur memperoleh Nilai Transaksi Ekonomi tertinggi nasional dengan omzet sebesar Rp624.529.390.335,00 dari 2.025 KTH. Pencapaian NTE yang tinggi tersebut tidak terlepas dari peran Penyuluh Kehutanan ASN sebanyak 270 orang dan 530 orang Penyuluh kehutanan swadaya masyarakat (PKSM) serta 71 orang Penyuluh Kehutanan Swasta. Penyuluh Kehutanan di Provinsi Jawa Timur memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk dapat melakukan pendataan nilai transaksi ekonomi kelompok binaan berkat dukungan dari Dinas Kehutanan Provinsi yang menjadikan NTE sebagai salah satu indikator kinerja penyuluh kehutanan. Hal tersebut perlu diterapkan pada seluruh provinsi lainnya sehingga pencatatan NTE secara nasional dapat lebih optimal.

Pada acara Rapat Koordinasi Nasional Penyuluh Kehutanan tanggal 10 November 2024, Bapak Menteri Kehutanan memberikan apresiasi terhadap 10 provinsi yang memperoleh NTE tertinggi. Pemberian apresiasi ini juga diharapkan dapat memacu semangat provinsi untuk terus memberikan pendampingan terhadap KTH sehingga dapat meningkatkan produktivitas kelompok.

Output dan Outcome

Output yang dihasilkan dari indikator kinerja ini adalah teridentifikasinya Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) yang mencapai angka sebesar Rp1,433 triliun. Nilai tersebut diperoleh melalui proses identifikasi yang rinci dan komprehensif, mencakup berbagai jenis produk yang dihasilkan oleh kelompok tani hutan. Produk-produk ini mencakup hasil hutan kayu, non-kayu, serta jasa lingkungan, yang menjadi cerminan dari potensi dan keberagaman ekonomi berbasis hutan di berbagai wilayah.

Teridentifikasinya NTE KTH ini tidak hanya berfungsi sebagai data statistik, tetapi juga memiliki implikasi strategis terhadap pencapaian outcome yang signifikan. Outcome yang diperoleh dari capaian ini adalah meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Dengan nilai NTE yang terukur dan terverifikasi, menunjukkan peran penting sektor kehutanan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Lebih dari itu, hasil ini juga memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan data NTE KTH yang terstruktur, berbagai program pengembangan ekonomi berbasis hutan dapat lebih mudah diarahkan untuk mendukung penguatan perekonomian lokal, penciptaan lapangan kerja, serta pelestarian fungsi ekologis hutan.

Efektivitas

Kinerja pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2023. Hal ini tercermin dari peningkatan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) yang berhasil diraih, yakni dari Rp 686 miliar di tahun 2023 menjadi Rp 1,433 triliun pada tahun 2024. Secara presentase kinerja, capaian kinerja maksimal dibatasi 150% sehingga capaian kinerja tahun 2023 dan 2024 sama-sama memperoleh presentase 150% sehingga capaian kinera dikategorikan efektif. Selain itu, peningkatan NTE ini juga diiringi dengan peningkatan partisipasi Kelompok Tani Hutan (KTH) dan penyuluh kehutanan dalam proses pendataan. Jumlah KTH yang berpartisipasi meningkat dari 3.725 KTH pada tahun 2023 menjadi 6.511 KTH pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pelibatan KTH, yang menjadi salah satu indikator keberhasilan program pembinaan dan pengembangan KTH.

Peningkatan kinerja yang signifikan ini didukung oleh beberapa faktor strategis, di antaranya:

1. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan (SIMLUH) yang mendukung dalam pengumpulan dan perhitungan data Nilai Transaksi Ekonomi KTH telah mempermudah proses pengumpulan dan perhitungan data Nilai Transaksi Ekonomi KTH. Teknologi ini memungkinkan Penyuluh Kehutanan dan instansi terkait untuk mengakses data dengan cepat dan akurat, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif.
2. Penginputan data NTE KTH binaan telah diintegrasikan sebagai kewajiban yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Penyuluh Kehutanan PNS penerima Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan. Kebijakan ini memberikan dorongan yang kuat untuk meningkatkan akurasi dan jumlah data yang terlapor.
3. Peran aktif pada beberapa Dinas Kehutanan/Dinas LHK Provinsi dalam mendorong upaya pengumpulan dan penginputan data NTE KTH pada provinsinya masing-masing
4. Kebijakan strategis dari Dinas Kehutanan/Dinas LHK Provinsi yang menetapkan NTE KTH sebagai indikator kinerja penyuluh kehutanan telah menjadi pendorong utama dalam pengumpulan data. Dengan menjadikan NTE sebagai salah satu parameter penilaian kinerja, penyuluh lebih termotivasi untuk aktif mendukung pendataan.

Efisiensi

Pencapaian kinerja NTE terhadap target sebesar 150% diperoleh dengan penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp4.700.670.484,00 dari pagu anggaran Rp5.323.607.000 (88,30%), sehingga berdasarkan hasil perhitungan, nilai efisiensi kinerja berada pada angka 0,59 dengan kategori efisien. Secara nyata, Badan P2SDM melakukan upaya-upaya efisiensi dalam pengelolaan NTE KTH seperti pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi dengan metode daring ataupun *hybrid*, serta penggunaan aplikasi SIMLUH untuk pengumpulan data omzet KTH secara *online* dan *real time*.

KENDALA DAN UPAYA TINDAK LANJUT

Kendala

Pencapaian kinerja yang baik pada indikator Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (NTE KTH) tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Beberapa kendala utama yang memengaruhi pencapaian ini antara lain:

1. Kurangnya Kesadaran Kelompok dalam Pembukuan. Banyak kelompok tani hutan yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya pembukuan sebagai alat pencatatan dan pengelolaan keuangan. Akibatnya, produk yang dihasilkan maupun diperjualbelikan sering kali tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga memengaruhi akurasi perhitungan NTE.
2. Keragaman Komoditas Usaha yang Belum Terakomodasi. Komoditas usaha KTH yang sangat beragam belum seluruhnya tercantum dalam panduan barang dan jasa komoditas NTE KTH. Hal ini menyebabkan beberapa jenis usaha kelompok belum dapat diukur secara maksimal dalam indikator kinerja ini.
3. Dukungan pemerintah daerah dalam pendataan NTE KTH masih belum merata. Belum semua pemerintah daerah memberikan perhatian dan fasilitasi yang memadai untuk mendukung pengumpulan data NTE secara terintegrasi dan berkelanjutan.
4. Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Belum Memadai. Keterbatasan jumlah penyuluh kehutanan berdampak pada pengumpulan data yang masih terbatas. Kondisi ini terlihat dari jumlah partisipasi 1.014 Penyuluh Kehutanan dari total 2.674 Penyuluh Kehutanan yang menginput NTE 6.511KTH dari total 26.300 KTH yang tersebar di seluruh Indonesia.

Upaya tindak Lanjut

Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut diantaranya:

1. Meningkatkan Kesadaran Kelompok dalam Pembukuan dengan mendorong partisipasi penyuluh kehutanan dalam memberikan pendampingan intensif kepada KTH terkait pencatatan keuangan dan pembukuan usaha serta menyediakan panduan pembukuan dalam format sederhana dan mudah dipahami oleh kelompok.
2. Meninjau kembali panduan barang dan jasa komoditas NTE KTH untuk memperbarui daftar komoditas yang relevan, mencakup keragaman usaha kelompok tani di berbagai daerah. Selain itu juga perlu diperinci jenis-jenis komoditas yang dapat mendukung program strategis nasional ketahanan pangan.
3. Mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam kolaborasi pengumpulan data NTE KTH serta mengadakan sosialisasi kepada pemerintah daerah tentang pentingnya pendataan NTE KTH dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal dan kontribusi terhadap PDB Nasional. Selanjutnya perlu secara rutin memberikan penghargaan/intensif bagi pemerintah daerah yang memiliki kontribusi tinggi terhadap pencapaian NTE KTH.
4. Mengoptimalkan jumlah dan peran Penyuluh Kehutanan ASN termasuk memberikan pelatihan khusus kepada penyuluh kehutanan terkait teknik pendataan NTE maupun peningkatan usaha masyarakat berdasarkan komoditas-komoditas unggulan. Selain itu juga perlu peningkatan kolaborasi Penyuluh ASN dengan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat maupun Penyuluh Kehutanan Swasta.

Success Story

Penyuluh kehutanan Sukses Mendampingi KTH Wonolestari

Peraih NTE KTH Tertinggi Tahun 2024

KTH Wonolestari Desa Burno, Kec. Senduro, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur

KTH Wonolestari terbentuk pada tahun 2006 dengan **Akte Notaris No.5/2006** dan Nomor Register KTH pada Pusat Penyuluhan :35/08/12/2005/KTH.075/2010 dengan luas areal kelola KHDP 940 ha. Saat ini KTH Wonolestari sudah menjadi KTH kelas utama. Komoditas usaha KTH Wonolestari sangat beragam diantaranya susu sapi, rumput pakan ternak, pisang mas kirana, kambing etawa, wisata air terjun Watusilo, dan produk olahan pangan.

Komoditas - komoditas usaha KTH yang sudah diinput ke dalam aplikasi SIMLUH sebagai Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) adalah susu sapi dan hijauan makan ternak (HMT).

Jumlah sapi perah yang dimiliki oleh anggota KTH Wonolestari sebanyak 1250 ekor, dengan 750 ekor yang memproduksi susu sebanyak 10 liter/ekor. Harga susu sapi Rp7500,00. Omzet yang dapat dicapai dari usaha susu sapi sebesar (750 ekor x 10 lt x 30 hari) x Rp7.500,00= Rp1.687.500.000,00/bulan. Untuk **omzet** 1 tahun sebesar Rp1.687.500.000,00 x 12 bulan= **Rp20.250.000.000,00/tahun.**

NTE KTH Wonolestari

Rp 33.793.200.000

Data SIMLUH per 31 Desember 2024

Untuk HMT ada rumput gajah/odot dan kaliandra. Luasan areal rumput gajah/odot 260 ha, dan kaliandra 385 ha. Kebutuhan pakan hijau untuk sapi 2 ikat/hari dengan harga Rp20.000,00/ikat. Kebutuhan HMT untuk 1.250 ekor sapi sebanyak 2 ikat x 1.250 = 2.500 ikat. Omzet yang dapat dicapai dari penjualan HMT = (2.500 ikat x Rp20.000,00) x 30 hari= Rp1.500.000.000,00/bulan. Sedangkan omzet 1 tahun sebesar Rp1.500.000.000,00 x 12 bulan = **Rp18.000.000.000,00/tahun.**

Kolaborasi Penyuluh Kehutanan PNS dan PKSM di Kab. Lumajang dalam pendampingan KTH/Masyarakat

Penyuluh Kehutanan merupakan ujung tombak pembangunan kehutanan di tingkat tapak. Untuk mencapai keberhasilan dalam pendampingan KTH/masyarakat diperlukan kolaborasi antara Penyuluh Kehutanan ASN dan PKSM.

Suprapto, SP, MMA Penyuluh Kehutanan PNS CDK Wilayah Lumajang

Suprapto merupakan Penyuluh Kehutanan PNS yang bertugas di CDK Wilayah Lumajang sejak 6 tahun lalu. Dedikasi Suprapto sudah tidak diragukan lagi. Wilayah kerjanya mencakup 2 kecamatan yaitu Senduro dan Pasrujambe. Saat ini KTH binaan yang aktif didampingi mencapai 20 KTH dan salah satunya adalah KTH Wonolestari.

Suprapto mempunyai kiat-kiat sukses dalam pendampingan KTH/masyarakat di wilayah kerjanya yaitu :

- Penyuluh Kehutanan harus memperkaya informasi terkait regulasi/kebijakan terbaru dan rajin mensosialisasikan kepada KTH binaan.
- Menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah (Kab/Kota dan provinsi) sebagai pengampu wilayah terkait pengelolaan kawasan.
- Melakukan identifikasi kebutuhan kegiatan pembangunan kehutanan di tingkat tapak di wilayah kerja, sehingga setiap daerah memiliki ciri khas tertentu dari komoditi usaha unggulannya.
- Melakukan pendekatan kepada masyarakat di wilayah kerja secara kontinyu dan persuasif sehingga tercipta hubungan baik.
- Melakukan pendekatan kepada masyarakat di wilayah kerja secara kontinyu dan persuasif sehingga tercipta hubungan baik.
- Melakukan pendekatan kepada masyarakat di wilayah kerja secara kontinyu dan persuasif sehingga tercipta hubungan baik.
- Pengembangan digitalisasi untuk pemarasan usaha kelompok di tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Edi Santoso/Edi Burno PKSM/Ketua KTH Wonolestari

Edi Santoso atau dikenal Edi Burno telah melakukan pendampingan KTH/Masyarakat sejak tahun 2005. Edi bercita-cita untuk mengubah pola pikir masyarakat yanag semula merambah hutan menjadi pelestari hutan. Kiat-kiat sukses edi dalam merubah pola pikir dan pemberdayaan masyarakat di Desa Burno dan sekitarnya adalah :

- Kerja ikhlas, kerja keras, dan kerja tuntas, jujur, diniatkan ibadan dan bermanfaat bagi semua orang.
- Memanfaatkan potensi SDA dengan sebaik mungkin.
- Pengelolaan SDM dalam perubahan pola pikir dengan kesabaran, keuletan, dan ketokohan (sangat efektif) sehingga mempunyai visi misi yang sama.
- Menyusun strategi dalam pemberdayaan masyarakat berupa program kerja yang tercantum dalar AD/ART KTH yang menciptakan alam lestari dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

IKP 2

Jumlah SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya

Pelaksana : Pusat Diklat SDM LHK,
Pusat Renbang SDM dan BPLHK

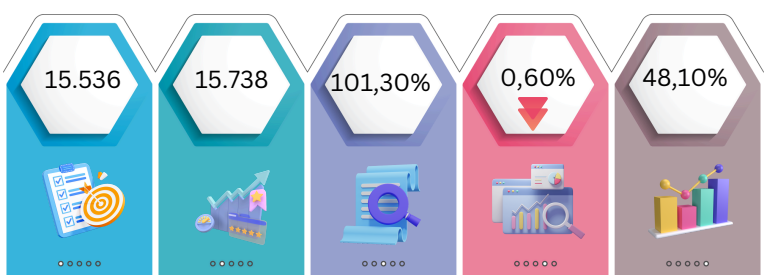

CAPAIAN KINERJA

SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya

Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu fondasi utama dalam menghadapi tantangan dan tuntutan pembangunan di sektor lingkungan hidup dan kehutanan (LHK). SDM yang berkualitas tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan mendalammengenai ilmu lingkungan dan kehutanan, tetapi juga harus menguasai keterampilanpraktis serta memiliki sikap dan perilaku yang mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat sektor LHK memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengembangan kompetensi juga merupakan hak setiap ASN yang harus difasilitasi oleh negara untuk menjamin tercapainya kualitas pelayanan publik yang unggul. Peningkatan kompetensi ini menjadi bagian dari investasi sumber daya manusia, yang tidak hanya memberikan dampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, tetapi juga memastikan SDM di sektor LHK memiliki kemampuan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan serta program strategis secaraefektif.

Selanjutnya, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan, program, serta inovasi di bidang LHK, diperlukan SDM yang berstandar tinggi, yang dibuktikan melaluisertifikasi kompetensi. hal ini penting guna memastikan terciptanya pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam lebih lanjut mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan daya saingbangsa, baik di tingkat nasional maupun global. Dengan penguasaan keahlian yang relevan dan pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu strategis di sektor LHK, SDM yang unggul menjadi aset penting bagi pencapaian agenda pembangunan LHK.

Peningkatan kompetensi SDM di sektor LHK ini diintervensi melaluiempat indikator kinerja kegiatan, yaitu Lulusan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Aparatur LHK, Lulusan Diklat Non-Aparatur LHK, Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi industri dan Wirausaha, serta Jumlah SDM LHK Bersertifikat Kompetensi. Sasaran dari kegiatan ini yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN), SDM Non Aparatur yang menjadi binaan Kementerian LHK, maupun masyarakatumum yang berkecimpung di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi SDM LHK yang meningkat kompetensinya sebanyak 15.738 orang atau sebesar 101.30% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2024 sebanyak 15.536 orang. Capain tersebut terdiri dari:

- Lulusan Diklat Aparatur LHK sebanyak 3.683 orang
- Lulusan Diklat Non Aparatur LHK sebanyak 2.507 orang
- Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha sebanyak 7.871 orang
- Jumlah SDM LHK bersertifikat kompetensi sebanyak 1.677 orang

Secara umum capaian kinerja sejak tahun 2020-2024 selalu melebihi target yang telah ditetapkan setiap tahunnya dalam perjanjian kinerja. Pelaksanaan pelatihan pada tahun 2024 lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan pada tahun 2024 Badan P2SDM melakukan penambahan intervensi anggaran yang berfokus pada peningkatan kompetensi khususnya pada pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha. Refocusing anggaran tersebut diharapkan dapat memperkecil gap pencapaian kinerja pada indikator kinerja program tersebut mengingat kegiatan tersebut menjadi salah satu dukungan pada Prioritas Nasional 3. Selain itu juga Badan P2SDM menghitung kinerja melalui mekanisme Kerjasama. Pelatihan dengan mekanisme kerjasama selalu dilakukan setiap tahunnya, namun baru sejak tahun 2023 Badan P2SDM memiliki inisiatif untuk mengkoordinir seluruh Satker yang menyelenggarakan pelatihan lingkup Badan P2SDM untuk mengintervensi anggaran Badan P2SDM pada pelatihan dengan mekanisme Kerjasama sehingga target yang ditetapkan pada perjanjian kinerjadapat meningkat secarasignifikan.

Sampai dengan Tahun 2024, realisasi pada IKP 2 telah mencapai 43.823 orang atau sebesar 48,10% dari target Renstra sebanyak 91.104 orang. Capaian terhadap target Renstra ini cukup rendah disebabkan penetapan target pada saat penyusunan Renstra yang mengakomodir pelaksanaan program kartu prakerja melalui 2 Indikator Kinerja Kegiatan yaitu “Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha” dan “Jumlah SDM LHK Bersertifikat Kompetensi” dengan target masing-masing IKK 35.000 orang. Pada pelaksanaannya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020, terdapat 12 Kementerian/Lembaga yang melaksanakan kartu prakerja dimana KLHK tidak termasuk di dalamnya sehingga dukungan anggaran tidak dapat teralokasikan sebagaimana mestinya.

Mengingatrendahnya capaian tersebut, Badan P2SDM mendorong/melakukan intervensi pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi melalui mekanisme kerjasama dengan Eselon I KLHK dan Pemerintahan Daerah, optimalisasi pelatihan menggunakan metode e-learning, dan mengembangkan metode pelatihan Massive Open Online Courses (MOOC). Pelatihan dengan metode MOOC ini terbukti dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan pelatihan berbasis MOOC terhadap 509 orang dengan biaya yang sangat rendah. Pengembangan metode MOOC ini ditindaklanjuti dengan menjadi salah satu Indikator Kinerja Kegiatan pada penyusunan Renstra Tahun 2025-2029.

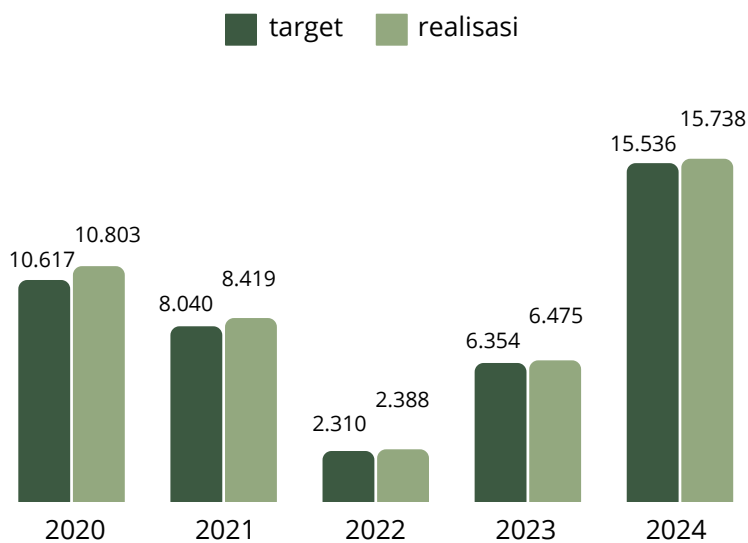

Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan

Peningkatan kapasitas SDM dilaksanakan melalui Pelatihan Aparatur SDM LHK, Pelatihan Non Aparatur SDM LHK dan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha. Pelatihan adalah proses terencana yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan lebih efektif. Dalam konteks pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pelatihan tidak hanya menjadi alat untuk memperkuat kompetensi teknis, tetapi juga membangun karakter dan perilaku yang mendukung tercapainya tujuan organisasi. Di sektor lingkungan hidup dan kehutanan (LHK), pelatihan memiliki peran strategis. Melalui program pelatihan, peserta dibekali kemampuan teknis dan praktis yang relevan dengan tantangan lapangan, seperti pengelolaan sumber daya alam, mitigasi perubahan iklim, teknologi konservasi, hingga penguatan kapasitas kelembagaan. Pelatihan ini juga menjadi wadah untuk memperkenalkan inovasi terbaru yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, sekaligus mendorong adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Manfaat dari pelatihan ini sangat nyata, baik bagi individu maupun organisasi. Bagi individu, pelatihan membuka peluang untuk pengembangan karier, meningkatkan rasa percaya diri, dan memperluas wawasan. Sementara bagi organisasi, pelatihan mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Guna memastikan jenis-jenis pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan maka Badan P2SDM setiap tahunnya melaksanakan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dengan menyasar unit-unit yang menerima pelayanan pelatihan maupun masyarakat. Pada saat ini Badan P2SDM sedang menyusun Analisi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi atau roadmap pengembangan kompetensi. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan arah pengembangan SDM yang lebih komprehensif sesuai dengan kebutuhan organisasi KLHK.

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan oleh Pusat Diklat SDM LHK serta 7 Balai Pelatihan LHK lingkup Badan P2SDM baik secara tatapmuka, blended learning maupun full e-learning dengan peserta dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Rincian pelaksanaan pelatihan sebagaimana lampiran 2.

Satker Pelaksana	Lulusan Diklat Aparatur LHK	Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha	Total Lulusan Pelatihan
Pusat Diklat SDM LHK	1.764	926	320	3.010
BPLHK Pematangsiantar	60	160	1.120	1.340
BPLHK Pekanbaru	140	204	1.080	1.424
BPLHK Bogor	60	200	1.060	1.320
BPLHK Kadipaten	1.119	201	1.040	2.360
BPLHK Samarinda	186	447	1.091	1.724
BPLHK Makassar	294	120	1.080	1.494
BPLHK Kupang	60	249	1.080	1.389
Total	3.683	2.507	7.871	14.061

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Badan P2SDM) memiliki peran strategis dalam mendorong pencapaian kinerja Eselon I teknis di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Salah satu kontribusi utama yang diberikan adalah melalui penyelenggaraan pelatihan yang dirancang secara spesifik untuk mendukung kebutuhan kompetensi aparatur dan non-aparatur di masing-masing unit kerja teknis. Selama pelaksanaan program di tahun 2024, Badan P2SDM telah berhasil meluluskan sebanyak 14.061 orang melalui penyelenggaraan berbagai jenis pelatihan.

Pelatihan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan strategis dari setiap Eselon I lingkup KLHK, mulai dari peningkatan kapasitas teknis hingga penguatan soft skills, dengan tujuan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing unit kerja. Capaian ini menggambarkan komitmen Badan P2SDM dalam memastikan tersedianya SDM yang berkompeten, yang tidak hanya mampu mendukung pelaksanaan kebijakan di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan

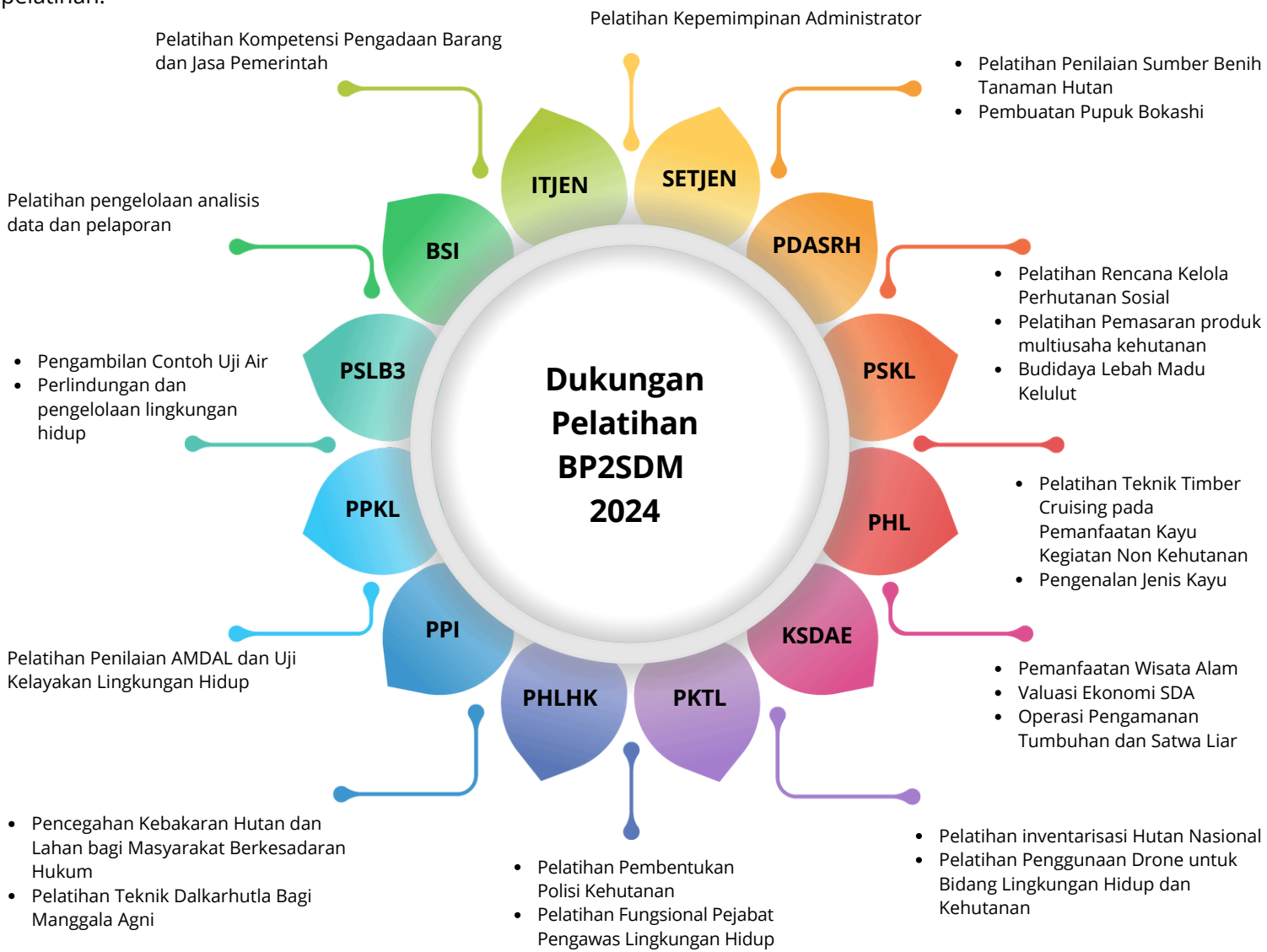

SERTIFIKASI DAN UJI KOMPETENSI SDM LHK

Sertifikasi Kompetensi SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) merupakan bentuk pengakuan resmi terhadap individu yang telah memenuhi standar kompetensi tertentu, mencakup pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap kerja (attitude). Sertifikasi ini menjadi landasan sekaligus jaminan bahwa seseorang layak dan pantas menduduki jabatan atau melaksanakan tugas pada bidang tertentu sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

Sebagai salah satu instrumen pengembangan SDM, sertifikasi kompetensi berperan penting dalam memastikan bahwa pembangunan di sektor kehutanan dan lingkungan hidup dilakukan oleh tenaga kerja yang kompeten, profesional, dan memiliki kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini mencakup kemampuan teknis, pemahaman terhadap kebijakan, serta keahlian praktis yang relevan untuk menghadapi tantangan dan dinamika di sektor ini. Dengan demikian, sertifikasi kompetensi dapat menjamin bahwa pelaksanaan tugas di bidang kehutanan tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Badan P2SDM), melalui Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM, memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi SDM LHK. Penyelenggaraan sertifikasi dilakukan secara sistematis dan berbasis standar yang berlaku untuk memastikan bahwa setiap individu yang lulus sertifikasi memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan sektor LHK. Dengan adanya sertifikasi kompetensi, sektor LHK dapat meminimalkan risiko ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembangunan dan memastikan bahwa setiap program, kebijakan, dan kegiatan di bidang kehutanan dikelola oleh SDM yang memiliki kualitas dan kapasitas yang teruji.

Pada Tahun 2024 telah dilakukan uji kompetensi terhadap 1.884 orang. Adapun jumlah SDM yang dinyatakan kompeten melalui kegiatan tersebut sebanyak 1.677 orang yang terdiri dari 1.250 SDM Aparatur LHK dan 427 SDM Non Aparatur LHK. Rincian jumlah SDM LHK yang dinyatakan kompeten sebagaimana berikut.

SDM Aparatur

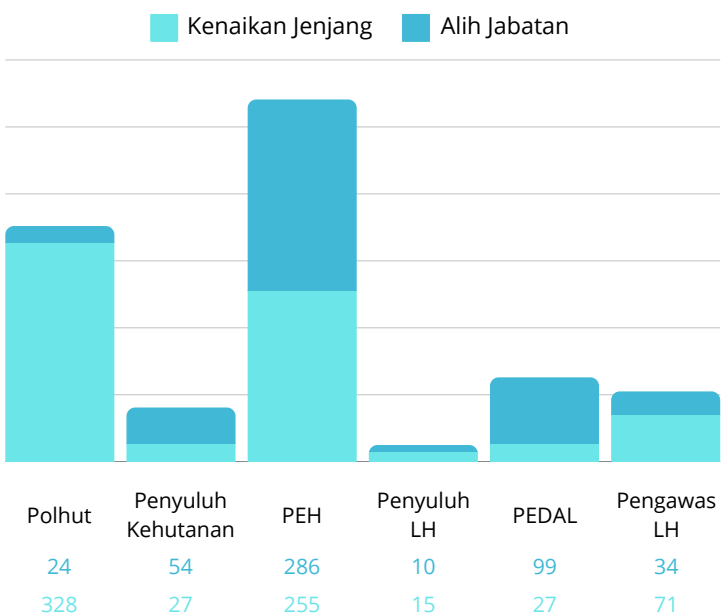

SDM Non Aparatur

No	Jenis Jabatan	Realisasi
1	ANGGOTA TIM PENYUSUN AMDAL	34
2	GANISPH PEMANENAN HASIL HUTAN	9
3	GANISPH PEMANFAATAN HHBK MINYAK	42
4	GANISPH PEMANFAATAN HHBK BATANG	37
5	GANISPH PEMANFAATAN HHBK GETAH	34
6	GANISPH PEMBINAAN HUTAN	38
7	GANISPH PENGUJIAN KAYU BULAT	75
8	GANISPH PENGUJIAN KAYU GERGAJIAN	3
9	GANISPH PENGUJIAN KAYU LAPIS	1
10	GANISPH PENGUKURAN DAN PERPETAAN HUTAN	11
11	GANISPH PERENCANAAN HUTAN	22
12	GANISPH PERENCANAAN WISATA ALAM	15
13	KETUA TIM PENYUSUN AMDAL	15
14	PELAKSANA PERAWATAN AC RESIDENSIAL	20
15	PENANGGUNGJAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR	55
16	PENGUJI PENYUSUN AMDAL	10
17	PETUGAS PENGAMBIL CONTOH UJI AIR	6
	Total	427

Output dan Outcome

Output yang dihasilkan dari indikator kinerja ini adalah Meningkatnya kompetensi SDM LHK sebanyak 14.061 orang dan tersertifikasinnya sebanyak 1.677 orang pejabat fungsional. Meningkatnya kompetensi dan sertifikasi SDM LHK memiliki outcome memastikan bahwa SDM LHK yang kompeten mampu menjalankan tanggung jawab dengan lebih efisien dan berkualitas, baik dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, konservasi, maupun pengelolaan sumber daya kehutanan. Selain itu, peningkatan kompetensi juga memperkuat kapasitas SDM dalam merespons tantangan yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, degradasi hutan, dan konflik pemanfaatan sumber daya alam. SDM yang kompeten memiliki kemampuan untuk memberikan solusi inovatif dan strategis dalam menghadapi persoalan tersebut. Disisi lain, Sertifikasi kompetensi menjadi jaminan bahwa SDM yang terlibat telah memenuhi standar yang dibutuhkan, sehingga pembangunan sektor LHK dikelola secara profesional, akuntabel, dan transparan. Selain itu, sertifikasi meningkatkan daya saing SDM di tingkat nasional dan global, mendukung pelestarian lingkungan, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan secara berkelanjutan. Kombinasi ini memperkuat kontribusi SDM dalam mencapai keberlanjutan sektor LHK.

Efektivitas

Kinerja pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2023. Hal ini tercermin dari peningkatan capaian Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya dari 6.475 orang di tahun 2023 menjadi 15.738 orang pada tahun 2024.

Pencapaian kinerja ini didukung oleh beberapa faktor strategis, di antaranya:

- Pelaksanaan pelatihan telah menyesuaikan dengan keadaan pasca pandemi *Covid-19* sehingga metode pembelajaran tidak hanya pelatihan jarak jauh *(E-Learning)* dengan memanfaatkan LMS pada Pusat Diklat SDM LHK namun juga *blended learning* dan klasikal.
- Ketersediaan sumber daya manusia baik widyaiswara, pengelola dan penyelenggara pelatihan terutama ketersediaan admin dan Sub Admin yang sudah cukup merata di Pusat Diklat SDM LHK dan BPLHK.
- Adanya Lembaga Sertifikasi Profesi LUK SDM Aparatur LHK yang terlisensi oleh BNSP disertai assesor kompetensi yang bersertifikat dengan jumlah yang memadai
- Adanya kerjasama yang baik dengan Eselon I lingkup KLHK maupun dinas yang menangani bidang lingkungan hidup dan kehutanan sehingga pelaksanaan uji kompetensi dapat berjalan dengan optimal dan melebihi target yang ditetapkan.
- Telah terselenggaranya Pelatihan yang menggunakan metode MOOC (Massive Online Open Courses) yang merupakan program pelatihan yang dirancang dengan standar kompetensi, waktu yang fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan peserta lingkup KLHK.

Efisiensi

Pencapaian kinerja SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya terhadap target sebesar 101,30% diperoleh dengan penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp39.060.590.203,00 dari pagu anggaran Rp39.904.942.000 (97,88%), sehingga berdasarkan hasil perhitungan, nilai efisiensi kinerja berada pada angka 0,97 dengan kategori efisien. Secara nyata, Badan P2SDM melakukan upaya-upaya efisiensi dalam peningkatan kompetensi SDM dengan melaksanakan pelatihan menggunakan metode blended learning dan full e-learning, lebih jauh Badan P2SDM sedang mengembangkan metode *Massive Open Online Courses (MOOC)* pada Pelatihan Pengarusutamaan Gender. Selanjutnya metode tersebut akan dikembangkan untuk jenis-jenis pelatihan lainnya pada Tahun Anggaran 2025.

KENDALA DAN UPAYA TINDAK LANJUT

Kendala

Pencapaian kinerja yang baik pada indikator Nilai SDM LHK yang meningkat kompetensinya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Beberapa kendala utama yang memengaruhi pencapaian ini antara lain:

1. Badan P2SDM belum dapat memfasilitasi kebutuhan pelatihan ASN di lingkup KLHK baik dari segi kuantitas peserta maupun dari jenis-jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh unit Eselon I Teknis.
2. Jumlah usulan calon peserta uji kompetensi setiap tahunnya melebihi kemampuan anggaran yang tersedia.
3. Daftar calon peserta uji kompetensi yang disampaikan Eselon I Teknis lingkup KLHK terlambat untuk diverifikasi oleh Biro Kepegawaian.
4. Adanya perubahan peserta uji (mundur) secara mendadak pada saat pelaksanaan uji, sehingga tidak bisa digantikan oleh peserta lain yang telah memenuhi persyaratan uji namun belum mendapat kesempatan karena keterbatasan kuota peserta.
5. Belum stabilnya penggunaan *LMS E-Learning* KLHK agar dapat memberikan akses yang lebih luas untuk penerimaan peserta pelatihan dalam jumlah tanpa batas.

Upaya tindak Lanjut

Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut diantaranya:

1. Meningkatkan koordinasi lingkup Badan P2SDM maupun mitra (Eselon I KLHK, Kementerian Lain, dan pemerintah daerah) untuk memfasilitasi pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi serta menyusun dokumen roadmap pengembangan SDM LHK dengan melibatkan seluruh stakeholder.
2. Badan P2SDM perluberkoordinasi dengan Biro Kepegawaian untuk percepatan verifikasi calon peserta uji kompetensi.
3. Melakukan koordinasi/konfirmasi dengan unit kerjaasalpeserta untuk memastikan kesediaan dan persyaratan peserta untuk mengikuti uji kompetensi.
4. Mengembangkan pelatihan – pelatihan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan fleksibel sesuai kebutuhan peserta tidak hanya lingkup KLHK namun juga dapat menjangkau lintas instansi dan masyarakat.
5. Optimalisasi pelatihan dengan metode Massive Open Online Courses (MOOC) untuk pelatihan bidang lingkungan Hidup Dan Kehutanan disamping metode distance learning dan blended learning dengan mempedomani Panduan Pelatihan Metode MOOC yang telah disusun oleh Pusat Diklat SDM LHK supay efisiensi capaian kinerja lebih optimal untuk pencapaian target renstra 2025 -2029.

Success Story

IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN SIG BERBASIS PONSEL

Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta dapat menggunakan receiver GPS pada ponsel dan membuat peta dengan aplikasi SIG bebas dan terbuka.

Nanang Khuzaenun Arif, A.Md.

Penyuluh Kehutanan pada UPTD KPH Bali Utara - Dinas Kehutan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali

Amran Hakim Dewangga, S.T.

Fungsional Surveyor Pemetaan Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB.

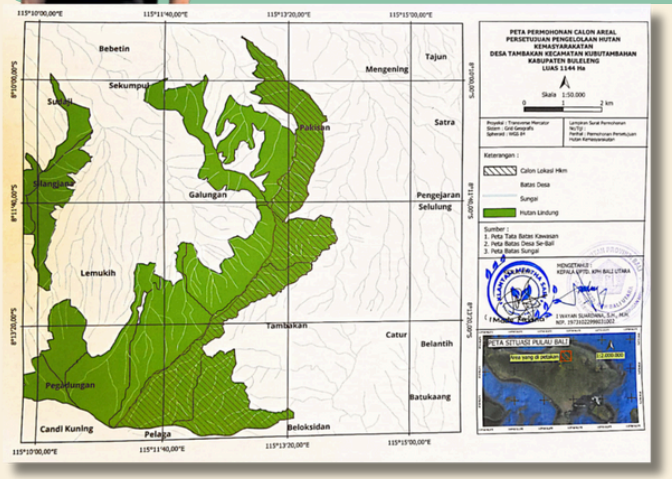

Setelah mengikuti Pelatihan SIG Berbasis Ponsel dapat membuat lampiran Berita Acara Audit Kepatuhan Realisasi Penebangan pada areal Persetujuan Penggunaan Kawasan berupa Peta Audit Kepatuhan Realisasi Penebangan pada areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan a.n. PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

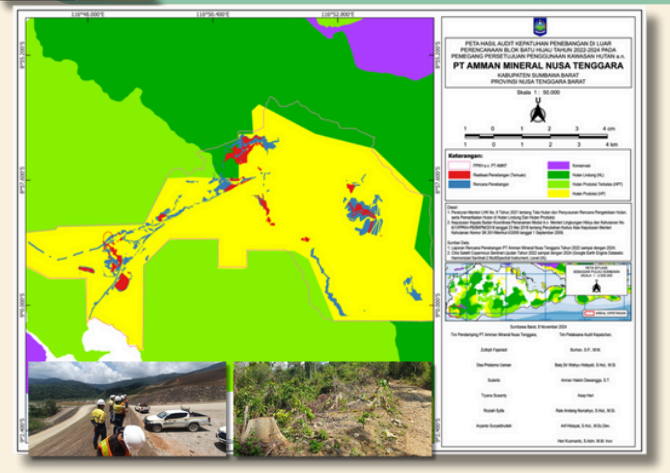

Setelah mengikuti Pelatihan SIG Berbasis Ponsel dapat membuat Peta Calon Areal HKM Klantam Mertha Sari. Peta HKm adalah peta batas areal pengelolaan untuk Perhutanan Sosial yang diijinkan untuk dikelola oleh KTH Mertha Sari. Dengan adanya peta ini maka legalitas pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat menjadi semakin kuat dan KPH Bali Utara yang menjadi pembina daripada KTH Mertha Sari juga bisa semakin terbantu.

Pemadaman kebakaran lahan oleh siswa SMK Kehutanan Negeri

IKP 3

Jumlah Lulusan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat

Pelaksana : Pusat Diklat SDM LHK dan SMK Kehutanan Negeri

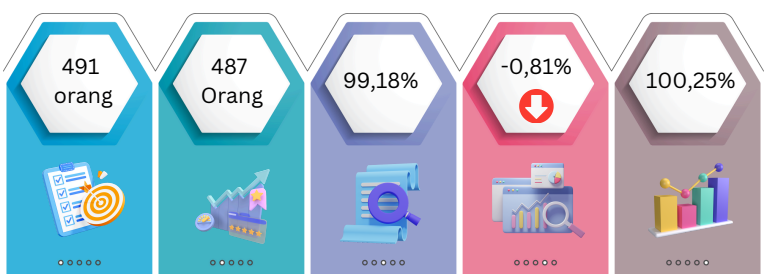

Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan

Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Negeri bertujuan untuk mencetak tenaga teknis menengah kehutanan yang tidak hanya sehat secara fisik dan mental, tetapi juga memiliki kecakapan ilmu, kreativitas dan kemandirian. lulusannya diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan kehutanan di lapangan untuk mendukung upaya pelestarian hutan demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, lulusan SMK Kehutanan Negeri juga diproyeksikan memiliki daya saing yang tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menjawab kebutuhan sektor kehutanan yang dinamis dan penuh tantangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kurikulum SMK Kehutanan Negeri dirancang secara komprehensif, mencakup pembelajaran di kelas, praktek lapangan, serta program magang. Pendekatan ini bertujuan untuk membekali para siswa dengan kompetensi teknis, keterampilan kerja, dan daya saing yang unggul agar mereka siap berkontribusi di tingkat tapak, baik dalam mendukung operasional pengelolaan hutan maupun memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor kehutanan secara luas.

Badan P2SDM memiliki lima SMK Kehutanan Negeri yang tersebar di berbagai wilayah strategis untuk menjangkau pelayanan pada setiap provinsi di Indonesia, yaitu Pekanbaru, Kadipaten, Samarinda, Makassar, dan Manokwari. Dengan total siswa sebanyak 1.483 orang pada tahun ajaran 2024/2025, SMK Kehutanan Negeri berperan sebagai *model school* yang memiliki berbagai keunggulan. Keunggulan ini menjadikan SMK Kehutanan Negeri sebagai pelopor sekaligus rujukan bagi sekolah kejuruan kehutanan lainnya dalam menerapkan praktik pendidikan yang berkualitas.

Pada tahun 2024, Badan P2SDM berhasil meluluskan sebanyak 487 siswa SMK Kehutanan Negeri dari target 491 siswa, mencapai tingkat kelulusan sebesar 99,18%. Meskipun capaian ini cukup tinggi, terdapat sedikit penurunan dibandingkan tahun 2023, di mana tingkat kelulusan mencapai 100,00% dengan seluruh siswa yang memenuhi persyaratan kelulusan. Penurunan ini disebabkan oleh adanya 4 siswa dari SMK Kehutanan Negeri Manokwari yang tidak memenuhi persyaratan kelulusan pada tahun 2024. Berdasarkan jenis kelamin, sebaran lulusan laki-laki mendominasi dengan total sebanyak 364 orang (74,74%) dibandingkan dengan lulusan perempuan sebanyak 121 orang (25,26%). Dominasi proporsi laki-laki ini juga disebabkan faktor sarana prasarana yang tersedia terutama asrama. Sebaran lulusan berdasarkan jenis kelamin pada setiap SMK Kehutanan Negeri sebagaimana data berikut.

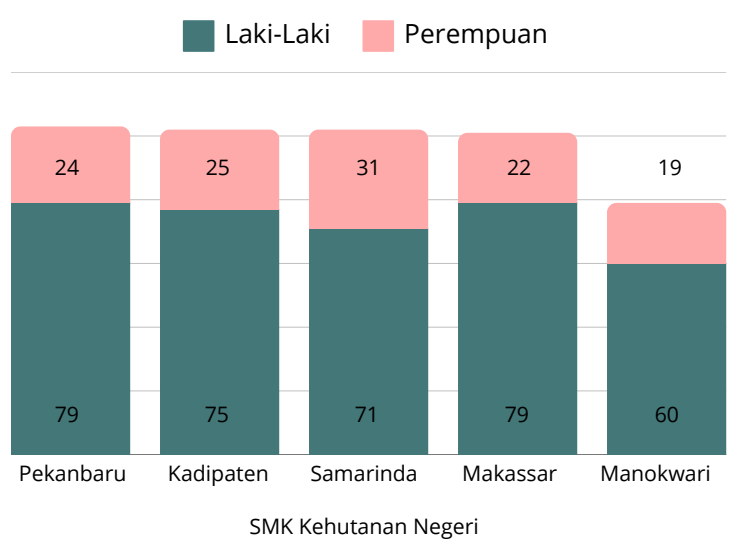

Di SMK Kehutanan Negeri, terdapat empat paket kompetensi utama yang dirancang secara spesifik untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan siswa guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di sektor kehutanan. Setiap paket kompetensi ini ditargetkan untuk membekali siswa dengan keahlian teknis yang relevan, inovatif, dan siap pakai di berbagai bidang pengelolaan hutan. Adapun keempat paket kompetensi tersebut adalah:

- Teknik Produksi Hasil Hutan (TPHH): Kompetensi Penguji dan Pengukur Kayu Bundar
- Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (TIPH): Kompetensi Pembuatan Peta hasil Pengolahan GPS
- Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (TRRH): Kompetensi Pembuat bibit generatif
- Teknik Konservasi Sumber Daya Hutan (TKSH): Kompetensi Pemandu Wisata Alam

Guna mendukung pengembangan kompetensi di atas, siswa SMK Kehutanan Negeri diwajibkan mengikuti program Praktek Kerja Lapangan (PKL) di berbagai institusi dan organisasi yang relevan. PKL ini dilaksanakan di perusahaan kehutanan swasta, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Taman Nasional, Taman Hutan Raya (Tahura), dan lembaga kehutanan lainnya. Melalui pengalaman langsung di lapangan, siswa dapat mengaplikasikan keterampilan yang telah dipelajari di kelas sekaligus memahami tantangan nyata yang dihadapi di bidang kehutanan.

Setiap Tahunnya Badan P2SDM dapat meluluskan siswa SMK Kehutanan Negeri sebanyak 466-487 orang sehingga secara kumulatif, dalam periode tahun 2020 hingga 2024, Badan P2SDM telah meluluskan 2.370 siswa SMK Kehutanan Negeri. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020–2024 sebesar 2.364 orang, dengan pencapaian sebesar 100,25%. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kinerja jangka menengah Badan P2SDM dalam penyediaan tenaga teknis menengah kehutanan telah melampaui ekspektasi.

Keberhasilan melampaui target Renstra 2020–2024 mencerminkan komitmen Badan P2SDM dalam memastikan keberlanjutan tenaga kerja kehutanan yang kompeten. Kedepan, evaluasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penurunan kelulusan pada tahun tertentu perlu dijadikan bahan perbaikan untuk menjaga kinerja yang konsisten. Selain itu, untuk lebih meningkatkan daya saing lulusan SMK Kehutanan Negeri di dunia usaha dan dunia industri (DUDI), penguatan kompetensi siswa perlu dilakukan melalui pemberian sertifikasi keahlian di bidang-bidang strategis. Sertifikasi ini dapat menjadi nilai tambah bagi lulusan dalam menghadapi pasar tenaga kerja, sekaligus memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi standar yang diakui secara nasional maupun internasional.

Lokasi SMKKN	TPHH	TIPH	TRRH	TKSH	Total
Pekanbaru	25	35	33	0	103
Kadipaten	25	25	26	26	102
Samarinda	35	0	67	0	102
Makassar	0	34	34	33	101
Manokwari	52	0	0	27	79
Total	147	94	160	86	487

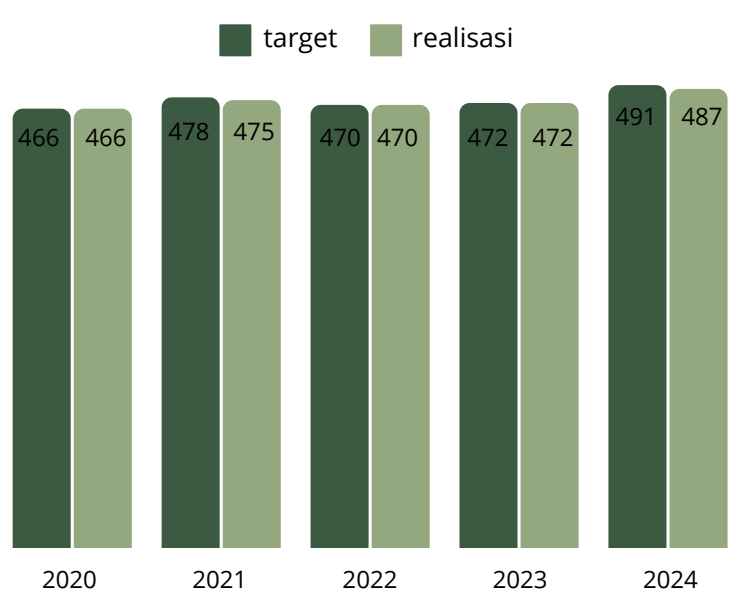

PKL KELAS 3

SMKKN MENCETAK TENAGA PROFESIONAL

Untuk memberikan wawasan kepada peserta didik terutama kelas XII mengenai pengelolaan hutan, maka diberikan materi praktek sesuai tuntutan perusahaan. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi siswa-siswi kelas 3 dilaksanakan di KPH Perum Perhutani dengan materi meliputi pengelolaan hutan jati, pengelolaan hutan wisata, pengolahan getah gondorukem dan terpentin, persemaian, penatausahaan kayu, pengamanan dan perlindungan hutan. Untuk jurusan Teknik Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan dilaksanakan di BPDAS & HL dengan materi agroforestry, konservasi tanah dan air, perbenihan, pembibitan, penanaman, kultur jaringan. Program PKL ini dirancang untuk menyiapkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan mampu mengembangkan sikap profesional dalam bekerja.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BADAN P2SDM

KEGIATAN BELAJAR SMKKN

Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggung jawab untuk menyiapkan tenaga teknis menengah kehutanan yang profesional, berakhlak mulia dan siap memasuki bursa kerja di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMK Kehutanan Negeri mengacu pada perkembangan kurikulum secara nasional, yaitu dengan menerapkan kurikulum 2013 Revisi untuk kelas XII dan XI dengan penjurusan Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Teknik Produksi Hasil Hutan. Untuk Kelas X menerapkan Kurikulum Merdeka Tahun 2022 yang lebih simple, intens, bebas, leluasa, relevan dan interaktif. Kurikulum SMK Kehutanan meliputi mata pelajaran dasar umum, dasar kejuruan dan kejuruan.

Output dan Outcome

Output yang dihasilkan dari indikator kinerja ini adalah tersedianya sebanyak 472 orang tenaga menengah kejuruan kehutanan Negeri yang siap bekerja di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Outcome yang dihasilkan dari indikator kinerja ini yaitu Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang dihasilkan SMK Kehutanan Negeri dapat berperan strategis dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan di tingkat tapak. Lulusan ini memiliki kompetensi teknis di bidang inventarisasi hutan, pengelolaan hasil hutan, rehabilitasi lahan, dan konservasi, sehingga mampu memenuhi kebutuhan SDM di sektor kehutanan, baik dalam program nasional seperti RHL dan perhutanan sosial, maupun di dunia usaha. Keberadaan mereka meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya hutan, mendukung pelestarian lingkungan, dan membangun kesadaran konservasi di masyarakat. Dengan terserapnya lulusan di berbagai sektor, tenaga teknis ini tidak hanya membantu menurunkan angka pengangguran, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem hutan.

Efektivitas

Pencapaian Kinerja pada tahun 2024 yang sebesar 99,18% menurun dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 yang sebesar 100%. Berdasarkan hasil perhitungan, maka nilai efektivitas sebesar 0,99 dan berada pada kategori belum efektif. Menindaklanjuti hal tersebut, maka perlu dilakukan pembinaan lebih intensif pada siswa SMK Kehutanan Negeri agar dapat memenuhi persayaratan kelulusan baik dari segi akademis dan kompetensi serta perilaku dan karakter.

Salah satu upaya peningkatan kinerja lainnya yang akan dilaksanakan oleh Badan P2SDM kedepan dalam penyediaan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yaitu mengupayakan pelaksanaan pengabdian alumni lulusan SMK Kehutanan Negeri melalui magang di instansi KLHK. Hal ini bertujuan agar siswa memiliki keterampilan dan pengalaman siswa dalam bekerja dan meningkatkan jejaring kerja. Selain itu adanya peningkatan fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran melalui dana SBSN pada SMKKN Pekanbaru dan SMKKN Manokwari.

Pencapaian kinerja yang cukup baik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung diantaranya:

1. Tersedianya tenaga pendidik yang kompeten, sarana dan prasarana pembelajaran siswa yang memadai termasuk Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus melalui sinergitas dengan Balai pelatihan LHK
2. Ketersediaan anggaran yang memadai
3. kontinuitas pembinaan teknis terhadap 5 SMK Kehutanan Negeri dan 32 SMK yang memiliki jurusan kehutanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bentuk pembinaan yang dilakukan meliputi supervisi dan monitoring, webinar pengembangan kapasitas guru, pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, kegiatan pembelajaran, kerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri di bidang kehutanan serta sertifikasi kompetensi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan

Efisiensi

Pencapaian kinerja Jumlah Lulusan SMK Kehutanan yang Kompeten dan bersertifikat terhadap target sebesar 99,18% diperoleh dengan penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp54.603.738.001,00 dari pagu anggaran Rp61.933.714.000,00 (88,16%), sehingga berdasarkan hasil perhitungan, nilai efisiensi kinerja berada pada angka 0,89 dengan kategori efisien. Secara nyata, Badan P2SDM melakukan upaya-upaya efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan seperti memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada seperti KHDTK untuk berbagai kegiatan pembelajaran yang beragam sekaligus memberikan pengalaman belajar yang lebih aplikatif kepada siswa. Hal ini mengurangi kebutuhan anggaran perjalanan untuk pembelajaran di lokasi lainnya.

KENDALA DAN UPAYA TINDAK LANJUT

Kendala

Pencapaian kinerja yang baik pada indikator Jumlah Lulusan SMK Kehutanan yang Kompeten dan bersertifikat tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Beberapa kendala utama yang memengaruhi pencapaian ini antara lain:

1. Adanya peserta didik SMK Kehutanan Negeri yang mengundurkan diri selama proses pembelajaran, yang tentu berdampak pada jumlah lulusan yang tidak mencapai target. Faktor ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat upaya pembinaan, motivasi, dan dukungan bagi siswa agar tetap semangat menyelesaikan pendidikan mereka, serta menyediakan program konseling atau bimbingan yang lebih intensif untuk mengurangi angka putus sekolah.
2. Penyerapan lulusan SMK Kehutanan Negeri di dunia usaha dan dunia industri masih belum optimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah pilihan sebagian besar siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dengan angka yang cukup signifikan, yaitu sekitar 30-40% lulusan setiap tahunnya. Meskipun hal ini mencerminkan peningkatan minat terhadap pendidikan tinggi, hal ini juga berimplikasi pada berkurangnya jumlah lulusan yang langsung dapat terserap dalam dunia kerja di sektor kehutanan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kerjasama dengan sektor dunia usaha dan dunia industri guna memastikan bahwa lulusan memiliki jalur karir yang jelas, serta meningkatkan relevansi kurikulum yang menggabungkan keterampilan praktis dengan kemampuan akademik untuk mempersiapkan mereka di berbagai jenis pekerjaan, baik di lapangan maupun di sektor yang lebih luas.

Upaya tindak Lanjut

Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut diantaranya:

1. Melakukan reviu mekanisme PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), termasuk evaluasi kuota jalur khusus, sanksi terhadap siswa yang mengundurkan diri, dan penyempurnaan persyaratan penerimaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses seleksi lebih selektif dan efisien dalam mengidentifikasi siswa yang memiliki komitmen kuat untuk menyelesaikan pendidikan di SMK Kehutanan Negeri.
2. Revisi Peraturan Menteri LHK Nomor 42 Tahun 2015 guna mengakomodasi perkembangan terbaru dalam sistem pendidikan kehutanan, termasuk penyesuaian dengan kebutuhan industri dan perubahan dalam kebijakan pendidikan. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat dasar hukum yang mendukung pendidikan vokasi di sektor kehutanan dan mempermudah implementasi kebijakan yang lebih relevan dengan tuntutan pasar kerja.
3. Menyusun profil lulusan SMK, yang berfokus pada keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Profil ini akan menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum yang lebih adaptif dan berbasis pada standar kompetensi yang dibutuhkan oleh industri, serta mengoptimalkan daya saing lulusan di pasar kerja.
4. Mendorong peluang magang di UPT lingkup KLHK selama 1 tahun untuk lulusan SMK Kehutanan Negeri. Program magang ini akan memberikan pengalaman langsung di lapangan, meningkatkan keterampilan praktis, serta membuka peluang kerja di instansi pemerintah atau sektor kehutanan lainnya. Magang juga dapat menjadi jembatan antara pendidikan dan dunia industri, meningkatkan penyerapan lulusan di pasar kerja.

Success Story

M. Emir Hasan
Sang Polisi Kehutanan Penuh Dedikasi

Panggilan akrabnya Emir. Terlahir dari keluarga sederhana dan ekonomi menengah ke bawah. Kondisi keluarga mengajarkan untuk hidup sederhana dan seadanya. Namun dorongan memperbaiki kehidupan keluarga membuatnya memiliki cita-cita yang tinggi. Selalu ada jalan untuk yang mau berubah. Informasi sekolah "gratis" sampai di telinganya, maka tak berpikir dua kali untuk mendaftarkan diri ke SMK Kehutanan Negeri Kadipaten ini dan lolos seleksi. Selama bersekolah selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran, mengikuti organisasi, maupun ekstrakurikuler. Berkat tekad dan ambisi untuk maju dan berkembang, atas kepercayaan teman-teman Emir didaulat menjadi Ketua OSIS periode 2019/2020. Selama menjalankan tugas tersebut dia belajar untuk terus bisa berinovasi, mengembangkan pola pikir, dan dituntut untuk lebih kreatif. Diiringi doa, usaha, serta dukungan keluarga dan teman-teman. Emir mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS 2021. Dengan penuh syukur dan rasa bahagia menyambut pengumuman hasil seleksi CPNS yang menyatakan lolos sebagai Polisi Kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

Pelajaran yang diterima di sekolah, baik itu akademis ataupun nilai-nilai lainnya sangat melekat di diri Emir. Tekad kuat, keinginan berekspresi, berinovasi, serta rasa peduli pun masih selalu diterapkan di lingkungan pekerjaan. Emir menulis sebuah buku yang dipergunakan sebagai panduan untuk kegiatan patroli pencegahan kebakaran hutan. Buku tersebut dapat membantu petugas dalam melaksanakan tupoksinya menjaga kelestarian, keamanan, dan kenyamanan masyarakat luas. Sebagai Polisi Kehutanan, Emir memiliki tugas yang cukup berat, yaitu menjaga keamanan hutan konservasi agar tetap lestari, merangkul dan menyadarkanpahamkan masyarakat akan pentingnya keberadaan hutan, melakukan koordinasi dengan perangkat desa, pengendalian kebakaran hutan. Semua tugas tersebut dilakukan dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab. Tak terasa saat ini sudah terhitung satu tahun mengabdikan diri sebagai Polhut untuk menjaga kelestarian hutan.

Pemanfaatan KHDTK sebagai tempat praktek pengukuran karbon dan penyusunan DRAM

IKP 4

Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan

Pelaksana : Pusat Diklat SDM LHK, dan Balai Pelatihan LHK

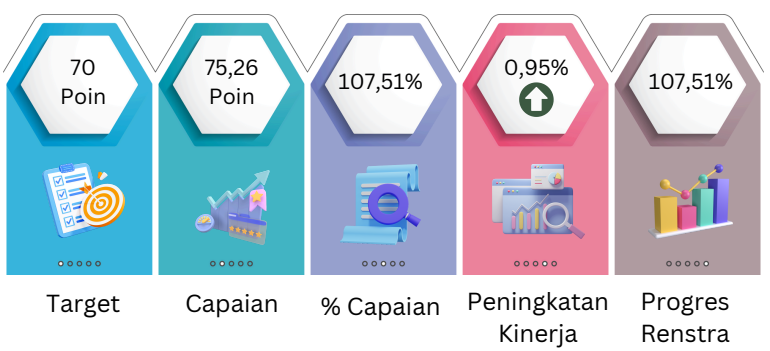

Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan

Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK Diklat Kehutanan) merupakan kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, serta kegiatan yang bersifat religi dan budaya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7 Tahun 2021. Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan harus mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari yang komprehensif, mandiri, dan terpadu, dengan melibatkan seluruh stakeholder yang berkepentingan.

KHDTK Diklat Kehutanan berfungsi tidak hanya sebagai area untuk kegiatan praktik peserta pendidikan dan pelatihan kehutanan, tetapi juga sebagai lokasi bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan untuk mendapatkan pengalaman lapangan yang terfokus. Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan tersebut harus memastikan bahwa fungsi hutan tetap terjaga dengan baik tanpa mengalami perubahan yang merugikan ekosistemnya.

Pengelola KHDTK Diklat Kehutanan memiliki beberapa kewajiban utama, yaitu:

1. Melakukan perlindungan hutan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan lingkungan.
2. Menjalankan kegiatan konservasi hutan dan menjaga keanekaragaman hayati di dalam kawasan.
3. Melakukan rehabilitasi hutan untuk memulihkan kawasan yang mengalami degradasi.
4. Memelihara batas areal KHDTK Diklat KehutananDiklat kehutanan agar tetap jelas dan tidakberubah.
5. Mengkoordinasikan pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan Diklat Kehutanan dengan instansi kehutanan setempat guna memastikan sinergi dan integrasi program.
6. Melaksanakan pelaporan secara berkala mengenai pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan.

Guna mengukur keberhasilan pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan, dilakukan penilaian efektivitas pengelolaan berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan P2SDM Nomor P.6/P2SDM/SET.11/DIK.0/12/2022 tentang Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan TujuanKhusus Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.

Proses penilaian pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan dilaksanakan secara terstruktur sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada Semester 1 dan Semester 2. Penilaian pada semester pertama bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan selama paruh waktu. Dengan adanya monitoringi ini, berbagai kriteria yang dinilai kurang optimal dapat diidentifikasi, sehingga memungkinkan Pusat Diklat Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melakukan pembinaan secara intensif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan.

Setiap proses penilaian diawali dengan tahap self-assessment oleh masing-masing pengelola KHDTK Diklat Kehutanan. Tahap ini memberikan kesempatan kepada pengelola untuk melakukan penilaian mandiri atas kinerja mereka. Selanjutnya, dilakukan proses monitoring dan verifikasi dokumen pendukung. Penilaian akhir oleh Tim Penilai dari Pusat Diklat SDM LHK. Verifikasi dokumen pendukung dari setiap aspek kriteria indikator ini dirancang untuk menjamin bahwa proses penilaian dilakukan secara objektif, konsisten, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Melalui pendekatan pengelolaan yang komprehensif dan kolaboratif, KHDTK Diklat Kehutanan Diklat Kehutanan tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan penelitian yang unggul, tetapi juga berkontribusi dalammenjaga keseimbanga nekosistem dan keanekaragaman hayati. Pendekatan ini menjadikan KHDTK Diklat Kehutanan Diklat Kehutanan sebagai model pengelolaan kehutanan berkelanjutan yang mampu memberikan manfaat secara ekologi, sosial, dan ekonomi.

Kriteria dan Indikator Penilaian Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK-Diklat Kehutanan

Perencanaan	Pelaksanaan Kegiatan	Kerjasama Pengelolaan	Pemanfaatan Hutan	Pembangunan Sarpras Pendukung	Pelaporan
15%	*30%*	*10%*	*30%*	*10%*	*5%*
• Inventarisasi hutan • Penataan Areal • Penyusunan Rencana Program	• Tingkat efektivitas organisasi pengelola • Tingkat kelayakan SDM Pengelola • Pelaksanaan diklat teknis dan atau diklat fungsional kehutanan di KHDTK • Pemeliharaan batas areal KHDTK • Rehabilitasi hutan • Melakukan konservasi tanah dan air • Konservasi hutan dan kehati • Perlindungan dan pengamanan hutan	• Terdapat dokumen perjanjian Kerjasama • Terdapat rencana Bersama antarpihak • Pelaksanaan Kerjasama berjalan sesuai dokumen dan rencana kerja	• Pemanfaatan Kawasan (khusus HP) • Pemungutan HHBK • Pemanfaatan Jasa lingkungan dari wisata alam • Pemberdayaan masyarakat	• Terdapat rencana pembangunan sarpras pendukung • Pelaksanaan pembangunan sarpras pendukung • Terpeliharanya sarpras pendukung	• Penyusunan laporan tepat waktu dan sesuai format • Isi laporan pengelolaan KHDTK

No	Satker/KHDTK	Perencanaan	Pelaksanaan Kegiatan	Kerjasama Pengelolaan	Pemanfaatan Hutan	Pembangunaan Sarpras pendukung	Pelaporan	Nilai Akhir	Kategori
1	BPLHK Pemantangsiantar / KHDTK-HD Pondok Buluh	14.00	24.75	7.33	21.00	8.67	5.00	80.75	Sedang
2	BPLHK Pekanbaru / KHDTK-HD Bukit Suligi	14.00	25.50	10.00	13.50	9.33	5.00	77.33	Sedang
3	BPLHK Kadipaten / KHDTK-HD Sawala Mandapa	15.00	27.75	8.00	19.50	7.33	5.00	82.58	Sedang
4	BPLHK Bogor / KHDTK-HD Rumpin	15.00	19.50	6.00	24.00	6.00	5.00	75.50	Sedang
5	BPLHK Makassar / KHDTK-HD Tabo-Tabo	13.00	21.75	4.67	19.50	6.67	4.50	70.08	Sedang
6	BPLHK Samarinda / KHDTK-HD Loa Haur	13.00	21.00	4.00	15.00	2.67	5.00	60.67	Sedang
7	BPLHK Kupang / KHDTK-HD Sisimeni Senam	14.00	26.25	6.67	18.00	10.00	5.00	79.92	Sedang
Rata-rata		14	23.78	6.66	18.64	7.23	4.92	75.26	Sedang
Bobot		15	30	10	30	10	5	100	

Berdasarkan hasil verifikasi dan monitoring oleh Pusat Diklat SDM LHK atas *self assessment* yang dilakukan oleh seluruh Balai Pelatihan LHK, diperoleh nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan pada Tahun 2024 adalah sebesar 75.26 poin (mencapai 107,51% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 70 poin). Nilai tersebut merupakanrerata nilaidari KHDTK Diklat Kehutanan yang dikelola oleh 7 Balai Pelatihan LHK.

Penilaian efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan yang belum tercapai target pada pengelola KHDTK Loa Haur BPLHK Samarinda karena dari 6 kriteria hanya 1 kriteria yang pointnya diatas rata-rata yaitu laporan tahunan. Kriteria yang dibawah standar rata-rata terdapat pada kriteria perencanaan, pelaksanaan kegiatan, kerjasama pengelolaan, pemanfaatan hutan, pembangunan sarana dan prasarana pendukung. Pada pengelola KHDTK Loa Haur BPLHK Samarinda dalam format pelaporan dokumentasi kegiatan belum sepenuhnya sesuai dari masing-masing dokumen pendukung setiap kriteria dan indikator.

Sebagai upaya tindak lanjut dalam peningkatan kinerja ditahun selanjutnya, pada semester 1 Tahun 2025 perlu dilakukan pendampingan pembinaan dan monitoring efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan pada seluruh Balai Pelatihan LHK sesuai Peraturan Kepala Badan P2SDM No 6/P2SDM/SET.11/DIK.0/12/2022 tanggal 2 Desember 2022.

Merujuk pada rata-rata penilaian, Komponen Pemanfaatan Hutan menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian perhatian lebih karena baru memperoleh nilai 18,64 poin dari bobot 30 poin (62,13%). selain pembinaan tersebut juga akan dilaksanakan pertemuan seluruh pengelola KHDTK Diklat Kehutanan berupa rapat koordinasi atau seminar yang menghadirkan Pusdiklat SDM LHK, Set.BP2SDM, Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, Ditjen PHL dan Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan, Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan, Ditjen PKTL.

Secara umum trend capaian Indeks Evektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2024 merupakan pencapaian yang tertinggi yaitu 75,26 poin meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 74,86 Poin (Peningkatan 0,31 Poin). Capaian pada tahun 2024 tersebut telah melebihi target yang ditetapkan pada Renstra yaitu sebesar 70 poin dengan presentase capaian 105,71%. Keberhasilan ini menunjukan bahwa pengelolaan KHDTK oleh Balai Pelatihan LHK sudah dapat mencapai standar yang diharapkan.

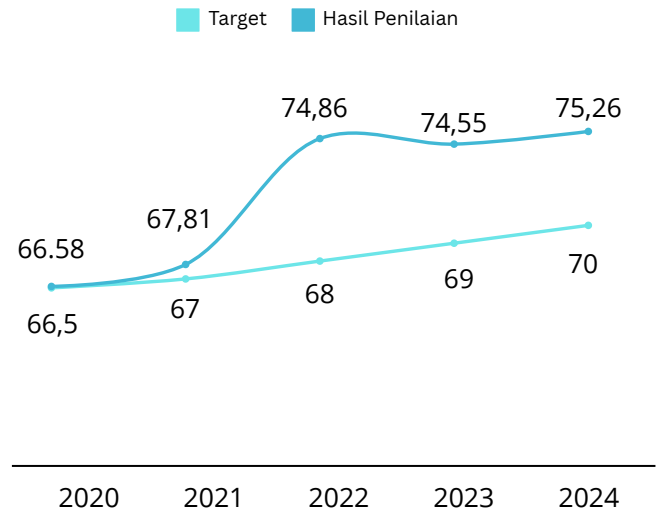

No	KHDTK	2020	2021	2022	2023	2024
1	BPLHK Pemantangsiantar / KHDTK-HD Pondok Buluh	65,00	66,83	77,00	81,75	80,75
2	BPLHK Pekanbaru / KHDTK-HD Bukit Suligi	67,00	66,64	73,25	74,75	77,33
3	BPLHK Kadipaten / KHDTK-HD Sawala Mandapa	71,00	68,22	81,67	81,92	82,58
4	BPLHK Bogor / KHDTK-HD Rumpin	61,80	70,86	75,25	83,08	75,50
5	BPLHK Makassar / KHDTK-HD Tabo-Tabo	60,70	68,82	80,00	70,17	70,08
6	BPLHK Samarinda / KHDTK-HD Loa Haur	66,74	66,64	68,25	68,25	60,67
7	BPLHK Kupang / KHDTK-HD Sisimeni Senam	73,84	66,64	68,58	61,92	79,92
	Rata-Rata	66,58	67,81	74,86	74,55	75,26

Output dan Outcome

Output dari indikator kinerja ini berupa peningkatan efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan-Diklat Kehutanan, yang diukur melalui capaian Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan sebesar 75,26 poin. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek pengelolaan, termasuk tata kelola, pemanfaatan sumber daya, dan pelaksanaan fungsi pendidikan serta pelatihan. Outcome yang dihasilkan dari indikator kinerja ini adalah tersedianya KHDTK Diklat Kehutanan-Diklat Kehutanan yang dikelola secara baik dan terstandar. Dengan pengelolaan yang optimal, KHDTK Diklat Kehutanan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan di lingkup Badan P2SDM secara lebih efektif dan efisien. KHDTK Diklat Kehutanan dapat menyediakan fasilitas, infrastruktur, dan lingkungan pembelajaran yang mendukung praktik lapangan, penelitian, serta pengembangan keterampilan siswa. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas lulusan dan peserta pelatihan, memperkuat kapasitas sumberdaya manusia kehutanan, serta mendukung tercapainya tujuan strategis pengembangan SDM di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Setiap Tahunnya Badan P2SDM senantiasa melanjutkan sinergitas pengelolaan KHDTK Diklat antara Balai Pelatihan LHK dengan SMK Kehutanan Negeri lingkup Badan P2SDM sebagai tindaklanjut arahan Menteri LHK perihal keterpaduan antara pendidikan, pelatihan dan sertifikasi serta implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar. Kegiatan praktik Siswa SMK Kehutanan Negeri diarahkan untuk dapat mengoptimalkan penggunaan KHDTK Diklat Kehutanan, untuk itu pada Tahun 2024 dilakukan beberapa peningkatan sarana dan prasarana pendukung pada KHDTK Diklat Kehutanan seperti ruang asrama, perbaikan akses jalan, pembuatan dermaga, renovasi persemaian, dll.

Efektivitas

Pencapaian Kinerja pada tahun 2024 yang sebesar 75,26 Poin meningkat dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 yang sebesar 74,55. Berdasarkan hasil perhitungan, maka nilai efektivitas sebesar 1 dan berada pada kategori efektif. Beberapa hal yang akan dilaksanakan oleh Badan P2SDM untuk peningkatan kinerja pengelolaan KHDTK kedepan diantaranya meningkatkan ketertiban dalam penyusunan laporan, penguatan kelembagaan KHDTK dengan melibatkan pihak terkait, pemantauan dan monitoring secara rutin, kerja sama pengelolaan KHDTK, pengawasan terhadap unit pengelola, dan penyamaan persepsi dalam pengelolaan kawasan.

Pencapaian kinerja yang cukup baik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung diantaranya:

1. Terpenuhinya Rencana Pengelolaan (RP) KHDTK Diklat Kehutanan Diklat Kehutanan baik jangka panjang, menengah dan pendek dengan memperhatikan kriteria dan indikator pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan Diklat Kehutanan sebagai pedoman dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan Kawasan. Diklat Kehutanan antara Balai Pelatihan LHK dan SMK Kehutanan Negeri KLHK mendukung kegiatan aktifitas praktik teknis kehutanan di KHDTK Diklat Kehutanan dalam berbagai pendidikan dan pelatihannya sehingga KHDTK Diklat Kehutanan dapat lebih termanfaatkan secara optimal.
2. Pemanfaatan KHDTK Diklat Kehutanan dapat dipergunakan oleh institusi pendidikan (Universitas, SMA/SMK, SMP dan SD) dan mitrakerja pemerintah maupun swasta sehingga KHDTK Diklat Kehutanan dapat lebih termanfaatkan optimal dalam pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan yang berkelanjutan.
3. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan dimulai perencanaan, perlindungan, dan lainnya denganinstitusi lain yang terkait. Sebagaicontoh kegiatanpengamanan dan penegakan hokum bersinergi dengan Balai Gakkum, dalamhal penataan dan pemeliharaan batas dengan BPKHTL.

Efisiensi

Pencapaian kinerja Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan terhadap target sebesar 99,18% diperoleh dengan penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp 3.459.910.000 dari pagu anggaran Rp 3.505.000.000 (98,71%), sehingga berdasarkan hasil perhitungan, nilai efisiensi kinerja berada pada angka 0,92 dengan kategori efisien. Secara nyata, Badan P2SDM melakukan upaya-upaya efisiensi dalam pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan seperti memanfaatkan tmemanfaatkan teknologi informasi melalui sistem manajemen yang terintegrasi untukmempercepat proses monitoring dan evaluasi, serta masyarakat sekitar secara aktif dalam berbagai kegiatan seperti patroli pengamanan hutan, perawatan demplot, pemeliharaan tanaman, dan rehabilitasi kawasan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperkuat kolaborasi dengan masyarakat lokal, sehingga mendukung pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan yang berkelanjutan dan inklusif.

KENDALA DAN UPAYA TINDAK LANJUT

Kendala

Pencapaian kinerja yang baik pada indikator Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Beberapa kendala utama yang memengaruhi pencapaian ini antara lain:

1. Unit pengelola KHDTK Diklat Kehutanan pada Balai Pelatihan LHK kurang begitu jelas, hal ini menghambat pendanaan dan pengendalian personil yang berakibat pada keamanan dan kinerja pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan.
2. Jumlah dan kompetensi SDM pengelola KHDTK Diklat Kehutanan masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan secara optimal.
3. Anggaran yang tersedia untuk pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan sangat terbatas, sehingga menghambat pengembangan infrastruktur dan program kawasan. Ketergantungan yang tinggi pada kerja sama atau sinergi dengan pihak eksternal menjadi tantangan tersendiri.
4. KHDTK Diklat Kehutanan masih menghadapi gangguan hutan yang berasal dari berbagai faktor, termasuk aspek ekologi seperti degradasi lahan dan kerusakan ekosistem, aspek ekonomi seperti aktivitas ilegal yang didorong oleh kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar, serta aspek sosial seperti konflik kepentingan dengan komunitas lokal.
5. Batasan paradigma pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan yang belum demikian jelas pada P.7/2021 antara paradigmaPengelolaan Hutan Lestari (sustainable Forest Management-SFM); yang boleh melakukanperencanaan, pemeliharaan, penebangan, dan pemanfaatan hasilhutan kayu untukhutan produksi; atauparadigma pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan yang tidak dibolehkan memanfaatkanhasil hutan kayu pada hutan produksi, menjadi factor penghambat dalampengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan.

Upaya tindak Lanjut

Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut diantaranya:

1. Membentuk unit pengelola KHDTK Diklat Kehutanan pada Balai Pelatihan LHK. Unit ini bertugas mengoordinasikanseluruh kegiatanpengelolaan, memastikanalokasi dana yang tepat, serta mengaturpengendalian personelsecara efektifuntuk mendukung keamanan dan kinerja pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan.
2. Penambahan tenaga kerja untuk pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan dapat dilakukan melalui pemberdayaan siswa SMK Kehutanan, Widyaiswara, akademisi, dan mahasiswa. Mereka dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan kontributif seperti penelitian, perawatan demplot, atau pemantauan kawasan, sehingga mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.
3. Untuk meningkatkan kompetensi pengelola, diperlukan pelatihan intensif dan bimbingan teknis yang berfokus pada pengelolaan kawasan hutan, konservasi, pemanfaatan hasil hutan, dan pendekatan sosial. Program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas SDM dalam menghadapi tantangan pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan.
4. Sinergitas dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, organisasi lingkungan, komunitas lokal, dan mitra usaha, perlu ditingkatkan. Hal ini dilakukan melalui kerja sama dalam kegiatan pengembangan kawasan, pelatihan, penelitian, atau program pemberdayaan masyarakat.
5. Untuk menjaga keberlanjutan kawasan, perlu dilakukan pemeliharaan batas kawasan, patroli rutin, dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar. Selain itu, pengembangan kemitraan dengan komunitas lokal dan program pemberdayaan masyarakat dapat mengurangi gangguan hutan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan.

Success Story

PEMANFAAAN JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM DI KHDTK DIKLAT KEHUTANAN TABO-TABO, BPLHK MAKASSAR

Di tengah lanskap hutan tropis yang asri, KHDTK Diklat Kehutanan Tabo-Tabo menjadi bukti nyata bahwa harmoni antara edukasi, pelestarian, dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan beriringan. Salah satu daya tarik utama kawasan ini adalah Air Terjun Tinjo Bali, yang aliran sungainya memberikan suasana tenang sekaligus menyejukkan. Lingkungan alami ini tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang berkegiatan bagi berbagai kalangan, mulai dari siswa pendidikan usia dini hingga para karyawan yang memanfaatkan kawasan ini untuk kegiatan gathering dan edukasi.

Melalui pendekatan pengelolaan jasa lingkungan yang inovatif, KHDTK Diklat Kehutanan Tabo-Tabo telah berhasil memberdayakan masyarakat setempat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan wisata alam. Dengan kolaborasi ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan hutan di sekitar.

Keberhasilan pengelolaan ini mencerminkan sinergi antara pendidikan, pelestarian, dan pengembangan ekonomi lokal. KHDTK Diklat Kehutanan Tabo-Tabo kini tidak hanya menjadi pusat pembelajaran, tetapi juga ikon wisata alam yang membawa manfaat luas bagi lingkungan, masyarakat, dan para pengunjung yang datang. Melalui pemanfaatan jasa lingkungan ini, KHDTK Diklat Kehutanan Tabo-Tabo telah menjadi contoh nyata bagaimana sebuah kawasan dapat menjadi laboratorium hidup bagi edukasi dan konservasi, serta ruang berbagi manfaat saat ini dan mendatang.

Pemilahan Sampahpada SD Fransiskus Baturaja, PemenangPenghargaanAdiwiyataMandiri

IKP 5

Jumlah lembaga/komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup

Pelaksana : Pusat Pengembangan Generasi LHK

CAPAIAN KINERJA

Komunitas masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup memainkan peran strategis dalam menjaga kelestarian alam dan mendukung upaya keberlanjutan ekosistem. Dengan kesadaran kolektif dan aksi nyata, komunitas ini mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Oleh karena itu, Badan P2SDM secara konsisten melaksanakan program pemberdayaan dan pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengetahuan, keterampilan, serta pembentukan sikap dan perilaku yang mendukung budaya lingkungan hidup.

Dalam upaya ini, pendekatan sistematis, masif, dan terstruktur, menjadi kunci utama pada lembaga masyarakat/komunitas dan sekolah yang peduli terhadap lingkungan. Pada tahun 2024, Badan P2SDM telah melaksanakan langkah-langkah berikut:

1. Pembinaan Masyarakat Peduli dan Berbudaya Lingkungan dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek), pendampingan, serta pemantauan dan evaluasi untuk mengembangkan praktik-praktik ramah lingkungan. Program ini bertujuan menumbuhkan kesadaran individu maupun kolektif dalam menjaga fungsi kelestarian lingkungan hidup.
2. Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) bertujuan membangun generasi muda yang sadarlingkungan melalui kegiatan bimtek, pendampingan, penghargaan, serta pemantauan dan evaluasi. Program ini tidak hanya meningkatkan wawasan siswa terhadap isu lingkungan, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai peduli lingkungan ke dalam kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan pembiasaan disekolah.

Melalui berbagai program tersebut, Badan P2SDM berharap masyarakat dan generasi muda dapat menjadi pelopor dalam membangun budaya peduli lingkungan sehingga dapatmenciptakan ekosistem sosial yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup. Indikator keberhasilan program inidengan terwujudnya lembaga masyarakat/komunitas yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup.

Pada Tahun 2024, Badan P2SDM melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap 3.368 lembaga masyarakat/komunitas yang terdiri dari 3.350 Sekolah yang telah mengikuti pembinaan gerakan PBLHS dan 18 lembaga masyarakat/komunitas yang peduli dan berbudaya Lingkungan Hidup. Capaian kinerja tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebanyak 3.368 lembaga sehingga persentase kinerja mencapai 100%.

Sejak tahun 2020 s.d. 2024 Badan P2SDM telah melakukan pembinaan dan pendampingan pada sekolah maupun lembaga masyarakat/komunitas sehingga dapat mencapai target sesuai perjanjian kinerja tahunan 100% dan target Renstra sebanyak 4.128 lembaga. Pencapaian tersebut didukung dengan perubahan strategi pada tahun 2024 yaitu melalui metode penerapan *levelling system* pada sekolah yang telah melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Capaian kinerja tahun 2020 s.d. 2024 sebagaimana grafik berikut.

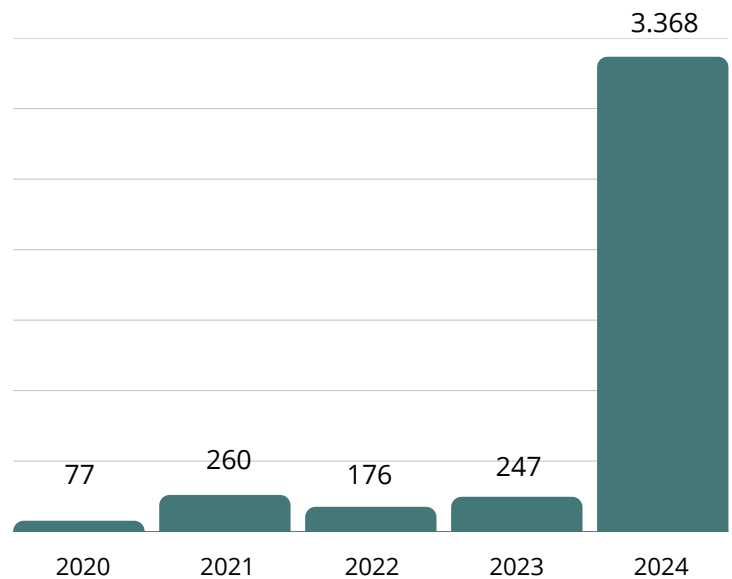

Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS)

Dalam rangka meningkatkan peran lembaga masyarakat/komunitas Badan P2SDM menginisiasi masyarakat untuk melakukan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan, melalui kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan pada satuan pendidikan serta lembaga masyarakat/komunitas. Badan P2SDM memiliki peran yang berpengaruh terhadap generasi muda melalui Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS).
Gerakan PBLHS adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH) yang dilakukan melalui penerapan 6 aspek yaitu :

1. Kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase;
2. Pengelolaan sampah;
3. Penanaman dan pemeliharaan pohon/tanaman;
4. Konservasi ir;
5. Konservasi Energi;
6. Inovasi terkait PRLH berdasarkan Identifikasi Potensi dan Masalah Lingkungan Hidup (IPMLH).

Tujuan Gerakan PBLHS :

1. Mewujudkan penerapan perilaku ramah lingkungan hidup oleh warga sekolah;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah, lingkungan hidup sekitarnya dan daerah.

Pencapaian IKK GPBLHS sebanyak 3.350 lembaga dilakukan dengan melaksanakan Bimbingan Teknis Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) sebagai salah satu bentuk peran pemerintah dalam mendorong pembinaan GPBLHS. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman guru-guru sekolah dalam melaksanakan GPBLHS di lingkungan sekolah.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari bimbingan teknis tersebut, dilakukan Pendampingan secara virtual dan bertahap terhadap peserta Bimtek di 6 Regional :

1. Regional Sumatera;
2. Regional Jawa;
3. Regional Bali dan Nusa Tenggara;
4. Regional Kalimantan;
5. Regional Sulawesi Maluku dan Regional Papua.

Pelaksanaan Bimtek dan pendampingan ini selain dilakukan oleh Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga melibatkan pihak ketiga yaitu PT. Tirta Investama melalui Lembaga Pendidikan Lingkungan SHIND khususnya di Regional Jawa. Bimbingan Teknis dan pendampingan ini dilakukan mempercepat dalam mencapai target IKK.

Pemberian Penghargaan Adiwiyata

Selain melaksanakan pembinaan, Badan P2SDM juga memberikan apresiasi kepada sekolah-sekolah yang berhasil melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Gerakan PBLHS) pada tahun 2024 melalui penghargaan Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri. Pada tahun ini, penghargaan Adiwiyata diberikan kepada 512 sekolah sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional yang tersebar di 31 provinsi, serta 208 sekolah sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri dari 22 provinsi. Penghargaan diberikan secara langsung oleh Wakil Menteri LHK, Staf Ahli Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi, Kepala Badan P2SDM KLHK, serta Dewan Pertimbangan PBLHS pada tanggal 2 Oktober 2024 di Gedung Manggala Wanabakti.

Penghargaan Adiwiyata telah menjadi program strategis sejak diluncurkan pada tahun 2006, dengan tujuan membangun ekosistem pendidikan yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Sampai dengan tahun 2024, berdasarkan data aplikasi SIDIA 2024, total sekolah penerima penghargaan Adiwiyata telah mencapai 1.341 Sekolah Adiwiyata Mandiri dan 5.162 Sekolah Adiwiyata Nasional.

Sekolah-sekolah penerima penghargaan dinilai telah berhasil menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup, menciptakan perilaku ramah lingkungan, serta memengaruhi komunitas sekitar untuk peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Mereka juga aktif melaksanakan berbagai kegiatan berbasis lingkungan hidup sebagai bagian dari Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS), seperti pengelolaan sampah, penghijauan, efisiensi energi, dan konservasi air.

Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan sekolah dalam mengintegrasikan nilai-nilai peduli lingkungan ke dalam kegiatan pendidikan, tetapi juga diharapkan dapat mendorong aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring dan berkelanjutan untuk menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup agar terjadi perubahan perilaku dan peningkatan kualitas lingkungan hidup baik di sekolah maupun lingkungan sekitar.

Pembinaan lembaga masyarakat/komunitas yang peduli dan berbudaya LH

Badan P2SDM juga melaksanakan "Bimbingan Teknis Kader Lingkungan dalam Mendukung Pembentukan Kampung Iklim" terhadap anggota lembaga masyarakat/Komunitas dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melakukan aksi nyata perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendukung Program Kampung Iklim (Proklim) yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tujuan dari Pembinaan adalah:

1. Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat/komunitas dalam melakukan gerakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Mendorong agar lembaga masyarakat/komunitas mampu melibatkan warga masyarakat untuk berperan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan.

Pada Tahun 2024 telahdilaksanakan pembinaan serta pendampingan terhadap 18 lembaga masyarakat/ komunitas dengan sebaran sebagaimana berikut:

No	Nama Komunitas	Provinsi	Rencana Aksi
1	Komunitas Bank Sampah Lansep Ceria RW 14	Jawa Timur	Pembuatan IPAL;
2	Lembaga KTH Alas	Jawa Timur	Pembuatan DAM; Rambu-rambu; Penanaman Merica;
3	Lembaga KWT Raflesia	Jawa Timur	Penampungan Air Hujan; Pengelolaan Sampah Organik;
4	Komunitas GAPSAP SDN 1 Mambang	Bali	Pembuatan teba modern; pemgadaan reklame proklim; sosialisasi proklim;
5	Komunitas TPS 3R Panca Lestari	Bali	Sosialisasi Pemilahan Sampah untuk PKK 5 Banjar di Desa Aclat Tanjung Benoa;
6	Komunitas TPS 3R Winangun Asri	Bali	Sosialisasi; Pengelolaan Sampah;
7	Komunitas Bhakti Ring Pertiwi	Bali	Pembuatan Biopori; Pembuatan pirolisis; Sosisalisasi Proklim;
8	Komunitas Nukari Kriya Raya	Bali	Penghijauan Kanal;
9	Komunitas BS Prema Bali Lestari	Bali	Budidaya Lele dalam Ember; Sosialisasi Pengelolaan Sampah;
10	Komunitas Bank Sampah Mitra Resik	Jawa Timur	Pembuatan IPAL;
11	Komunitas Bank Sampah Petiken Lestari	Jawa Timur	Pembuatan Sumur Tandon Penampung Air;
12	Komunitas Bank Sampah Trisno Resik	Jawa Timur	Sekat Pemilah Sampah;
13	Komunitas Bank Sampah Makmur Bersama	Jawa Timur	Pembuatan IPAL; Pembuatan IPAH;
14	Komunitas Sinar Mulia 06	Jawa Timur	Instalasi Pengolahan Air Limbah;
15	Komunitas Bank Sampah Guru Wolu	Jawa Timur	Pengelolaan Sampah; Penganekaragaman Tanaman Pangan;
16	Komunitas Tukad Bindu	Bali	Penghijauan; Penanaman Pohon Bodi (Pembibitan Pohon Penyerap Air);
17	Komunitas Tukad Mati Lestari	Bali	Pembibitan; Penaman Mangrove; Pembibitan Ikan Nila;
18	Komunitas Nelayan Wana Sari	Bali	Pencegahan Punahnya Vegetasi Pohon Mangrove;

Output dan Outcome

Output dari indikator kinerja ini yaitu terlaksanya pembinaan sebanyak 3.368 lembaga yang terdiri dari 3.350 lembaga sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup serta 18 lembaga masyarakat/ komunitas yang melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Outcome yang dihasilkan dari indikator kinerja ini adalah semakin banyaknya entitas yang terlibat aktif dalam aksi nyata perlindungan lingkungan, baik di tingkat komunitas, lembaga maupun individu generasi muda. Melalui pembinaan, bimbingan teknis, dan program pendampingan yang sistematis, lembaga pendidikan maupun komunitas peduli lingkungan mampu meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola sumber daya alam secara bijak, menerapkan perilaku ramah lingkungan, serta memobilisasi gerakan kolektif untuk mendukung keberlanjutan ekosistem.

Hal ini juga tercermin dari peningkatan jumlah lembaga masyarakat dan sekolah yang secara aktif mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan ke dalam kebijakan, kurikulum, dan aktivitas mereka. secara nyata perubahan sikap/perilaku peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah ditunjukan dengan pengurangan sampah, penghematan air, penghematan listrik, penanaman pohon, sampah yang dihasilkan sekolah dapat diolah menjadi barang bernilai ekonomi, dan lain-lain.

Efektivitas

Pada tahun 2024, pencapaian kinerja menunjukkan hasil yang konsisten jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 100%. Konsistensi ini mencerminkan keberhasilan Badan P2SDM dalam mempertahankan standar kinerja yang baik untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai efektivitas kinerja mencapai 1 (satu), yang berarti berada dalam kategori efektif. Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh sejumlah faktor utama, di antaranya:

1. Kebijakan pimpinan Badan P2SDM dan Satker yang responsif, akomodatif, dan adaptif dalam merespons situasi serta kebutuhan. Pendekatan pembinaan yang dilakukan secara *hybrid (online* dan *offline)* telah memungkinkan jangkauan pembinaan yang lebih luas dan mencakup lebih banyak lembaga serta komunitas;
2. Kebijakan pimpinan Badan P2SDM dan Satker yang responsif, akomodatif, dan adaptif dalam merespons situasi serta kebutuhan. Pendekatan pembinaan yang dilakukan secara *hybrid (online* dan *offline)* telah memungkinkan jangkauan pembinaan yang lebih luas dan mencakup lebih banyak lembaga serta komunitas;
3. Pelaksanaan pembinaan secara masif dan berkelanjutan, yang dilengkapi dengan koordinasi intensif bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pendekatan ini telah memastikan penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) berjalan optimal dan terpantau dengan baik;
4. Antusiasme lembaga masyarakat/komunitas yang tinggi untuk mengikuti program pembinaan dan pendampingan. Partisipasi aktif ini menjadi indikator meningkatnya kesadaran dan komitmen mereka terhadap pelestarian lingkungan hidup;
5. Koordinasi yang terjalin secara baik dan berkelanjutan antara Badan P2SDM dan lembaga masyarakat/ komunitas binaan. Proses koordinasi dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sehingga memastikan kelancaran setiap tahapan program.

Efisiensi

Pencapaian kinerja Jumlah lembaga/komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup terhadap target sebesar 100,00% diperoleh dengan penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp2.877.906.571,00 dari pagu anggaran Rp2.985.000.000,00 (97,94%), sehingga berdasarkan hasil perhitungan, nilai efisiensi kinerja berada pada angka 0,98 dengan kategori efisien. Secara nyata, Badan P2SDM melakukan Upaya-Upaya efisiensi dalam pembinaan lembaga/komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup seperti pelaksanaan bimbingan teknis secara *online*.

KENDALA DAN UPAYA TINDAK LANJUT

Kendala

Pencapaian kinerja yang baik pada indikator Jumlah lembaga/komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Beberapa kendala utama yang memengaruhi pencapaian ini antara lain:

1. Keterbatasan pemahaman sekolah dalam pendokumentasian bukti hasil pelaksanaan Gerakan PBLHS. Banyak sekolah yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pendokumentasian hasil kegiatan Gerakan PBLHS sebagai bagian dari dokumen penilaian untuk penghargaan Adiwiyata. Hal ini menyebabkan beberapa sekolah tidak dapat memenuhi persyaratan administratif meskipun telah melaksanakan gerakan secara substantif.
2. Perbedaan persepsi antara peserta dan tim pendamping dalam perencanaan aksi lingkungan. Dalam proses perencanaan aksi, sering kali terjadi perbedaan pandangan antara tim pendamping dan pihak sekolah. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara rencana dan implementasi, serta menghambat kelancaran pelaksanaan program.
3. Sulitnya sinkronisasi jadwal antara pendamping dan sekolah untuk pelaksanaan pendampingan dan pemantauan
4. Tidak semua sekolah Adiwiyata secara aktif dan merata melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup. Ketimpangan ini terlihat terutama pada wilayah tertentu yang masih minim implementasi, sehingga memerlukan upaya lebih untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan mereka.

Upaya tindak Lanjut

Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut diantaranya:

1. Melaksanakan pembinaan yang lebih intensif, menyeluruh, dan interaktif kepada Dinas LHK, Dinas Pendidikan, Kanwil Kementerian Agama, serta pihak sekolah di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan meningkatkan keterlibatan langsung Tim Adiwiyata Sekolah dalam proses pendampingan dengan kunjungan minimal satu kali secara tatap muka untuk memberikan arahan, solusi, serta motivasi kepada sekolah dampingan;
2. Mengadakan koordinasi strategis dengan Dinas LHK setempat untuk memastikan tersedianya fasilitasi pembinaan Gerakan PBLHS secara *offline*;
3. Mengembangkan dan mendistribusikan media edukasi berbentuk tulisan, visual, dan digital seperti booklet, brosur, materi presentasi, video pendek, hingga konten website yang menarik. selain itu perlu menyediakan panduan pembinaan dan pendampingan yang terstruktur untuk memperkuat persepsi serta meningkatkan kapasitas tim pembina maupun pendamping dalam melaksanakan tugasnya di sekolah maupun komunitas;
4. Memutakhirkan sistem informasi manajemen Adiwiyata untuk mempermudah proses pelaporan, pemantauan, dan evaluasi capaian sekolah dalam Gerakan PBLHS, sekaligus meningkatkan transparansi dan aksesibilitas data.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan permasalahan yang ada dapat teratasi secara komprehensif sehingga mendukung keberlanjutan Gerakan PBLHS secara efektif dan merata.

Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Badan P2SDM 2024
Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK, 23 -24 Oktober 2024

IKP 6

Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Pelaksana : Sekretariat Badan P2SDM

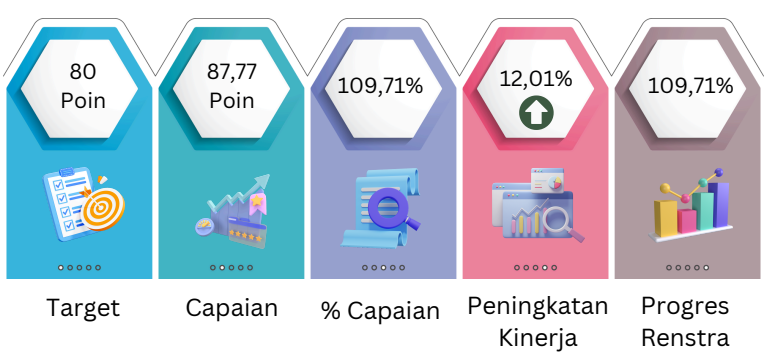

CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja menjadi salah satu aspek kunci dalam agenda Reformasi Birokrasi. Penguatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) hadir sebagai serangkaian kegiatan, alat, dan prosedur yang dirancang secara sistematis untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. SAKIP melibatkan proses penetapan tujuan, pengukuran kinerja, pengumpulan dan pengelolaan data, pengklasifikasian, hingga pelaporan kinerja. Implementasi ini bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tetapi juga sebagai mekanisme untuk terus mendorong perbaikan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan.

Evaluasi SAKIP dilakukan secara tahunan untuk mengukur sejauh mana penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja di setiap instansi pemerintah. Sebagai panduan pelaksanaan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 yang menjadi acuan dalam evaluasi SAKIP. Berdasarkan peraturan tersebut, evaluasi SAKIP menilai empat komponen utama, yaitu:

- Perencanaan Kinerja (30%): Penekanan pada penyusunan rencana strategis dan indikator kinerja utama yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan organisasi.
- Pengukuran Kinerja (30%): Fokus pada penggunaan indikator yang relevan, terukur, dan mampu menggambarkan capaian tujuan.
- Pelaporan Kinerja (15%): Penyusunan laporan kinerja yang akurat dan mencerminkan capaian program secara transparan.
- Evaluasi Internal (25%): Penilaian atas pelaksanaan program dan kebijakan melalui evaluasi mandiri untuk identifikasi kekuatan dan kelemahan.

Sejalan dengan komitmen dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan P2SDM Tahun 2024, Badan P2SDM menetapkan target nilai SAKIP sebesar 80 poin. Target ini mencerminkan tekad Badan P2SDM untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas layanan publik. Melalui implementasi SAKIP yang efektif, Badan P2SDM terus berupaya memperkuat tata kelola yang baik (*good governance*) dan memastikan bahwa setiap program serta kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Badan P2SDM dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengukur efektivitas penerapan SAKIP secara menyeluruh. Hasil evaluasi yang dilaksanakan pada April 2024, sebagaimana tercantum dalam Surat Pengantar Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Nomor SP.75/ITJEN/ITWIL.2/RHS/WAS.2.2/4/2024 tanggal 17 April 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2023 pada Badan P2SDM, menunjukkan bahwa Badan P2SDM berhasil meraih nilai sebesar 87,77 poin. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 80 poin (109,71%), dengan predikat A (Memuaskan).

Nilai SAKIP sebesar 87,77 poin dihasilkan dari pencapaian pada masing-masing komponen, yaitu perencanaan kinerja sebesar 26,54 poin, pengukuran kinerja sebesar 25,98 poin, pelaporan kinerja sebesar 13,31 poin, dan evaluasi internal sebesar 21,94 poin.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, nilai SAKIP pada tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan sebesar 11,56 poin (15,17%). Peningkatan paling mencolok terjadi pada komponen evaluasi internal, yang naik sebesar 15,76%.

Komponen	Bobot	2023		2024		Peningkatan	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
Perencenaan	30	23,38	77,93%	26,54	88,47%	3,16	10,53%
Pengukuran	30	22,39	74,63%	25,98	86,60%	3,59	11,97%
Pelaporan	15	12,44	82,93%	13,31	88,73%	0,87	5,80%
Evaluasi	25	18,00	72,00%	21,94	87,76%	3,94	15,76%
Total	100	76,21	76,21%	87,77	87,77%	11,56	11,56%

Kemajuan ini dicapai melalui tindak lanjut yang menyeluruh atas seluruh rekomendasi Inspektorat Jenderal KLHK pada evaluasi tahun sebelumnya, serta optimalisasi penerapan evaluasi SAKIP melalui pengelolaan kinerja yang lebih terstruktur dan penggunaan platform eSAKIP KLHK hingga ke tingkat satuan kerja (Satker) di lingkup badan P2SDM.

Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan peningkatan efektivitas implementasi SAKIP di lingkup Badan P2SDM, tetapi juga mencerminkan komitmen organisasi dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2020-2024 sebesar 80 Poin, maka capaian sampai tahun 2024 dapat melampaui target yang telah ditetapkan dengan presentase 109,71%.

Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa Badan P2SDM terus berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan SAKIP di masa mendatang. Upaya tersebut mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), optimalisasi teknologi informasi dalam pelaporan kinerja, serta penguatan koordinasi antara seluruh unit kerja. Dengan langkah-langkah strategis ini, Badan P2SDM diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan SAKIP, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap reformasi birokrasi nasional.

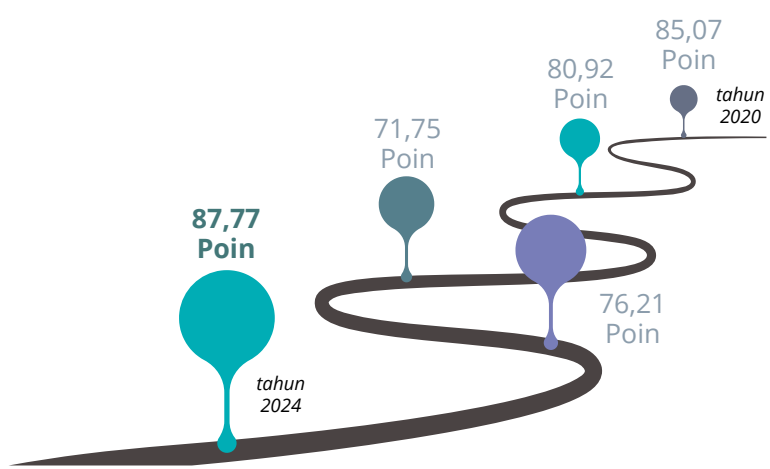

Evaluasi SAKIP Mandiri

Sesuai amanat pada Keputusan Menteri LHK Nomor 975 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian LHK, pada Bulan Februari Tahun 2024, seluruh Satker lingkup Badan P2SDM melaksanakan evaluasi SAKIP Mandiri menggunakan aplikasi eSAKIP KLHK. Selanjutnya Badan P2SDM membentuk Tim Penjaminan Mutu PM SAKIP Badan P2SDM sejumlah 8 orang untuk melakukan penjaminan mutu terhadap evaluasi SAKIP Satker yang hasilnya telah disampaikan melalui surat Kepala Badan P2SDM nomor M.2/BP2SDM/SET.11/REN.3.4/B/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Hasil Penjaminan Kualitas terhadap Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2024 dan Penilaian Laporan Kinerja Satker lingkup Badan P2SDM Tahun 2023. Adapun hasil penjaminan mutu evaluasi SAKIP Lingkup Badan P2SDM sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penjaminan mutu, terdapat 11 Satker yang memperoleh predikat A (memuaskan) dan 6 Satker memperoleh predikat BB (Sangat Baik). Nilai pada Satker lingkup Badan P2SDM berada pada rentang 71,45 Poin yang diperoleh SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru sampai dengan 85,89 Poin yang diperoleh Satker Sekretariat Badan P2SDM.

Selain menetapkan hasil penjaminan mutu evaluasi SAKIP Satker, disampaikan juga kelemahan umum dan rekomendasi secara umum terhadap implementasi SAKIP Satker lingkup Badan P2SDM Tahun 2024 yang harus ditindaklanjuti oleh Satker dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja di tingkat Satker (Selengkapnya pada lampiran 10).

No	Satker	Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (30%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Internal (25%)	Total (100%)	Predikat
1	Sekretariat BP2SDM	25,97	25,33	13,34	21,25	85,89	A (memuaskan)
2	Pusat Penyuluhan	26,39	25,48	13,24	18,00	80,11	A (memuaskan)
3	Pusat Renbang SDM	27,13	25,04	13,29	18,38	83,84	A (memuaskan)
4	Pusat Diklat SDM LHK	26,64	25,93	13,35	18,89	83,81	A (memuaskan)
5	Pusat PGLHK	26,89	25,34	13,39	18,91	84,53	A (memuaskan)
6	BPLHK Bogor	26,61	25,59	13,00	17,84	83,05	A (memuaskan)
7	BPLHK Pematangsiantar	26,22	26,14	12,86	18,28	83,50	A (memuaskan)
8	BPLHK Samarinda	25,87	24,68	13,48	16,18	80,21	A (memuaskan)
9	BPLHK Makassar	27,14	25,67	13,32	18,03	83,16	A (memuaskan)
10	BPLHK Pekanbaru	24,71	23,15	12,39	14,49	74,73	BB (sangat Baik)
11	BPLHK Kadipaten	26,04	25,35	13,05	15,43	79,87	BB (sangat Baik)
12	BPLHK Kupang	27,09	25,23	13,55	18,84	84,72	A (memuaskan)
13	SMKKN Manokwari	26,24	21,91	12,60	16,78	77,52	BB (sangat Baik)
14	SMKKN Kadipaten	26,84	23,59	13,28	17,51	81,22	A (memuaskan)
15	SMKKN Makassar	26,39	24,19	12,93	17,13	79,64	BB (sangat Baik)
16	SMKKN Samarinda	25,43	22,05	13,20	16,77	76,45	BB (sangat Baik)
17	SMKKN Pekanbaru	24,62	19,73	12,42	15,68	71,45	BB (sangat Baik)
	Rata-rata	26,25	24,38	13,10	17,55	80,81	A (memuaskan)

Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri SAKIP

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja, Badan P2SDM secara proaktif melaksanakan berbagai program yang bertujuan memperkuat pemahaman dan kompetensi personel, salah satunya melalui kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri SAKIP Satker di lingkup Badan P2SDM Tahun 2024. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sekretariat Badan P2SDM pada tanggal 23–24 Oktober 2024 bertempat di Pusat Diklat SDM LHK, dengan melibatkan seluruh perwakilan Satker baik secara luring maupun daring.

Tujuan utama dari bimbingan teknis ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada personel yang menangani akuntabilitas kinerja di Satker masing-masing. Dengan memfokuskan pada tata cara penilaian mandiri SAKIP, kegiatan ini diharapkan dapat membantu Satker dalam menjawab setiap indikator pada empat komponen utama SAKIP, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja Internal. Penjelasan yang komprehensif mengenai masing-masing indikator tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan Satker dalam melaksanakan penilaian mandiri secara lebih efektif serta memastikan pengelolaan kinerja tercatat dengan baik sesuai standar akuntabilitas yang ditetapkan.

Agenda bimbingan teknis ini dirancang untuk memberikan panduan yang menyeluruh kepada peserta. Beberapa materi utama yang disampaikan meliputi:

1. Arahan Umum Pengelolaan SAKIP oleh Sekretaris Badan P2SDM, yang memberikan gambaran strategis tentang pentingnya akuntabilitas kinerja sebagai elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkup Kementerian LHK, yang disampaikan oleh Biro Perencanaan, mencakup panduan teknis dan arah kebijakan dalam pengelolaan kinerja organisasi.
3. Sosialisasi Standar Kriteria dalam Penyusunan Laporan Kinerja (LKj), yang memberikan pedoman praktis dalam menyusun laporan kinerja sesuai standar evaluasi SAKIP.
4. Pendalaman Penilaian Mandiri pada Empat Komponen SAKIP, yang dipandu oleh tim Evaluasi dan Pelaporan (Evlap) Sekretariat Badan P2SDM, bertujuan untuk memperkuat pemahaman teknis peserta dalam melakukan penilaian mandiri meliputi penjelasan terhadap Indikator dan bukti dukung yang perlu disiapkan.

Melalui kegiatan ini, Badan P2SDM berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan SAKIP di seluruh Satker. Pelaksanaan bimbingan teknis ini tidak hanya memperkuat implementasi SAKIP, tetapi juga mendorong peningkatan kolaborasi, konsistensi, dan kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dalam mendukung reformasi birokrasi di lingkup Badan P2SDM. Capaian dari kegiatan ini diharapkan menjadi pijakan kuat dalam mempertahankan dan bahkan meningkatkan predikat akuntabilitas kinerja di masa mendatang.

Output dan Outcome

Output dari indikator kinerja ini yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal dicerminkan dengan nilai SAKIP sebesar 87,77 Poin. Outcome yang dihasilkan dari indikator kinerja ini adalah Badan P2SDM dapat mempertanggungjawabkan dan menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi ke arah tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mendukung reformasi birokrasi di lingkup Kementerian LHK. Hasil ini juga mencerminkan peningkatan akuntabilitas kinerja Badan P2SDM dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel, sehingga memperkuat kepercayaan stakeholder internal dan eksternal.

Efektivitas

Pada tahun 2024, pencapaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik yaitu mencapai 109,71%. Pencapaian tersebut meningkat bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 97,71%. Peningkatan kinerja ini mengasilkan nilai efektivitas kinerja sebesar 1,12 yang berada dalam kategori efektif. Pencapaian nilai SAKIP yang memuaskan di Badan P2SDM didukung oleh berbagai faktor yang saling melengkapi. Salah satu faktor utama adalah adanya komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Badan P2SDM dalam menindaklanjuti rekomendasi evaluasi SAKIP yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal KLHK. Rekomendasi tersebut dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan akuntabilitas kinerja. Selain itu, Keputusan Menteri LHK Nomor 975 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi lingkup KLHK memberikan pedoman yang jelas dan terstandar dalam pengelolaan SAKIP, sehingga seluruh unit kerja memiliki arah yang sama dalam pelaksanaannya.

Upaya peningkatan akuntabilitas juga didukung oleh pelaksanaan bimbingan teknis dan asistensi intensif kepada seluruh Satker lingkup Badan P2SDM. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman personel terkait penilaian mandiri SAKIP serta pengelolaan kinerja. Koordinasi yang baik dengan Biro Perencanaan KLHK, sebagai pengampu akuntabilitas kinerja di Kementerian LHK, menjadi faktor penting lainnya yang memastikan keselarasan kebijakan dan implementasi di tingkat kementerian.

Selain itu, pendampingan oleh tim Inspektorat Jenderal KLHK memberikan bimbingan langsung yang membantu Badan P2SDM dalam meningkatkan pengelolaan SAKIP secara sistematis. Tidak kalah penting, penggunaan aplikasi eSAKIP KLHK oleh seluruh Satker menjadi inovasi teknologi yang efektif untuk pengumpulan data kinerja dan pelaksanaan penilaian mandiri SAKIP yang terstandar.

Efisiensi

Pencapaian kinerja Nilai SAKIP Badan P2SDM terhadap target sebesar 109,71% diperoleh dengan penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp 186.736.589.860 dari pagu anggaran Rp 192.371.234.000 (97,07%), sehingga berdasarkan hasil perhitungan, nilai efisiensi kinerja berada pada angka 0,81 dengan kategori efisien. Secara nyata, Badan P2SDM melakukan Upaya-Upaya efisiensi dalam pengelolaan SAKIP melalui pelaksanaan rapat-rapat monitoring kinerja secara *hybrid* dengan seluruh Satker lingkup Badan P2SDM, implementasi aplikasi SIMP2SDM dan eSAKIP KLHK dalam pengumpulan data kinerja dan pelaksanaan bimbingan teknis penilaian SAKIP Mandiri secara *hybrid*.

Kendala

Pencapaian kinerja yang baik pada indikator Nilai SAKIP Badan P2SDM tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Beberapa kendala utama yang memengaruhi pencapaian ini antara lain:

- Masih terdapat beberapa Laporan Kinerja Satker lingkup Badan P2SDM yang belum memberikan informasi sesuai dengan standar untuk evaluasi SAKIP.
- Masih ditemukan beberapa data pencapaian kinerja yang tidak sinkron pada beberapa aplikasi pelaporan.
- Belum optimalnya penjelasan yang diberikan oleh Satker untuk menjawab kriteria penilaian mandiri SAKIP.

Upaya tindak Lanjut

Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut diantaranya:

- Melakukan updating pedoman penyusunan laporan melalui Keputusan Kepala Badan P2SDM nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyusunan Laporan lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.
- Melakukan rapat monitoring dan evaluasi kinerja sekaligus rekonsiliasi data kinerja pada beberapa aplikasi secara rutin.
- Melaksanakan bimbingan teknis penilaian SAKIP Mandiri Satker lingkup Badan P2SDM Tahun 2024

The best SAKIP KLHK 2024

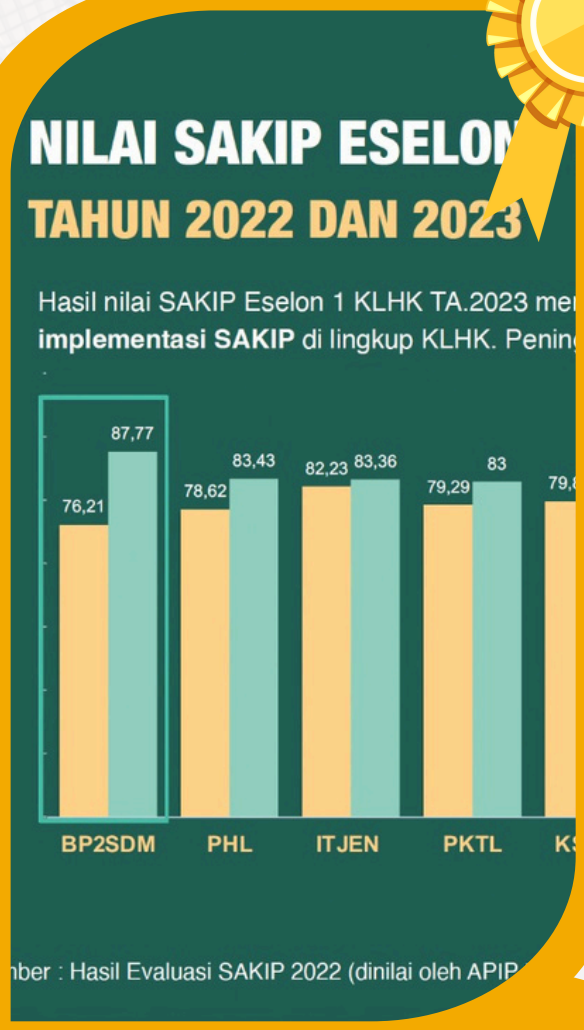

Badan P2SDM mencapai Nilai SAKIP tertinggi di Tahun 2024 melewati Ditjen PHL, Inspektorat Jenderal, dan Ditjen PKTL dengan nilai sebesar 87,77 (kategori AA/memuaskan). Hasil ini merupakan lonjakan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 76,21 poin (kategori BB/Baik).

Pencapaian ini merupakan usaha keras dari seluruh satker di Badan P2SDM yang dikoordinir oleh Sekretariat Badan P2SDM melalui rapat-rapat koordinasi, bimbingan teknis, asistensi dan bimbingan intensif serta penerbitan NSPK terkait pengelolaan kinerja untuk memberikan pedoman dan meningkatkan pemahaman satker terhadap akuntabilitas kinerja di Badan P2SDM.

Terbitnya Keputusan Menteri LHK Nomor 975 Tahun Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian LHK medorong pengelolaan kinerja di satker lebih terarah dan terstruktur. Selain itu, pemanfaatan aplikasi eSAKIP KLHK memberi sarana bagi satker untuk bisa menata dan mengelola kinerjanya dengan lebih terstruktur, tertata dan terdokumentasi dengan baik.

IKP 7

Nilai Kinerja Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Pelaksana : Sekretariat Badan P2SDM

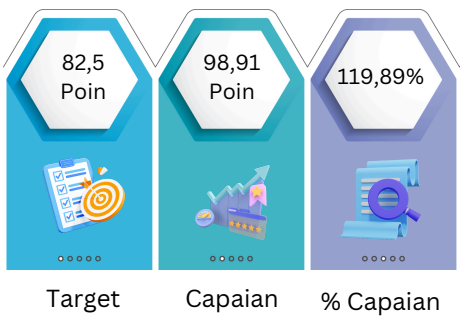

CAPAIAN KINERJA

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah indikator kinerja yang digunakan untuk menilai kesesuaian perencanaan kinerja anggaran dan pelaksanaan kinerja anggaran. Penilaian ini bertujuan memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai rencana, menghasilkan output yang diharapkan, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Nilai Kinerja Anggaran merupakan Indikator kinerja yang baru diterapkan pada tahun 2024 untuk seluruh unit kerja maupun satuan kerja di lingkup KLHK sesuai dengan arahan dari Biro Perencanaan sehingga Indikator tersebut pada saat ini hanya tercantum pada Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Berdasarkan pengungkitnya, NKA terdiri atas nilai capaian kinerja atas penggunaan Anggaran yang dilihat dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dengan bobot 50% yang dapat diperoleh dari aplikasi SMART dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 50% yang diperoleh dari aplikasi OMSPAN. Hal ini diatur dalam PMK nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Anggaran. Komponen NKPA terdiri dari Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK. Sedangkan komponen IKPA terdiri dari Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Capaian Output dan Dispensasi SPM.

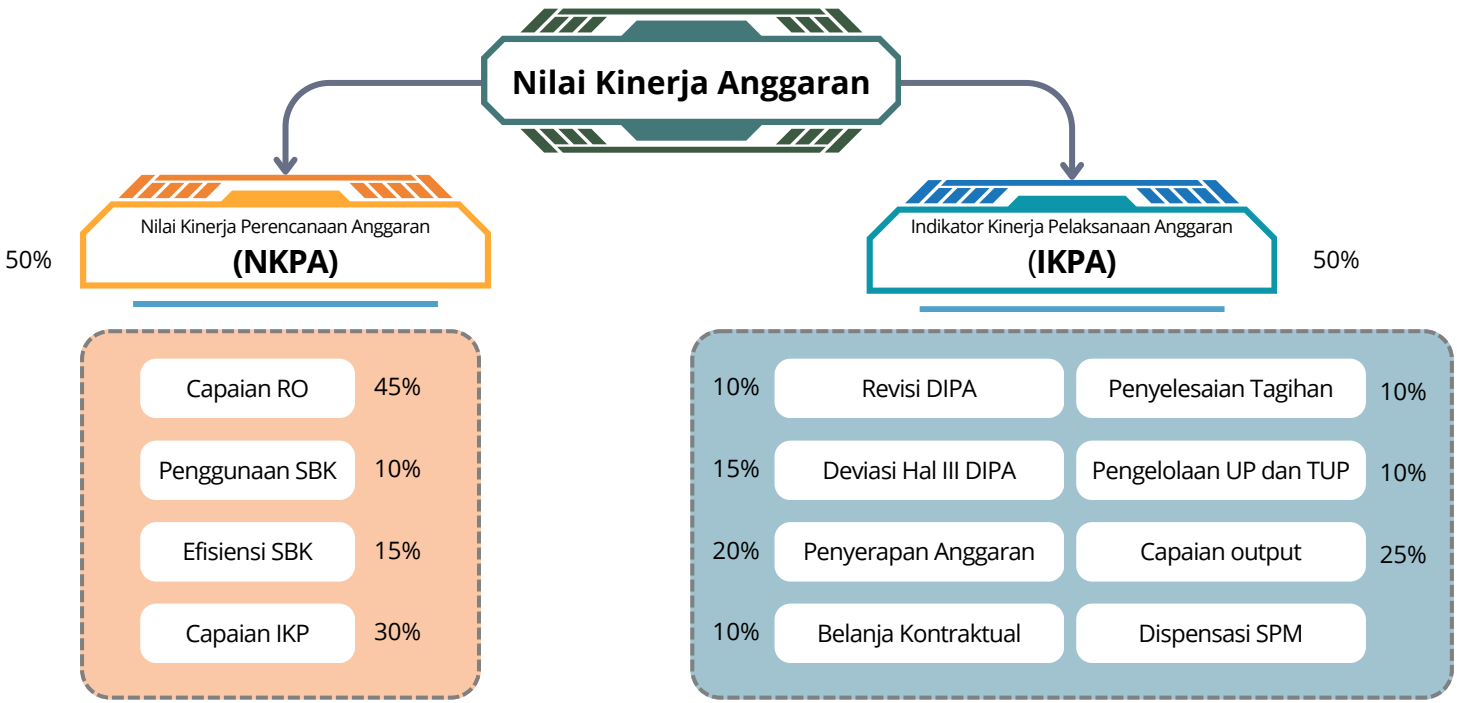

Pada Tahun 2024, Badan P2SDM berhasil memperoleh Nilai Kinerja Anggaran sebesar 89,91 poin dari target 82,5 poin yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sehingga presentase capaian kinerja sebesar 119,89%. capaian kinerja tersebut terdiri atas NKPA sebesar 99,83 poin dan IKPA sebesar 97,98 poin. Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2024 meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang memperoleh nilai sebesar 93,15. Hal ini didukung oleh adanya metode perhitungan baru pada Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan memperhatikan efisiensi pencapaian anggaran berdasarkan Standar Biaya Keluaran (SBK)

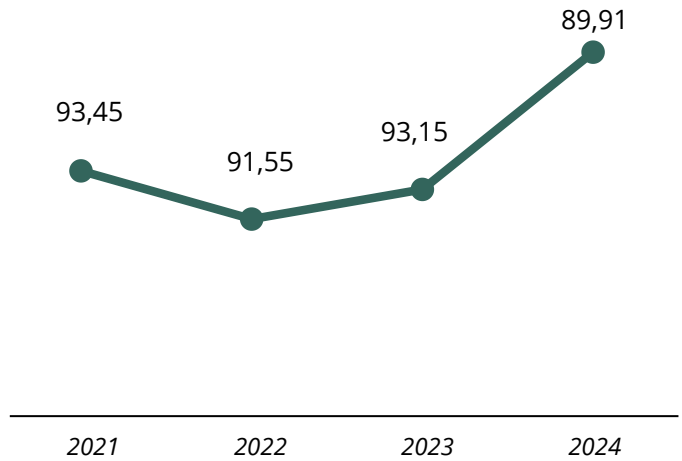

Secara umum pencapaian NKA BP2SDM yang baik merupakan kontribusi dari pencapaian NKA yang baik di masing-masing Satker lingkup Badan P2SDM. Sehingga seluruh Satker lingkup Badan P2SDM diharapkan dapat mencermati kembali seluruh komponen pengungkit NKA untuk dapat meningkatkan kinerja kedepan. Berdasarkan hasil penilaian per Satker, terdapat 3 Satker memperoleh NKA tertinggi sebesar 100,00 poin yaitu BPLHK Bogor, BPLHK Kupang dan BPLHK pekanbaru hal ini menunjukan bahwa pengelolaan kinerja dan anggaran pada Satker tersebut telah dilaksanakan secara optimal. Disisi lain Satker dengan NKA terendah yaitu SMKKN Manokwari sebesar 97,55.

Guna medukung pencapaian NKA yang baik, Badan P2SDM melakukan sejumlah langkah-langkah penting diantaranya melakukan monitoring pencapaian NKA secara berkala setiap bulannya, memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan NKA Satker dan pemaparan kiat-kiat peningkatan NKA oleh Satker yang memperoleh NKA tertinggi.

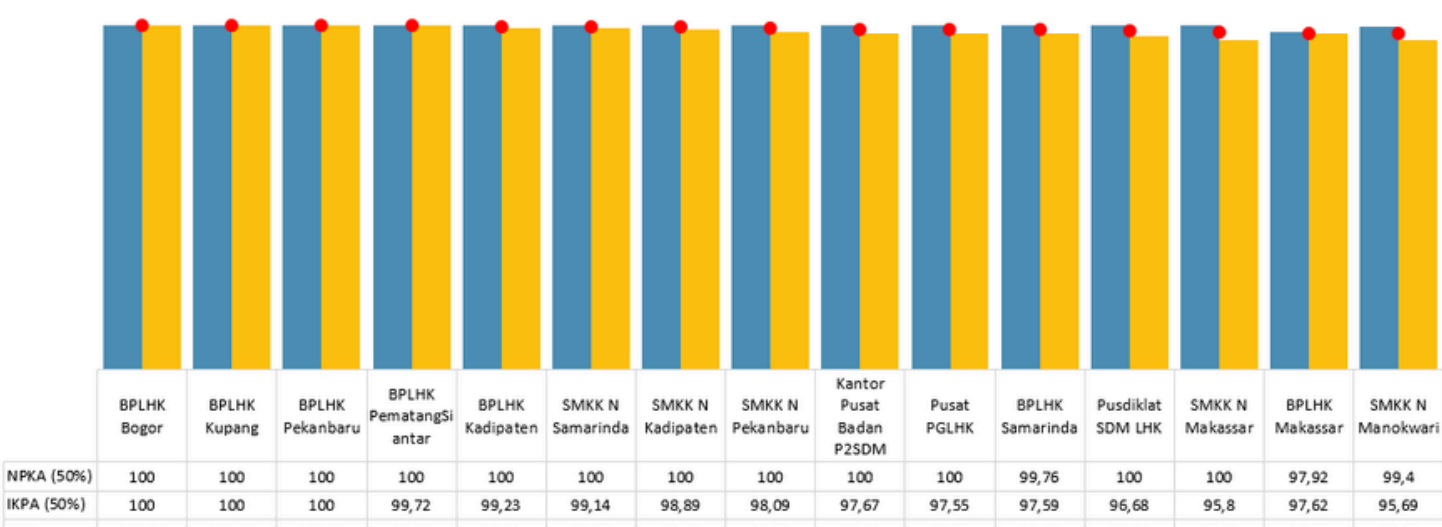

	BPLHK Bogor	BPLHK Kupang	BPLHK Pekanbaru	BPLHK PematangSiantar	BPLHK Kadipaten	SMKK N Samarinda	SMKK N Kadipaten	SMKK N Pekanbaru	Kantor Pusat Badan P2SDM	Pusat PGLHK	BPLHK Samarinda	Pusdiklat SDM LHK	SMKK N Makassar	BPLHK Makassar	SMKK N Manokwari
NPKA (50%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,76	100	100	97,92	99,4
IKPA (50%)	100	100	100	99,72	99,23	99,14	98,89	98,09	97,67	97,55	97,59	96,68	95,8	97,62	95,69
NKA	100,00	100,00	100,00	99,86	99,62	99,57	99,45	99,05	98,84	98,78	98,68	98,34	97,90	97,77	97,55

Data berdasarkan aplikasi SMART dan OMSPAN tanggal 14 Januari 2024 Pukul 08.00 WIB

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan transformasi dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang baru diterapkan pada tahun 2024. Perubahan tersebut mencakup jumlah variabel yang digunakan. Pada regulasi lama, pada level satker, indikator yang dihitung mencakup capaian output, efisiensi output, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan indikator penyerapan anggaran. Pada regulasi terbaru, indikator yang dihitung yaitu capaian output dan nilai efisiensi melalui implementasi SBK. Pada level unit eselon 1, variabel yang dihitung yaitu Capaian Indikator Kinerja Program, akumulasi capaian output satker, dan akumulasi nilai efisiensi satker. Berdasarkan perubahan tersebut, Badan P2SDM mengusulkan adanya penambahan RO baru di bulan Oktober Tahun 2024 pada seluruh Satker untuk mengakomodir penggunaan SBK. Adapun RO tersebut berupa Layanan BMN yang masuk dalam kategori SBKU dengan target 1 layanan di masing-masing Satker.

Strategi yang dilakukan dengan menambahkan RO layanan BMN terbukti efektif dalam meningkatkan capaian NKPA di Satker lingkup Badan P2SDM, hal ini terlihat dari terpenuhinya nilai penggunaan SBK dan Efisiensi SBK di seluruh Satker lingkup Badan P2SDM. Berdasarkan hasil penilaian, Badan P2SDM memperoleh NKPA Tahun 2024 sebesar 99,83 Poin. Terdapat 12 Satker yang memiliki NKPA sebesar 100, Pencapaian yang baik ini diperoleh karena seluruh target RO pada Satker tersebut telah tercapai dan penggunaan anggaran pada RO yang ditandai SBKU tidak melebihi standar. Adapun beberapa Satker yang tidak dapat memperoleh nilai 100 karena adanya alokasi anggaran yang terkena blokir *automatic adjustment* (AA) sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan untuk mencapai target kinerja. Rincian capaian NKPA pada masing-masing Satker lingkup Badan P2SDM sebagaimana tabel berikut.

No	Satker	NKPA	Efektivitas (75%)	Efisiensi (25%)	
				Penggunaan SBK (10%)	Efisiensi SBK (15%)
1	BPLHK Bogor	100	100	100	100
2	BPLHK PematangSiantar	100	100	100	100
3	BPLHK Pekanbaru	100	100	100	100
4	BPLHK Kadipaten	100	100	100	100
5	Pusdiklat SDM LHK	100	100	100	100
6	Pusat PGLHK	100	100	100	100
7	BPLHK Kupang	100	100	100	100
8	SMKK N Kadipaten	100	100	100	100
9	SMKK N Makassar	100	100	100	100
10	SMKK N Samarinda	100	100	100	100
11	SMKK N Pekanbaru	100	100	100	100
12	Kantor Pusat Badan P2SDM	100	100	100	100
13	BPLHK Samarinda	99,76	99,68	100	100
14	SMKK N Manokwari	99,4	99,2	100	100
15	BPLHK Makassar	97,92	97,22	100	100
	Rata-rata				

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. IKPA mencakup berbagai indikator penilaian meliputi Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Capaian Output dan Dispensasi SPM. Pengelolaan IKPA yang baik menunjukan bahwa pelaksanaan anggaran telah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah dalam hal efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Penilaian IKPA terdapat pada aplikasi OMSPAN untuk entitas Eselon I dan Satker. Badan P2SDM memperoleh nilai IKPA Tahun 2024 sebesar 97,98Poin. Capaian yang baik tersebut diperoleh dari kontribusi pencapaian IKPA yang baik di seluruh Satker lingkup Badan P2SDM. Nilai IKPA tertinggi diperoleh Satker BPLHK Bogor, BPLHK Kupang dan BPLHK Pekanbaru dengan capaian 100,00 Poin, sedangkan nilai IKPA terendah diperoleh SMKKN Manokwari dengan capaian 95,69 poin.

Secara umum pencapaian pada seluruh Indikator sudah cukup baik. Indikator yang masih perlu memperoleh perhatian untuk dapat ditingkatkan kinerjanya kedepan adalah pada Deviasi halaman III DIPA yang baru mencapai 95,49 Poin. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Satker diantaranya menentukan target penyerapan anggaran setiap bulannya secara lebih cermat dengan memperhatikan trend penyerapan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya dan melibatkan bidang teknis dalam menentukan target realisasi anggaran. Selain itu juga perlu adanya komitmen dari masing-masing pelaksana kegiatan untuk dapat melaksanakan kegiatan yang berimplikasi pada penyerapan anggaran dengan memperhatikan target yang telah disusun setiap bulannya.

No	Satker	Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (pengurang)	Nilai Akhir
1	BPLHK Bogor	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	0	100
2	BPLHK Pekanbaru	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	0	100
3	BPLHK Kupang	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	0	100
4	BPLHK PematangSiantar	100	100	98,58	100	100	100	100	99,72	100%	0	99,72
5	BPLHK Kadipaten	100	100	96,41	100	100	99,52	100	99,23	100%	0	99,23
6	SMKK N Samarinda	100	100	96,51	100	100	98,4	100	99,14	100%	0	99,14
7	SMKK N Kadipaten	100	100	95,86	100	100	97,18	100	98,89	100%	0	98,89
8	SMKK N Pekanbaru	100	94,1	95,66	98,4	100	100	100	98,09	100%	0	98,09
9	Kantor Pusat Badan P2SDM	100	93,12	94,5	100	100	98,02	100	97,67	100%	0	97,67
10	BPLHK Makassar	100	92,51	97,32	100	100	97,63	98,05	97,62	100%	0	97,62
11	BPLHK Samarinda	100	90,3	96,18	100	100	98,63	99,78	97,59	100%	0	97,59
12	Pusat PGLHK	100	91,8	94,86	100	100	98,13	100	97,55	100%	0	97,55
13	Pusdiklat SDM LHK	80	100	95,08	100	100	96,69	100	96,68	100%	0	96,68
14	SMKK N Makassar	100	91,04	89,51	94	100	98,41	100	95,8	100%	0	95,8
15	SMKK N Manokwari	100	79,53	96,83	100	100	95,32	99,44	95,69	100%	0	95,69
	Rata-rata											

Output dan Outcome

Output dari indikator kinerja ini yaitu tercapainya Nilai Kinerja Anggaran yang melebihi target yaitu sebesar 98,91 Poin. Outcome yang dihasilkan dari indikator kinerja ini adalah kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di lingkup Badan P2SDM yang tercermin dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pengelolaan anggaran ini turut meningkatkan akuntabilitas dan citra organisasi, sehingga membangun kepercayaan stakeholder terhadap pengelolaan sumber daya keuangan

Efektivitas

Pada tahun 2024, pencapaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik yaitu mencapai 98,91 poin (119,89% dari target). Pencapaian tersebut meningkat bila dibandikan dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 93,15 Poin. Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran yang memuaskan di Badan P2SDM didukung oleh berbagai faktor yang saling melengkapi. Salah satu faktor utama adalah adanya komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Badan P2SDM dalam mengawal kinerja perencanaan anggaran yang meliputi capaian output dan efisiensi SBK serta kinerja pelaksanaan anggaran yang meliputi konsistensi halaman III DIPA, pengelolaan keuangan dan kontrak serta penyerapan anggaran. Pengawalan terhadap nilai tersebut secara periodik juga menjadi faktor pemicu bagi Satker untuk meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu.

Efisiensi

Pencapaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran Badan P2SDM terhadap target sebesar 119,89% diperoleh dengan penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp 186.736.589.860 dari pagu anggaran Rp 192.371.234.000 (97,07%), sehingga berdasarkan hasil perhitungan, nilai efisiensi kinerja berada pada angka 0,81 dengan kategori efisien. Secara nyata, Badan P2SDM melakukan Upaya-Upaya efisiensi dalam Pencapaian NKA melalui pelaksanaan rapat-rapat monitoring kinerja secara hybrid dengan seluruh Satker lingkup Badan P2SDM pendampingan terhadap Satker melalui grup whatsapp maupun zoom, dll.

Kendala

Pencapaian kinerja yang baik pada indikator Nilai Kinerja Anggaran Badan P2SDM tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Beberapa kendala utama yang memengaruhi pencapaian ini antara lain:

- Adanya blokir anggaran melalui mekanisme *Automatic Adjustment* sehingga realisasi anggaran tidak terserap secara maksimal
- Penentuan target pencapaian anggaran pada halaman III DIPA yang belum optimal sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan

Upaya tindak Lanjut

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut yaitu mengarahkan Satker untuk dapat memperhatikan jadwal pelaksanaan kegiatan dalam menentukan RPD pada halaman III DIPA

Success Story

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) berasal dari penggabungan Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran (NPKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot masing-masing 50%. Berdasarkan perekaman data di aplikasi OMSPAN dan eMonev Anggaran.

Pada tahun 2024, terdapat beberapa Satker Badan P2SDM yang mendapatkan predikat mendapatkan predikat IKPA terbaik di wilayah KPPN setempat, seperti Pusat PGLHK, BPLHK Pekanbaru, BPLHK Bogor, BPLHK Kupang, dan BPLHK Kadip[aten. Hasil tersebut merupakan hasil dari kerja keras dan konsistensi pengeloaan anggaran dan kinerja di lingkup Badan P2SDM.

Dalam pengelolaan NKA, Badan P2SDM melakukan monitoring secara intensif terhadap pengelolaan NPKA dan IKPA di Satker lingkup Badan P2SDM melalui rapat rutin di setiap bulannya. Selain itu, koordinasi dan konsultasi dengan KKPN setempat juga sangat intensif dilakukan oleh Satker lingkup Badan P2SDM. Pengawalan secara berkala juga dilakukan oleh satker Badan P2SDM di lingkungan satker masing-masing melalui koordinasi dari setiap pengelola di satkernya.

NILAI KINERJA ANGGARAN TERBAIK KLHK 2024

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana anggaran yang telah disusun dan dialokasikan telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kinerja anggaran tidak hanya mengukur apakah anggaran tersebut digunakan sesuai dengan rencana, tetapi juga mengidentifikasi apakah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

E. Tantangan dan Rencana Kedepan

Tantangan

1. Adanya kebutuhan pengembangan kompetensi ASN secara terus menerus sesuai peraturan
2. Masih diperlukannya penyiapan SDM baik kualitas dan kuantitas sebagai implementasi UUCK
3. Pemanfaatan manajemen talenta di lingkungan Kementerian LHK masih terbatas
4. Terdapat 26 ribu KTH di Indonesia yang 90% nya masih dalam kategori pemula dengan NTE rendah
5. Penguatan portofolio lulusan SMK Kehutanan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri sektor LHK
6. Kebutuhan pengembangan generasi lingkungan secara terus menerus dalam mendukung isu lingkungan

Rencana Kedepan

F. Realisasi Anggaran

Trend Realisasi Anggaran

Berdasarkan aplikasi OMSPAN (perekaman tanggal 14 Januari 2025), pada Tahun 2024 Badan P2SDM dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp354.857.226.302,00 (93,32%) dari pagu anggaran sebesar Rp380.261.239.000,00. Presentase realisasi anggaran Badan P2SDM bulan Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 5,44% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penyerapan anggaran tidak dapat maksimal karena:

1. Terdapat alokasi anggaran yang terkena blokir Automatic Adjusment (AA) di lingkup Badan P2SDM sebesar Rp15.107.251.000 (3,97% dari pagu anggaran). Apabila tidak memperhitungkan anggaran yang terkena AA maka sesungguhnya presentase realisasi anggaran Badan P2SDM mencapai 97,18%
2. Terdapat sisa belanja modal Pembangunan kampus II SMK Kehutanan Negeri Manokwari sebesar 9.583.155.027,00 (2,52% dari pagu BP2SDM) yang tidak dapat terserap.

93,32%

Realisasi Tahun anggaran 2024

5,44%

Dibandingkan dengan bulan yang sama pada periode tahun 2023

Perbandingan trend realisasi anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebagaimana gambar berikut:

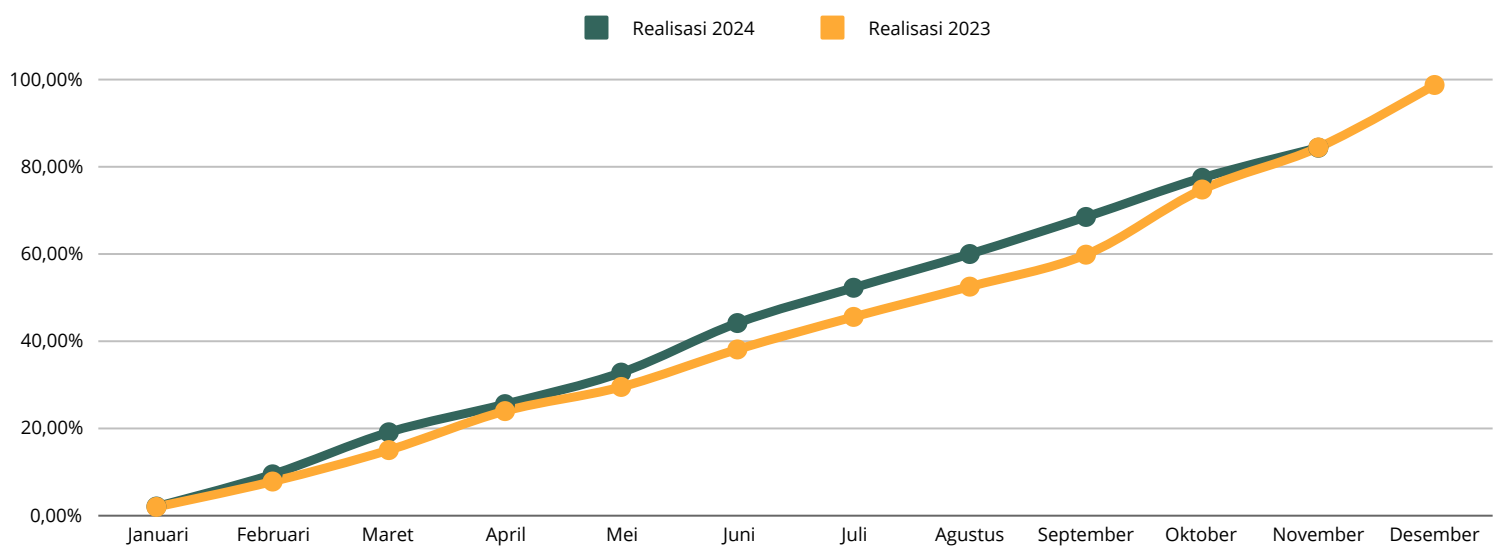

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2024	2,10%	9,47%	19,10%	25,55%	32,78%	44,13%	52,21%	59,94%	68,44%	77,40%	84,29%	93,32%
2023	2,01%	7,83%	15,04%	23,98%	29,52%	38,12%	45,58%	52,52%	59,85%	74,79%	84,43%	98,76%

Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

Proporsi anggaran terbesar Badan P2SDM pada Tahun 2024 berdasarkan jenis belanja yaitu belanja barang sebesar Rp184,15 Milyar kemudian belanja pegawai sebesar Rp125,84 Milyar dan belanja modal sebesar Rp70,26 Milyar. Hingga bulan Desember 2024, serapan anggaran pada belanja barang mencapai 94,09%, belanja pegawai mencapai 99,90% dan belanja modal mencapai 79,51%.

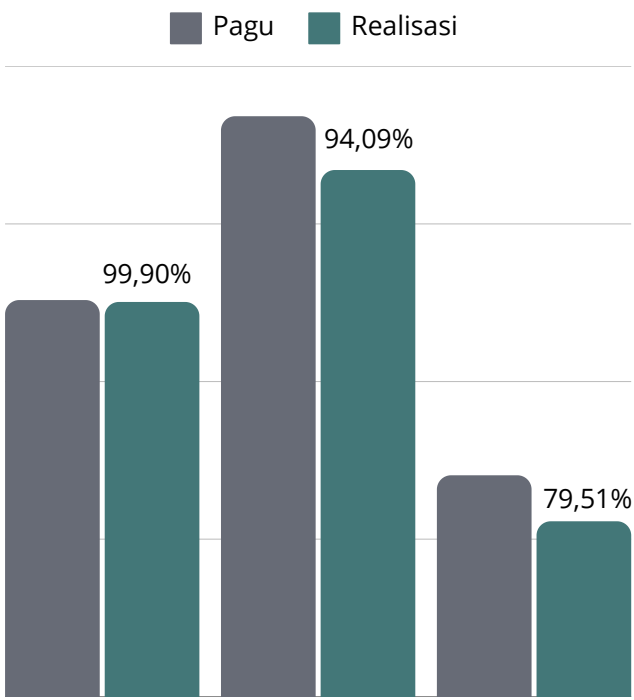

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Pagu	Rp125,84 M	Rp184,15 M	Rp70,26 M
Realisasi	Rp125,71 M	Rp173,28 M	Rp55,87 M

Realisasi Anggaran per Sumber Dana

Terdapat 3 jenis belanja yang menjadi sumber pendanaan Badan P2SDM yaitu Rupiah Murni sebesar Rp125,84 M, PNBP sebesar Rp184,15 M dan SBSN sebesar Rp70,26 M. Realisasi anggaran Tahun 2024 pada masing-masing sumber dana tersebut yaitu Rupiah Murni sebesar 94,18%, PNBP sebesar 99,60% dan SBSN sebesar 81,71%. Pencapaian anggaran dari sumber dana SBSN tidak dapat optimal karena Pencapaian anggaran dari sumber dana SBSN tidak dapat optimal karena penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan masa berakhir kontrak (hanya mencapai progres pembangunan 84,4%)

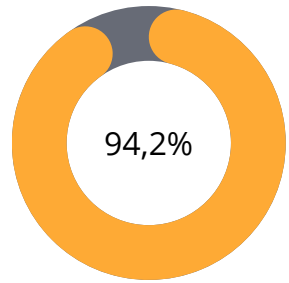

Rupiah Murni	
Pagu	Rp267,69 M
Realisasi	Rp252,12 M

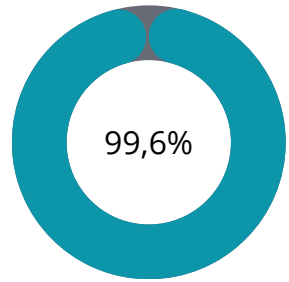

PNBP	
Pagu	Rp60,16 M
Realisasi	Rp59,92 M

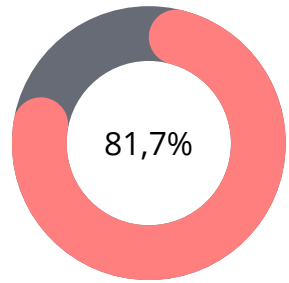

SBSN	
Pagu	Rp52,40 M
Realisasi	Rp42,82 M

Realisasi Anggaran per Satker

Realisasi anggaran Badan P2SDM termasuk sangat baik karena didukung oleh realisasi anggaran Satker lingkup Badan P2SDM yang sudah sangat baik dengan rentang realisasi terendah sebesar 84,63%% pada Satker SMKKN Manokwari dan realisasi tertinggi pada Satker BPLHK Pekanbaru sebesar 98,69%. Selengkapnya rincian realisasi anggaran per Satker lingkup Badan P2SDM sebagaimana tabel berikut:

No	Satker	Pagu	Blokir	Realisasi	%	% Tanpa Blokir
1	Kantor Pusat BP2SDM	56.818.311.000	2.138.399.000	54.619.284.304	96,13%	99,89%
2	Pusat Diklat SDM LHK	41.517.369.000	1.485.200.000	39.991.954.584	96,33%	99,90%
3	Pusat PGLHK	17.752.604.000	412.392.000	17.324.721.451	97,59%	99,91%
4	BPLHK Bogor	14.801.527.000	212.655.000	14.588.830.805	98,56%	100,00%
5	BPLHK Pematangsiantar	13.397.884.000	210.083.000	13.175.060.568	98,34%	99,90%
6	BPLHK Samarinda	12.733.828.000	214.311.000	12.512.175.532	98,26%	99,94%
7	BPLHK Makassar	14.277.062.000	219.133.000	14.057.737.061	98,46%	100,00%
8	BPLHK Pekanbaru	14.384.704.000	187.279.000	14.196.232.268	98,69%	99,99%
9	BPLHK Kadipaten	15.829.434.000	216.408.000	15.613.003.067	98,63%	100,00%
10	BPLHK Kupang	13.521.694.000	205.416.000	13.316.220.899	98,48%	100,00%
11	SMKKN Manokwari	71.529.371.000	1.082.926.000	60.536.502.645	84,63%	85,93%
12	SMKKN Kadipaten	23.988.877.000	2.129.687.000	21.753.678.655	90,68%	99,52%
13	SMKKN Makassar	22.667.320.000	2.130.430.000	20.529.016.708	90,57%	99,96%
14	SMKKN Samarinda	22.505.895.000	2.130.442.000	20.375.213.584	90,53%	100,00%
15	SMKKN Pekanbaru	24.535.359.000	2.132.490.000	22.267.594.171	90,76%	99,40%
	Badan P2SDM	380.261.239.000	15.107.251.000	354.857.226.302	93,32%	97,18%

4

PENUTUP

Perolehan rata-rata kinerja Badan P2SDM pada Tahun 2024 dari 7 Indikator Kinerja yang diperjanjikan mencapai 112,48%. Pencapaian tersebut didukung oleh penggunaan anggaran sebesar Rp354.857.226.302,00 dari pagu Rp380.261.239.000,00 atau sebesar 93,32%. Berdasarkan data tersebut, efisiensi kinerja Badan P2SDM pada Tahun 2024 mencapai 0,83 yang tergolong dalam kategori efisien. Hal ini menunjukan bahwa Badan P2SDM telah menunjukan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pencapaian kinerja pada Tahun 2024 ini meningkat bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja Tahun 2023 yang sebesar 109,61% sehingga menghasilkan nilai efektivitas kinerja sebesar 1,03 yang termasuk dalam kategori efektif. Pencapaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa komitmen terhadap perbaikan kinerja dan inovasi-inovasi terus dijalankan untuk meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun. Hal ini juga mencerminkan upaya berkelanjutan Badan P2SDM dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Prinsip *Good Governance*, khususnya akuntabilitas dan transparansi, senantiasa menjadi landasan dalam pengelolaan kegiatan dan pelaporan, sebagaimana tercermin dalam Laporan Kinerja yang disusun.

Keberhasilan yang dicapai Tahun 2024 tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk jajaran internal Badan P2SDM dan pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, penghargaan dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian target dan pelaksanaan tugas sepanjang tahun 2024.

Seiring dengan perubahan kelembagaan Badan P2SDM yang semula berada dalam bagian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan, Badan P2SDM siap menyesuaikan diri dengan dinamika dan tantangan baru yang mungkin muncul. Dalam perubahan ini, peran Badan P2SDM menjadi semakin terfokus untuk memastikan penguatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan, peningkatan kualitas penyuluhan kehutanan dalam mendukung pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Badan P2SDM berkomitmen untuk mendorong keberhasilan perubahan ini melalui peningkatan kolaborasi, inovasi, dan optimalisasi sumber daya yang ada.

Semoga laporan ini tidak hanya menjadi refleksi atas capaian kinerja tahun 2024, tetapi juga menjadi pijakan untuk memperbaiki perencanaan kinerja guna menentukan langkah-langkah strategis di masa mendatang. Masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami hargai untuk mendukung kelancaran proses transisi kelembagaan dan peningkatan kinerja.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari seluruh pihak. Semoga kerja keras yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi keberlanjutan sektor kehutanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Revisi Kepala Badan P2SDM dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. A. PALGUNA RUTEKA
Jabatan : KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : RAJA JULI ANTONI, MA., Ph.D.
Jabatan : MENTERI KEHUTANAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua selaku pengampu BA.029 TA.2024 akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua,

RAJA JULI ANTONI, MA., Ph.D.

Pihak Pertama,

Drs. A. PALGUNA RUTEKA
NIP. 19650924 199303 1 001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Program : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

No.	Sasaran Program	Sasaran UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Target	
				Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a.	Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan	Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	0,5 Triliun Rupiah	0,5 Triliun Rupiah

Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

No.	Sasaran Program	Sasaran UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Target	
				Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a.	Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas	Meningkatnya kapasitas SDM lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	14.915 Orang	15.536 Orang
			Jumlah lulusan SMK kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	491 Orang	491 Orang
			Indeks efektifivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	70 Poin	70 Poin
			Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup	3.368 Lembaga	3.368 Lembaga

Program : **Dukungan Manajemen**

No.	Sasaran Program	Sasaran UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Target	
				Semula	Menjadi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
a.	Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	80 Poin	80 Poin
			Nilai Kinerja Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	97,25 Poin	82,5 Poin

Catatan:

1. Terdapat perubahan metode pengukuran Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran.
2. Terdapat anggaran terblokir sebesar Rp15.107.251.000,- dikarenakan Kebijakan Nasional *Automatic Adjustment* dan Penghematan Perjalanan Dinas

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	
		Semula	Menjadi
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	**Rp190.134.415.000,-**	**Rp182.566.398.000,-**
1.	Perencanaan dan Pengembangan SDM		
2.	Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK		
3.	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan		
4.	Pengembangan Generasi LHK		
	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**Rp5.538.607.000,-**	**Rp5.323.607.000,-**
5.	Peningkatan Penyuluhan		
	Program Dukungan Manajemen	**Rp181.944.569.000,-**	**Rp192.371.234.000,-**
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.		
	Jumlah	**Rp377.617.591.000,-**	**Rp380.261.239.000,-**

Jakarta, Desember 2024

MENTERI KEHUTANAN
SELAKU PENGAMPU BA.029 TA.2024 PADA MASA TRANSISI

RAJA JULI ANTONI, MA., Ph.D.

KEPALA BADAN
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Drs. A. PALGUNA RUTEKA
NIP. 19650924 199303 1 001

Lampiran 2. Pelatihan SDM Aparatur, Non Aparatur dan Vokasi Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha

No	Nama RO / Nama Pelatihan	Realisasi	Metode Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Satker Penyelenggara	Sumber Pembiayaan
	6745.DCE.001 Pelatihan SDM Aparatur yang ditingkatkan	**3683**				
1	PELATIHAN KOMPETENSI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) TIPE C (APBN + Kerjasama Biro Umum)	248	E-learning	13/05/2024 s/d 11/07/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
2	ToF Internalisasi Nilai BerAKHLAK	62	Klasikal	27/02/2024 s/d 28/02/2024	PUSDIKLAT	APBN
3	TOF Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi SDM LHK	105	Klasikal	12/02/2024 s/d 22/02/2024	PUSDIKLAT	APBN
4	NILAI EKONOMI KARBON DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION	38	Klasikal	19/02/2024 s/d 23/02/2024	PUSDIKLAT	APBN
5	Diklat Pembentukan (Reguler) Polisi Kehutanan Tahun 2024	263	Klasikal	19/02/2024 s/d 01/04/2024	PUSDIKLAT	APBN
6	TOT Pelatihan Perhitungan Karbon Hutan dan Penyusunan Dokumen Aksi Mitigasi Tahun 2024	40	Klasikal	01/04/2024 s/d 05/04/2024	PUSDIKLAT	APBN
7	Pelatihan inventarisasi Hutan Nasional (2.0) Angkatan 1	40	Klasikal	05/08/2024 s/d 13/08/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
8	Pelatihan Inventarisasi Hutan Nasional (2.0) Angkatan 2	39	Klasikal	19/08/2024 s/d 27/08/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
9	Pelatihan Inventarisasi Hutan Nasional (2.0) Angkatan 3	39	Klasikal	02/09/2024 s/d 10/09/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
10	Pelatihan Satuan Polisi Reaksi Cepat (SPORC)	100	Klasikal	02/09/2024 s/d 16/10/2024	PUSDIKLAT	APBN
11	Pelatihan Dasar Amdal APBN + Kerjasama dengan DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Angkatan 3	20	Klasikal	30/09/2024 s/d 04/10/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
12	Pelatihan Dasar Amdal APBN + Kerjasama dengan DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Angkatan 4	20	Klasikal	07/10/2024 s/d 11/10/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
13	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan bagi Masyarakat Berkesadaran Hukum	40	Klasikal	22/10/2024 s/d 24/10/2024	PUSDIKLAT	APBN

No	Nama RO / Nama Pelatihan	Realisasi	Metode Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Satker Penyelenggara	Sumber Pembiayaan
14	PEDAL angkatan I	30	Blanded Learning	04/03/2024 s/d 15/03/2024	PUSDIKLAT	APBN
15	PEDAL angkatan II	30	Blanded Learning	18/03/2024 s/d 27/03/2024	PUSDIKLAT	APBN
16	PEH Terampil Angkatan I	30	Blanded Learning	19/03/2024 s/d 28/03/2024	PUSDIKLAT	APBN
17	Pelatihan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	29	Blanded Learning	18/03/2024 s/d 26/03/2024	PUSDIKLAT	APBN
18	Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level-1	40	Blanded Learning	20/03/2024 s/d 26/04/2024	PUSDIKLAT	APBN
19	Pelatihan Penilaian Sumber Benih Tanaman Hutan	36	Blanded Learning	25/04/2024 s/d 03/05/2024	PUSDIKLAT	APBN
20	PEDAL Angkatan III	29	Blanded Learning	13/05/2024 s/d 22/05/2024	PUSDIKLAT	APBN
21	PEH Terampil Angkatan 2	30	Blanded Learning	16/05/2024 s/d 30/05/2024	PUSDIKLAT	APBN
22	pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah level 1 Angkatan 2	40	Blanded Learning	03/06/2024 s/d 21/06/2024	PUSDIKLAT	APBN
23	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 1	40	Blanded Learning	27/02/2024 s/d 18/07/2024	PUSDIKLAT	APBN
24	Pelatihan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama Angk I	30	Blanded Learning	08/07/2024 s/d 18/07/2024	PUSDIKLAT	APBN
25	Pelatihan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama Angkatan II	30	Blanded Learning	15/08/2024 s/d 31/08/2024	PUSDIKLAT	APBN
26	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I	38	Blanded Learning	01/04/2024 s/d 16/08/2024	PUSDIKLAT	APBN
27	Pelatihan Dasar bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Angkatan 1	38	Blanded Learning	02/09/2024 s/d 21/09/2024	PUSDIKLAT	APBN
28	Pelatihan Dasar bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Angkatan 2	38	Blanded Learning	02/09/2024 s/d 21/09/2024	PUSDIKLAT	APBN
29	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 2	40	Blanded Learning	13/05/2024 s/d 13/09/2024	PUSDIKLAT	APBN
30	PPLH angkatan III	39	Blanded Learning	07/10/2024 s/d 25/10/2024	PUSDIKLAT	APBN

No	Nama RO / Nama Pelatihan	Realisasi	Metode Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Satker Penyelenggara	Sumber Pembiayaan
31	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II	38	Blanded Learning	11/06/2024 s/d 11/10/2024	PUSDIKLAT	APBN
32	Pelatihan Dasar bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Angkatan 4	36	Blanded Learning	07/10/2024 s/d 01/11/2024	PUSDIKLAT	APBN
33	Pelatihan Dasar bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Angkatan 5	49	Blanded Learning	04/11/2024 s/d 22/11/2024	PUSDIKLAT	APBN
34	Pelatihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	30	E-learning	13/05/2024 s/d 18/05/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
35	Pelatihan Penggunaan Drone untuk Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Angkatan 1	28	Klasikal	27/02/2024 s/d 01/03/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN
36	Pelatihan Penggunaan Drone Untuk Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Angkatan II	32	Klasikal	07/03/2024 s/d 10/03/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN
37	Pelatihan Penggunaan Drone untuk bidang lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024	20	Klasikal	27/05/2024 s/d 31/05/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
38	Pembentukan PEH	19	Klasikal	06/06/2024 s/d 15/06/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
39	PELATIHAN TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KARBON TAHUN 2024	30	Klasikal	01/08/2024 s/d 17/08/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN
40	Pelatihan Penilaian AMDAL dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup	27	Klasikal	18/08/2024 s/d 23/08/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN
41	Perhitungan Karbon Hutan dan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Mitigasi	30	Klasikal	01/07/2024 s/d 06/07/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
42	Operasi Pengamanan Tumbuhan dan Satwa Liar	30	Blanded Learning	08/07/2024 s/d 19/07/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
43	Pelatihan Teknik Dalkarhutla Bagi Manggala Agni 2 (Fire Crew 2)	40	Klasikal	13/05/2024 s/d 21/05/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
44	Pelatihan SIG Berbasis Ponsel	40	Klasikal	18/05/2024 s/d 21/05/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
45	Pengambilan Contoh Uji Air	30	Klasikal	15/07/2024 s/d 19/07/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
46	Valuasi Ekonomi SDA	30	Blanded Learning	05/06/2024 s/d 13/06/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
47	Pelatihan Fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	28	E-learning	18/03/2024 s/d 03/04/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN

No	Nama RO / Nama Pelatihan	Realisasi	Metode Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Satker Penyelenggara	Sumber Pembiayaan
48	Pelatihan Teknik Timber Cruising pada Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)	26	E-learning	07/08/2024 s/d 13/08/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
49	Pelatihan Pembuatan Kontur dan Peta Sebaran Pohon pada PBPH-HA	30	E-learning	31/07/2024 s/d 06/08/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
50	Pelatihann Penilaian Mutu Bibit Tanaman Hutan	32	Klasikal	23/04/2024 s/d 27/04/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
51	Penilaian Sumber Benih Tanaman Hutan	30	Klasikal	13/05/2024 s/d 18/05/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
52	Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni (Fire Crew 1)	40	Klasikal	06/08/2024 s/d 13/08/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
53	DASAR-DASAR PENYULUHAN BAGI FUNGSIONAL PENYULUH	9	Klasikal	21/10/2024 s/d 09/11/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
54	PERENCAÑAAN KPH	19	Klasikal	20/10/2024 s/d 16/11/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
55	Pelatihan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Ahli Pertama	30	Blanded Learning	12/02/2024 s/d 24/02/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
56	Perlindungan dan Pengamanan Hutan Bagi Polisi Kehutanan	29	Blanded Learning	26/08/2024 s/d 13/09/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
57	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	21	Blanded Learning	02/09/2024 s/d 26/09/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
58	Pelatihan SIG Berbasis Ponsel Angkatan 1	30	E-learning	16/07/2024 s/d 22/07/2024	BPLHK KUPANG	APBN
59	Pelatihan SIG Berbasis Ponsel Angkatan 2	30	E-learning	26/08/2024 s/d 30/08/2024	BPLHK KUPANG	APBN
60	Pemanfaatan Wisata Alam	30	E-learning	09/07/2024 s/d 15/07/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
61	Penginderaan Jauh	30	E-learning	23/07/2024 s/d 26/07/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
62	Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (APBN + Kerjasama dengan BKPSDM Kab. Cirebon)	1059	Klasikal	29/04/2024 s/d 08/05/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN + Kerjasama
63	Pelatihan pengelolaan analisis data dan pelaporan	29	E-learning	10/06/2024 s/d 14/06/2024	BPLHK BOGOR	APBN
64	Pelatihan Teknik Investigasi Penegakan Hukum Model PEACE	31	Klasikal	09/09/2024 s/d 12/09/2024	BPLHK BOGOR	APBN

No	Nama RO / Nama Pelatihan	Realisasi	Metode Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Satker Penyelenggara	Sumber Pembiayaan
	6745.SCE.001 Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan	**2507**				
1	Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Amdal APBN + Kerjasama LPP Wana Wiyata	30	E-learning	22/01/2024 s/d 27/01/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
2	Pelatihan Dasar Amdal APBN + Kerjasama dengan Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Andalas	16	E-learning	24/01/2024 s/d 30/01/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
3	Pelatihan Dasar Amdal APBN + Kerjasama dengan Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Sekolah Ilmu Lingkungan	14	E-learning	26/02/2024 s/d 01/03/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
4	Pelatihan Dasar Amdal APBN + Kerjasama dengan Pusat Studi Lingkungan Universitas Gadjah Mada Angkatan I	30	E-learning	26/02/2024 s/d 01/03/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
5	Pelatihan Dasar Amdal APBN + Kerjasama dengan PT Eco Edu Indonesia	29	E-learning	27/02/2024 s/d 05/03/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
6	Pelatihan Dasar Amdal APBN + Kerjasama dengan UNS	22	E-learning	22/04/2024 s/d 26/04/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
7	Pelatihan Dasar Amdal APBN + Kerjasama dengan Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada	60	E-learning	22/04/2024 s/d 27/04/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
8	Pelatihan Dasar Amdal APBN + Kerjasama dengan PT Eco Edu Indonesia Angkatan II	30	E-learning	23/05/2024 s/d 05/06/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
9	Pelatihan Dasar Amdal pada PT Inka Lingkungan Indonesia (PT INKALINDO)	27	E-learning	03/06/2024 s/d 08/06/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
10	Pelatihan Dasar Amdal Angkatan II Tahun 2024 APBN + Kerjasama Pusat Diklat SDM LHK dengan LPP Wana Wiyata	23	E-learning	10/06/2024 s/d 15/06/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
11	Pelatihan Dasar Amdal APBN + Kerjasama dengan Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada	30	E-learning	12/06/2024 s/d 21/06/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
12	Pelatihan Dasar Amdal APBN + Kerjasama dengan LPK AMI	30	E-learning	30/01/2024 s/d 06/02/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
13	Pelatihan Dasar Amdal APBN + Kerjasama dengan PT. Inka Lingkungan Indonesia (INKALINDO)	30	E-learning	19/02/2024 s/d 24/02/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
14	Pelatihan Dasar Amdal APBN + Kerjasama dengan LPK Amanah Mandiri Internasional	30	E-learning	26/03/2024 s/d 03/04/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
15	Pelatihan Dasar AMDAL APBN + Kerjasama dengan IPB Training	16	E-learning	22/04/2024 s/d 27/04/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
16	Pelatihan Dasar Amdal APBN + Kerjasama dengan PSLH ITB	29	E-learning	08/07/2024 s/d 12/07/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama

No	Nama RO / Nama Pelatihan	Realisasi	Metode Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Satker Penyelenggara	Sumber Pembiayaan
17	Pelatihan Dasar Amdal APBN + Kerjasama dengan PSLH ITB	29	E-learning	19/08/2024 s/d 23/08/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
18	Pelatihan Dasar Amdal APBN + Kerjasama dengan Pusat Studi Lingkungan Universitas Gadjah Mada Angkatan II	11	Klasikal	26/02/2024 s/d 01/03/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
19	Pelatihan Dasar Amdal APBN + Kerjasama dengan Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada	17	Klasikal	18/03/2024 s/d 22/03/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
20	Pelatihan Penyusunan Amdal APBN + Kerjasama dengan PT Inka Lingkungan Indonesia (PT INKALINDO)	30	Klasikal	13/05/2024 s/d 18/05/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
21	Pelatihan Dasar Amdal APBN + Kerjasama dengan Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada	60	Klasikal	27/05/2024 s/d 01/06/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
22	Penilaian Amdal dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup APBN + Kerjasama dengan Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada	30	Klasikal	03/06/2024 s/d 15/06/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
23	Pengenalan Jenis Kayu	32	Klasikal	16/04/2024 s/d 20/04/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
24	Pelatihan Dasar Amdal APBN + Kerjasama dengan PSLH ITB	20	Klasikal	02/09/2024 s/d 06/09/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
25	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bagi Masyarakat Peduli Api Berkesadaran Hukum	40	Klasikal	22/10/2024 s/d 24/10/2024	PUSDIKLAT	APBN
26	Pelatihan Penyusunan Amdal APBN + Kerjasama dengan Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Sekolah Ilmu Lingkungan	24	Blanded Learning	19/02/2024 s/d 15/03/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
27	Pelatihan Penyusunan Amdal APBN + Kerjasama dengan LPK AMI Angkatan I (Kelas A)	30	Blanded Learning	21/02/2024 s/d 18/03/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
28	Pelatihan Penyusunan Amdal APBN + Kerjasama dengan LPK AMI Angkatan II (Kelas B)	30	Blanded Learning	21/02/2024 s/d 18/03/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
29	Pelatihan Pembentukan Tenaga Teknis Lapangan Rehabilitasi Mangrove dan pelantikan kerangka pengaman sosial Tahun 2024	127	Blanded Learning	15/03/2024 s/d 24/03/2024	PUSDIKLAT	APBN + Kerjasama
30	Pelatihan Pembuatan Rancangan Agroforestri	25	E-learning	16/12/2024 s/d 18/12/2024	BPLHK BOGOR	APBN
31	Pelatihan pemandu wisata alam	40	Klasikal	13/05/2024 s/d 17/05/2024	BPLHK BOGOR	APBN
32	Pelatihan materi dan metode penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis ponsel	40	Klasikal	20/08/2024 s/d 23/08/2024	BPLHK BOGOR	APBN

No	Nama RO / Nama Pelatihan	Realisasi	Metode Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Satker Penyelenggara	Sumber Pembiayaan
33	Pelatihan Rencana Kelola Perhutanan Sosial	40	Klasikal	13/08/2024 s/d 16/08/2024	BPLHK BOGOR	APBN
34	Pelatihan Pemasaran produk multiusaha kehutanan	40	Klasikal	10/09/2024 s/d 13/09/2024	BPLHK BOGOR	APBN
35	Pelatihan Penggunaan Drone untuk Bidang LHK	15	Klasikal	11/11/2024 s/d 15/11/2024	BPLHK BOGOR	APBN
36	Sistem Informasi Geografis Berbasis Ponsel	40	E-learning	18/03/2024 s/d 21/03/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
37	Pelatihan Teknik Pengolahan Bambu	40	Klasikal	20/02/2024 s/d 23/02/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
38	Pemetaan Partisipatif Sumberdaya Wilayah	40	Klasikal	17/09/2024 s/d 20/09/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
39	Teknik Pencegahan Karhutla Bagi MPA	40	Klasikal	28/10/2024 s/d 31/10/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
40	Teknik Pencegahan Karhutla MPA	31	Klasikal	08/10/2024 s/d 11/12/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN + Kerjasama
41	Interpreter Wisata Alam	10	Klasikal	12/11/2024 s/d 15/12/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
42	SIG Berbasis Ponsel	40	E-learning	20/03/2024 s/d 25/03/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
43	Resolusi Konflik Sumber Daya Alam	40	E-learning	20/03/2024 s/d 25/03/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
44	Pelatihan Masyarakat Peduli Api (MPA) Berkesadaran Hukum	40	Klasikal	13/05/2024 s/d 16/05/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
45	Pelatihan Penggunaan Drone Bidang LHK	40	Klasikal	13/05/2024 s/d 16/05/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
46	Pelatihan GANIS PH Pembinaan Hutan	10	Klasikal	16/01/2024 s/d 05/02/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN + Kerjasama
47	Pelatihan GANIS PH Pengukuran dan Perpetaan Hutan	13	Klasikal	16/01/2024 s/d 07/02/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN + Kerjasama
48	Pelatihan GANIS PH PKB Angkatan I	21	Klasikal	17/09/2024 s/d 04/10/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN + Kerjasama
49	Pembuatan Pupuk Bokashi Angkatan 5	40	E-learning	05/08/2024 s/d 08/08/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN

No	Nama RO / Nama Pelatihan	Realisasi	Metode Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Satker Penyelenggara	Sumber Pembiayaan
50	Usaha dan Budidaya dan Pengolahan Jamur Tiram	30	Blanded Learning	10/06/2024 s/d 13/07/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
51	Budidaya Lebah Madu Kelulut (Trigona Sp) Angkatan 3	30	Blanded Learning	08/07/2024 s/d 11/07/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
52	Teknik Pencegahan Karhutla Bagi MPA Angkatan 1	30	Blanded Learning	05/08/2024 s/d 09/08/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
53	Teknik Pencegahan Karhutla Bagi MPA Angkatan 2	30	Blanded Learning	12/08/2024 s/d 16/08/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
54	Pelatihan Pembuatan Asap Cair/Cuka Kayu dan Briket Arang	40	Klasikal	20/02/2024 s/d 23/03/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN
55	Pelatihan Teknik Agroforestry	40	Klasikal	27/02/2024 s/d 01/03/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN
56	Pelatihan Pembentukan Petugas Pengendalian Kebakaran dan Hutan	20	Klasikal	15/02/2024 s/d 19/02/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
57	Pelatihan Fire Crew 1 PT. INDUSTRIAL FOREST PLANTATION	26	Klasikal	02/05/2024 s/d 09/05/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
58	PENGENALAN JENIS POHON	40	Klasikal	24/06/2024 s/d 29/06/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN
59	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew 1) PT Santan Borneo Abadi	40	Klasikal	17/07/2024 s/d 23/07/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
60	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew 1) PT. Mahakam Permata Sakti	36	Klasikal	25/07/2024 s/d 31/07/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
61	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew) Angkatan 3 PT. Inhutani Unit 1 Long Nah	40	Klasikal	02/08/2024 s/d 08/08/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
62	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew) Angkatan 4 PT. Permata Hijau Khatulistiwa	40	Klasikal	10/08/2024 s/d 16/08/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
63	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew) Angkatan 5 PT. Permata Borneo Abadi	40	Klasikal	18/08/2024 s/d 24/08/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
64	Pelatihan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew 1) Angkatan 6 PT. Bakayan jaya Abadi	27	Klasikal	28/08/2024 s/d 04/09/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama

No	Nama RO / Nama Pelatihan	Realisasi	Metode Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Satker Penyelenggara	Sumber Pembiayaan
65	Pelatihan Pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni 1 (fire Crew 1) Angkatan 7 PT. Darma Hutani Makmur	40	Klasikal	09/09/2024 s/d 16/09/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
66	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan Bagi Manggala Agni 2 (Fire Crew 2) BPBD Mahulu	18	Klasikal	23/09/2024 s/d 30/09/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
67	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni I (BKSDA Bali)	20	Klasikal	01/04/2024 s/d 06/04/2024	BPLHK KUPANG	APBN + Kerjasama
68	Penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial	40	Blanded Learning	26/02/2024 s/d 03/03/2024	BPLHK KUPANG	APBN
69	Pelatihan Pemasaran Produk Multi Usaha Kehutanan	40	Blanded Learning	18/04/2024 s/d 25/04/2024	BPLHK KUPANG	APBN
70	Pelatihan Pencegahan dan Pemadaman Karhutla	40	Blanded Learning	15/07/2024 s/d 20/07/2024	BPLHK KUPANG	APBN
71	Pelatihan Pemasaran Produk Multiusaha Kehutanan Angkatan 5	40	Blanded Learning	16/07/2024 s/d 20/07/2024	BPLHK KUPANG	APBN
72	Pelatihan Asesmen Konflik Tenurial Kawasasn Hutan	39	Blanded Learning	26/08/2024 s/d 31/08/2024	BPLHK KUPANG	APBN + Kerjasama
73	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni I (BTN Bali Barat)	30	Blanded Learning	25/07/2024 s/d 02/08/2024	BPLHK KUPANG	APBN + Kerjasama
74	Dasar Amdal Angkatan I	20	E-learning	19/03/2024 s/d 26/03/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
75	Dasar Amdal Angkatan II	20	E-learning	28/03/2024 s/d 05/04/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
76	Pelatihan Aplikasi GNSS untuk Survei dan Pemetaan	40	Klasikal	20/02/2024 s/d 23/02/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
77	TEKNIK PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BAGI MASYARAKAT PEDULI API	40	Klasikal	19/03/2024 s/d 23/03/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
	6745.SCE.002 Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	**3140**				
1	Bimbingan Teknis Pengolahan Sampah Organik untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly (BSF) bagi Masyarakat Angkatan I	40	Klasikal	12/06/2024 s/d 12/06/2024	PUSDIKLAT	APBN
2	Bimbingan Teknis Pengolahan Sampah Organik untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly (BSF) bagi Masyarakat Angkatan II	40	Klasikal	12/06/2024 s/d 12/06/2024	PUSDIKLAT	APBN

No	Nama RO / Nama Pelatihan	Realisasi	Metode Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Satker Penyelenggara	Sumber Pembiayaan
3	Bimbingan Teknis Agroforestri bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Madiun	80	Klasikal	20/07/2024 s/d 20/07/2024	PUSDIKLAT	APBN
4	Bimbingan teknis pengelolaan sampah organik untuk budidaya Maggot BSF di Jombang	80	Klasikal	28/07/2024 s/d 28/07/2024	PUSDIKLAT	APBN
5	Pengelolaan Sampah untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly (BSF) Angkatan I	40	Klasikal	06/09/2024 s/d 06/09/2024	PUSDIKLAT	APBN
6	Pengelolaan Sampah untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly (BSF) Angkatan II	40	Klasikal	06/09/2024 s/d 06/09/2024	PUSDIKLAT	APBN
7	Pelatihan Teknik Pengolahan Bambu Angkatan 1	40	Klasikal	19/02/2024 s/d 22/02/2024	BPLHK BOGOR	APBN
8	Pelatihan Teknik Pembuatan Pupuk Bokashi Angkatan 1	40	Klasikal	19/02/2024 s/d 22/02/2024	BPLHK BOGOR	APBN
9	Pelatihan Pemanfaatan Wisata Alam Angkatan 1	40	Klasikal	20/02/2024 s/d 23/02/2024	BPLHK BOGOR	APBN
10	Pelatihan Pemanfaatan Wisata Alam Angkatan 2	40	Klasikal	27/02/2024 s/d 01/03/2024	BPLHK BOGOR	APBN
11	Pelatihan SIG Berbasis Ponsel Angkatan 1	40	Klasikal	27/02/2024 s/d 01/03/2024	BPLHK BOGOR	APBN
12	Pelatihan Teknik Pengolahan Bambu Angkatan 2	40	Klasikal	23/04/2024 s/d 26/04/2024	BPLHK BOGOR	APBN
13	Pelatihan Teknik Pembuatan Pupuk Bokashi Angkatan 2	40	Klasikal	23/04/2024 s/d 26/04/2024	BPLHK BOGOR	APBN
14	Pelatihan SIG Berbasis Ponsel Angkatan 2	40	Klasikal	23/04/2024 s/d 26/04/2024	BPLHK BOGOR	APBN
15	Pelatihan Teknik Pengolahan Bambu Angkatan 3	40	Klasikal	14/05/2024 s/d 17/05/2024	BPLHK BOGOR	APBN
16	Pelatihan Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Angkatan 1	40	Klasikal	14/05/2024 s/d 17/05/2024	BPLHK BOGOR	APBN
17	Pelatihan Pemanfaatan Wisata Alam Angkatan 3	40	Klasikal	11/06/2024 s/d 14/06/2024	BPLHK BOGOR	APBN
18	Pelatihan Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Angkatan 2	40	Klasikal	11/06/2024 s/d 14/06/2024	BPLHK BOGOR	APBN
19	Pelatihan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL)	20	Klasikal	04/06/2024 s/d 10/06/2024	BPLHK BOGOR	APBN + Kerjasama

No	Nama RO / Nama Pelatihan	Realisasi	Metode Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Satker Penyelenggara	Sumber Pembiayaan
	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Kelompok Getah					
20	Pelatihan Pemanfaaatan Wisata Alam Angkatan 4	40	Klasikal	16/07/2024 s/d 19/07/2024	BPLHK BOGOR	APBN
21	Pelatihan Teknik Pembuatan Pupuk Bokashi Angkatan 3	40	Klasikal	09/07/2024 s/d 12/07/2024	BPLHK BOGOR	APBN
22	Pelatihan Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Angkatan 3	40	Klasikal	16/07/2024 s/d 19/07/2024	BPLHK BOGOR	APBN
23	Pelatihan SIG Berbasis Ponsel Angkatan 3	40	Klasikal	16/07/2024 s/d 19/07/2024	BPLHK BOGOR	APBN
24	Pelatihan Teknik Agroforestri Angkatan 1	40	Klasikal	31/07/2024 s/d 03/08/2024	BPLHK BOGOR	APBN
25	Pelatihan Teknik Agroforestri Angkatan 2	40	Klasikal	13/08/2024 s/d 15/08/2024	BPLHK BOGOR	APBN
26	Pelatihan Teknik Pengolahan Bambu Angkatan 4	40	Klasikal	13/07/2024 s/d 16/08/2024	BPLHK BOGOR	APBN
27	Pelatihan Pembuatan Pupuk Bokashi Angkatan 4	40	Klasikal	18/09/2024 s/d 21/09/2024	BPLHK BOGOR	APBN
28	Pelatihan SIG Berbasis Ponsel Angkatan 4	40	Klasikal	18/09/2024 s/d 21/09/2024	BPLHK BOGOR	APBN
29	Pelatihan Pemanfaatan Wisata Alam Angkatan 5	40	Klasikal	08/10/2024 s/d 11/10/2024	BPLHK BOGOR	APBN
30	Pelatihan Teknik Pengolahan Bambu Angkatan 5	40	Klasikal	08/10/2024 s/d 11/10/2024	BPLHK BOGOR	APBN
31	Pelatihan Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Angkatan 4	40	Klasikal	15/10/2024 s/d 18/10/2024	BPLHK BOGOR	APBN
32	Pelatihan Pembuatan Pupuk Bokashi Angkatan 5	40	Klasikal	29/10/2024 s/d 01/11/2024	BPLHK BOGOR	APBN
33	Pelatihan SIG Berbasis Ponsel Angkatan 5	40	Klasikal	29/10/2024 s/d 01/11/2024	BPLHK BOGOR	APBN
34	Pembinaan KTH Responsif Gender	40	E-learning	20/02/2024 s/d 23/02/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
35	Interpreter Wisata Alam	40	E-learning	15/05/2024 s/d 20/05/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN

No	Nama RO / Nama Pelatihan	Realisasi	Metode Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Satker Penyelenggara	Sumber Pembiayaan
36	Pembinaan KTH Responsif Gender	40	E-learning	11/06/2024 s/d 14/06/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
37	Pemasaran Produk Multiusaha Kehutanan Ank. I	40	E-learning	17/09/2024 s/d 20/09/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
38	Resolusi Konflik SDA	40	E-learning	17/09/2024 s/d 20/09/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
39	Pemasaran Produk Multiusaha Kehutanan Ank. II	40	E-learning	24/09/2024 s/d 27/09/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
40	Sistem Informasi Geografis Berbasis Ponsel	40	Klasikal	20/02/2024 s/d 23/02/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
41	Budidaya Lebah Madu Kelulut (Trigona SPP) Ank I	40	Klasikal	13/05/2024 s/d 16/05/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
42	Pembuatan Rancangan Agroforestri Ank. I	40	Klasikal	13/05/2024 s/d 16/05/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
43	Budidaya Lebah Madu Kelulut (Trigona SPP) Ank II	40	Klasikal	28/05/2024 s/d 31/05/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
44	Pembuatan Rancangan Agroforestri Ank II	40	Klasikal	28/05/2024 s/d 31/05/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
45	Pengendalian Karhutla Bagi MPA Berkesadaran Hukum Ank. I	40	Klasikal	28/05/2024 s/d 30/05/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
46	Pengendalian Karhutla Bagi MPA Berkesadaran Hukum Ank. II	40	Klasikal	11/06/2024 s/d 13/06/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
47	Teknik Pengolahan Bambu	40	Klasikal	11/06/2024 s/d 14/06/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
48	Pembuatan Minyak Atsiri Sere Wangi	40	Klasikal	25/06/2024 s/d 28/06/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
49	Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat - Community Patrol	40	Klasikal	25/06/2024 s/d 29/06/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
50	Teknik Agroforestry Ank I	40	Klasikal	25/06/2024 s/d 28/06/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
51	Pemanfaatan Wisata Alam	40	Klasikal	23/07/2024 s/d 26/07/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
52	Usaha Budidaya dan Pengolahan Jamur Tiram	40	Klasikal	09/07/2024 s/d 12/07/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN

No	Nama RO / Nama Pelatihan	Realisasi	Metode Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Satker Penyelenggara	Sumber Pembiayaan
53	SIG Berbasis Ponsel	40	Klasikal	09/07/2024 s/d 12/07/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
54	Pengolahan Sampah Organik untuk Budidaya Maggot	40	Klasikal	23/07/2024 s/d 26/07/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
55	Pengelolaan Sampah di Bank Sampah	40	Klasikal	12/08/2024 s/d 15/08/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
56	Teknik Agroforestry	40	Klasikal	12/08/2024 s/d 15/08/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
57	Sistem Informasi Geografis Berbasis Ponsel	40	Klasikal	24/09/2024 s/d 27/09/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
58	Teknik Agroforetry Ank. III	40	Klasikal	28/10/2024 s/d 31/10/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
59	Interpreter Wisata Alam Ank. II	40	Klasikal	23/10/2024 s/d 26/10/2024	BPLHK KADIPATEN	APBN
60	Pelatihan Pembinaan Kelompok Tani Responsif Gender	40	E-learning	20/03/2024 s/d 25/03/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
61	Pelatihan Resolusi Konflik SDA	40	E-learning	05/08/2024 s/d 08/08/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
62	Pelatihan Teknik Budidaya Aren	40	E-learning	02/10/2024 s/d 04/10/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
63	Pelatihan Pembutan Rancangan Agroforestri	40	E-learning	11/10/2024 s/d 15/10/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
64	Pelatihan Kewirausahaan Aneka Produk Tanaman Aren	40	E-learning	15/10/2024 s/d 19/10/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
65	Pelatihan Penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial Angkatan 2	40	Klasikal	19/02/2024 s/d 23/02/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
66	Pelatihan Teknik Pengolahan Nira Aren	40	Klasikal	06/05/2024 s/d 09/05/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
67	Pelatihan Pembuatan Pupuk Bokashi	40	Klasikal	20/05/2024 s/d 23/05/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
68	Pelatihan Interpreter Wisata Alam	40	Klasikal	24/06/2024 s/d 27/07/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
69	Bimbingan Teknis Agroforestry Angkatan I	40	Klasikal	23/07/2024 s/d 24/07/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN

No	Nama RO / Nama Pelatihan	Realisasi	Metode Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Satker Penyelenggara	Sumber Pembiayaan
70	Bimbingan Teknis Agroforestry Angkatan II	40	Klasikal	23/07/2024 s/d 24/07/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
71	Pelatihan Teknik Pemanfaatan dan Pengolahan Madu Hutan	40	Klasikal	06/08/2024 s/d 09/08/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
72	Pelatihan Pengolahan sampah di Bank Sampah Angkatan II	40	Klasikal	12/08/2024 s/d 14/08/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
73	Pelatihan Pengolahan sampah di Bank Sampah Angkatan III	40	Klasikal	20/08/2024 s/d 22/08/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
74	Pelatihan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lagan Bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) berkesadaran hukum	40	Klasikal	26/08/2024 s/d 28/08/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
75	Pelatihan Teknik Pembuatan Minyak Atsiri Kayu Putih	40	Klasikal	09/09/2024 s/d 12/09/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
76	Pelatihan Teknik Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Masyarakat (MPA)	40	Klasikal	09/09/2024 s/d 12/09/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
77	Pelatihan Teknik Budidaya Aren	40	Klasikal	13/09/2024 s/d 15/09/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
78	Pelatihan Budidaya Lebah Trigona SP	40	Klasikal	17/09/2024 s/d 20/09/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
79	Bimtek Agroforestry	80	Klasikal	26/09/2024 s/d 26/09/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
80	Pelatihan Penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial Angkatan 1	40	Blanded Learning	19/02/2024 s/d 23/02/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
81	Pelatihan Teknik Pengolahan Nira Aren	40	Blanded Learning	19/02/2024 s/d 23/02/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
82	Pelatihan Pembinaan Kelompok Tani Responsif Gender	40	Blanded Learning	19/02/2024 s/d 23/02/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
83	Pelatihan Interpreter Wisata Alam	40	Blanded Learning	19/02/2024 s/d 23/02/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
84	Pelatihan Pengelolaan Sampah di Bank Sampah	40	Blanded Learning	19/02/2024 s/d 23/02/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
85	Penyusunan RKPS Angkatan III	40	Blanded Learning	10/06/2024 s/d 15/06/2024	BPLHK PEKANBARU	APBN
86	Pemandu Wisata Alam Angkatan 1	30	E-learning	19/02/2024 s/d 24/02/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN

No	Nama RO / Nama Pelatihan	Realisasi	Metode Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Satker Penyelenggara	Sumber Pembiayaan
87	Teknik Pembuatan Asap Cair/Cuka Kayu dan Briket Arang Angkatan 2	30	E-learning	26/02/2024 s/d 29/02/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
88	Pemanfaatan Jasa Lingkungan untuk Wisata Alam	30	E-learning	26/02/2024 s/d 29/02/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
89	Pengolahan Sampah Untuk Budidaya Maggot Lalat Tentara Hitam (Black Soldier Fly) BSF Angkatan 1	27	E-learning	18/03/2024 s/d 21/03/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
90	Pengolahan Sampah Untuk Budidaya Maggot Lalat Tentara Hitam (Black Soldier Fly) BSF Angkatan 2	33	E-learning	25/03/2024 s/d 28/03/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
91	Pembuatan Pupuk Bokashi Angkatan 3	30	E-learning	10/06/2024 s/d 13/06/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
92	Pemasaran Produk Multi Usaha Kehutanan Angkatan 1	39	E-learning	22/07/2024 s/d 25/07/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
93	Pemasaran Multiusaha Produk Kehutanan Angkatan 1	41	E-learning	26/08/2024 s/d 29/08/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
94	Pembuatan Pupuk Bokashi Angkatan VII	23	Klasikal	17/09/2024 s/d 20/09/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
95	Teknik Pembuatan Asap Cair/Cuka Kayu dan Briket Arang Angkatan 1	30	Blanded Learning	19/02/2024 s/d 22/02/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
96	Pembuatan Pupuk Bokashi Angkatan 1	30	Blanded Learning	19/02/2024 s/d 22/02/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
97	Pembuatan Pupuk Bokashi Angkatan 2	30	Blanded Learning	26/02/2024 s/d 29/02/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
98	Sistem Informasi Geografis Berbasis Ponsel Angkatan 1	40	Blanded Learning	02/05/2024 s/d 08/05/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
99	Sistem Informasi Geografis Berbasis Ponsel Angkatan 2	24	Blanded Learning	15/05/2024 s/d 29/05/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
100	Budidaya Lebah Madu Kelulut (Trigona Sp) Angkatan 1	28	Blanded Learning	15/05/2024 s/d 29/05/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
101	Sistem Informasi Geografis Berbasis Ponsel Angkatan 3	28	Blanded Learning	20/05/2024 s/d 31/05/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
102	Budidaya Lebah Madu Kelulut (Trigona Sp) Angkatan 2	28	Blanded Learning	20/05/2024 s/d 31/05/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
103	Pemanfaatan jasa Lingkungan Untuk Wisata Alam Angkatan 2	40	Blanded Learning	03/06/2024 s/d 06/06/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN

No	Nama RO / Nama Pelatihan	Realisasi	Metode Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Satker Penyelenggara	Sumber Pembiayaan
104	Pemetaan Partisipatif Sumberdaya Wilayah Angkatan 1	28	Blanded Learning	03/06/2024 s/d 06/06/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
105	Penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial	40	Blanded Learning	10/06/2024 s/d 21/06/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
106	Pemandu Wisata Alam Angkatan 2	28	Blanded Learning	24/06/2024 s/d 29/06/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
107	Pembuatan Pupuk Bokashi Angkatan 4	30	Blanded Learning	24/06/2024 s/d 27/06/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
108	Pembinaan KTH Responsif Gender Angkatan 1	30	Blanded Learning	24/06/2024 s/d 27/06/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
109	Budidaya Lebah Madu Kelulut (Trigona Sp) Angkatan 5	30	Blanded Learning	08/07/2024 s/d 11/07/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
110	Budidaya Lebah Madu Kelulut (Trigona Sp) Angkatan 4	29	Blanded Learning	15/07/2024 s/d 18/07/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
111	Teknik Pengolahan bambu Angkatan 1	30	Blanded Learning	26/07/2024 s/d 30/07/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
112	Teknik Pengolahan Bambu Angkatan 2	39	Blanded Learning	12/08/2024 s/d 15/08/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
113	Usaha dan Budidaya dan Pengolahan Jamur Tiram Angkatan 2	29	Blanded Learning	19/08/2024 s/d 22/08/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
114	Pemetaan Partisipatif Sumberdaya Wilayah Angkatan 2	28	Blanded Learning	12/08/2024 s/d 21/08/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
115	Pemetaan Partisipatif Sumberdaya Wilayah Angkatan 3	28	Blanded Learning	14/08/2024 s/d 23/08/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
116	Pembuatan Pupuk Bokashi Angkatan 6	30	Blanded Learning	19/08/2024 s/d 22/08/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
117	Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Bagi Manggala Agni 1 (fire Crew 1) Angkatan I	40	Blanded Learning	09/09/2024 s/d 14/09/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
118	Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Bagi Manggala Agni 1 (fire Crew 1) Angkatan II	40	Blanded Learning	09/09/2024 s/d 19/09/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
119	Teknik Pengolahan Bambu Angkatan III	40	Blanded Learning	09/09/2024 s/d 25/09/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN
120	Teknik Pengolahan Bambu Angkatan IV	40	Blanded Learning	11/09/2024 s/d 27/09/2024	BPLHK PEMATANGSIANTAR	APBN

No	Nama RO / Nama Pelatihan	Realisasi	Metode Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Satker Penyelenggara	Sumber Pembiayaan
121	Pelatihan Digital marketing	40	E-learning	27/05/2024 s/d 31/05/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN
122	Pelatihan Pembuatan Pupuk Bokashi	40	Klasikal	20/02/2024 s/d 23/02/2024	BPLHK SAMARINDA	
123	Pelatihan Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Ekowisata Melalui Pemanduan Wisata Alam	40	Klasikal	27/02/2024 s/d 01/03/2024	BPLHK SAMARINDA	
124	Pelatihan Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Ekowisata Melalui Pemanduan Wisata Alam	40	Klasikal	14/05/2024 s/d 17/05/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN
125	Pelatihan Budidaya Lebah madu Kelulut (Trigona Spp.)	40	Klasikal	20/05/2024 s/d 23/05/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN
126	Pelatihan Perilaku Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Satuan Pendidikan Formal	31	Klasikal	27/05/2024 s/d 31/05/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN
127	Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew 1) Gelombang 1	70	Klasikal	06/06/2024 s/d 13/06/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
128	TEKNIK AGROFORESTRY	40	Klasikal	20/06/2024 s/d 23/06/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN
129	Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew 1) Gelombang 2	70	Klasikal	26/06/2024 s/d 03/07/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
130	Pelatihan Peningkatan Kapasitas KTH dan KPS dalam Pengelolaan Usaha Tahun 2024Angkatan 1	40	Klasikal	15/07/2024 s/d 17/07/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN
131	Pelatihan Peningkatan Kapasitas KTH dan KPS dalam Pengelolaan Usaha Tahun 2024 Angkatan 2	40	Klasikal	18/07/2024 s/d 20/07/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN
132	Pelatihan Digital marketing	40	Klasikal	29/07/2024 s/d 02/08/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN
133	Pelatihan Budidaya Lebah madu Kelulut (Trigona Spp.)	40	Klasikal	23/08/2024 s/d 25/08/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN
134	Pelatihan Teknik Agroforestry Angkatan 1	40	Klasikal	30/07/2024 s/d 02/08/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN
135	Pelatihan Teknik Agroforestry Angkatan 2	20	Klasikal	30/07/2024 s/d 02/08/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN
136	Pelatihan SIG Berbasis Ponsel	40	Klasikal	30/07/2024 s/d 02/08/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN
137	Pelatihan Budidaya Lebah madu Kelulut (Trigona Spp.)	40	Klasikal	19/08/2024 s/d 21/08/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN

No	Nama RO / Nama Pelatihan	Realisasi	Metode Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Satker Penyelenggara	Sumber Pembiayaan
138	Pelatihan Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew 1) Angkatan 3	70	Klasikal	05/07/2024 s/d 12/07/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN
139	Pelatihan Teknik Pembuatan Minyak Atsiri Serai Wangi	40	Klasikal	22/08/2024 s/d 24/08/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN
140	Pelatihan Pembuatan Minyak Atsiri Kayu Putih	40	Klasikal	26/08/2024 s/d 29/08/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN
141	Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Manggala Agni 1 (Fire Crew 1) BPBD Mahulu	30	Klasikal	23/09/2024 s/d 30/09/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN + Kerjasama
142	Pelatihan Budidaya Tanaman Obat Dari Hutan Kalimantan	40	Klasikal	02/09/2024 s/d 05/09/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN
143	Pelatihan Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Ekowisata Melalui Pemanduan Wisata Alam Angkatan 1	40	Klasikal	23/09/2024 s/d 25/09/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN
144	Pelatihan Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Ekowisata Melalui Pemanduan Wisata Alam Angkatan 2	40	Klasikal	26/09/2024 s/d 28/09/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN
145	Pelatihan Pembuatan Minyak Atsiri Serai Wangi	40	Klasikal	06/09/2024 s/d 08/09/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN
146	Pelatihan Teknik Agroforestry	40	Klasikal	17/09/2024 s/d 20/09/2024	BPLHK SAMARINDA	APBN
147	Teknik Budidaya Tanaman di Bawah Tegakan	40	Blanded Learning	26/02/2024 s/d 03/03/2024	BPLHK KUPANG	APBN
148	Peningkatan Kapasitas KTH dan KPS dalam Pengelolaan Usaha	40	Blanded Learning	26/02/2024 s/d 03/03/2024	BPLHK KUPANG	APBN
149	Pembuatan Pupuk Bokhasi	40	Blanded Learning	26/02/2024 s/d 03/03/2024	BPLHK KUPANG	APBN
150	Pelatihan Teknik Budidaya Tanaman di Bawah Tegakan Angkatan 3	40	Blanded Learning	18/04/2024 s/d 25/04/2024	BPLHK KUPANG	APBN
151	Pelatihan Peningkatan Kapasitas KPH dan KPS dalam Pengelolaan Usaha	40	Blanded Learning	18/04/2024 s/d 25/04/2024	BPLHK KUPANG	APBN
152	Pelatihan Teknik Budidaya Tanaman di Bawah Tegakan Angkatan 2	40	Blanded Learning	18/04/2024 s/d 25/04/2024	BPLHK KUPANG	APBN
153	Pembinaan KTH Responsif Gender Angkatan 1	40	Blanded Learning	02/05/2024 s/d 17/06/2024	BPLHK KUPANG	APBN
154	Interpreter Wisata Alam Angkatan 1	40	Blanded Learning	02/05/2024 s/d 17/06/2024	BPLHK KUPANG	APBN

No	Nama RO / Nama Pelatihan	Realisasi	Metode Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Satker Penyelenggara	Sumber Pembiayaan
155	Pengolahan dan pemasaran HHBK Jambu Mete angkatan 1	40	Blanded Learning	02/05/2024 s/d 17/06/2024	BPLHK KUPANG	APBN
156	Teknik Agroforestry Angkatan 1	40	Blanded Learning	02/05/2024 s/d 17/06/2024	BPLHK KUPANG	APBN
157	Pembinaan KTH Responsif Gender Angkatan 2	40	Blanded Learning	06/05/2024 s/d 22/05/2024	BPLHK KUPANG	APBN
158	Interpreter Wisata Alam Angkatan 2	40	Blanded Learning	06/05/2024 s/d 22/05/2024	BPLHK KUPANG	APBN
159	Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran HHBK Kemiri Angkatan 2	40	Blanded Learning	06/05/2024 s/d 22/05/2024	BPLHK KUPANG	APBN
160	Teknik Agroforestry Angkatan 2	40	Blanded Learning	06/05/2024 s/d 22/05/2024	BPLHK KUPANG	APBN
161	Pelatihan Pemasaran Produk Multi Usaha Kehutanan Angkatan 2	40	Blanded Learning	03/06/2024 s/d 12/06/2024	BPLHK KUPANG	APBN
162	Pelatihan Pemasaran Produk Multi Usaha Kehutanan Angkatan 4	40	Blanded Learning	06/06/2024 s/d 15/06/2024	BPLHK KUPANG	APBN
163	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik untuk Budidaya Maggot BSF	40	Blanded Learning	06/06/2024 s/d 15/06/2024	BPLHK KUPANG	APBN
164	Pelatihan Teknik Budidaya Tanaman di Bawah Tegakan Angkatan 4	40	Blanded Learning	03/06/2024 s/d 12/06/2024	BPLHK KUPANG	APBN
165	Pelatihan Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Angkatan 1	40	Blanded Learning	10/06/2024 s/d 22/06/2024	BPLHK KUPANG	APBN
166	Pelatihan Interpreter Wisata Alam Angkatan 3	40	Blanded Learning	10/06/2024 s/d 22/06/2024	BPLHK KUPANG	APBN
167	Pelatihan Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran HHBK Kemiri	40	Blanded Learning	12/06/2024 s/d 26/06/2024	BPLHK KUPANG	APBN
168	Pelatihan Pemasaran Produk Multiusaha Kehutanan Angkatan 3	40	Blanded Learning	10/06/2024 s/d 23/06/2024	BPLHK KUPANG	APBN
169	Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran HHBK Kemiri Angkatan 3	40	Blanded Learning	18/09/2024 s/d 26/09/2024	BPLHK KUPANG	APBN
170	Peningkatan Kapasitas KTH dan KPS dalam Pengelolaan Usaha Kelompok Angkatan II	40	Blanded Learning	27/05/2024 s/d 31/05/2024	BPLHK KUPANG	APBN + Kerjasama
171	Pelatihan Pengolahan dan Pemanfaatan Madu Hutan	40	Blanded Learning	05/08/2024 s/d 10/08/2024	BPLHK KUPANG	APBN

No	Nama RO / Nama Pelatihan	Realisasi	Metode Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Satker Penyelenggara	Sumber Pembiayaan
172	Pelatihan Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Angkatan 2	40	Blanded Learning	05/08/2024 s/d 10/08/2024	BPLHK KUPANG	APBN
173	Pelatihan Pembuatan Pupuk Bokashi Angkatan 2	40	Blanded Learning	05/08/2024 s/d 10/08/2024	BPLHK KUPANG	APBN
174	Budidaya Lebah Madu Kelulut (Trigona spp)Tahun 2024	40	Klasikal	26/02/2024 s/d 29/02/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
175	Pembuatan Pupuk Bokashi	40	Klasikal	26/02/2024 s/d 29/02/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
176	Usaha Budidaya dan Pengolahan Jamur Tiram	40	Klasikal	23/04/2024 s/d 26/04/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
177	Budidaya Lebah Madu Kelulut (Trigona Spp) Angkatan 2	40	Klasikal	23/04/2024 s/d 26/04/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
178	Pembinaan KTH Reponsif Gender Angkatan II	40	Klasikal	17/05/2024 s/d 21/05/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
179	Pelatihan Teknik Pengolahan Nira Aren Tahun 2024	40	Klasikal	20/05/2024 s/d 23/05/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
180	Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah	40	Klasikal	20/05/2024 s/d 22/05/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
181	Teknik Pembuatan Pupuk Bokashi Angkatan II	40	Klasikal	13/05/2024 s/d 16/05/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
182	Pembinaan KTH Responsif Gender Angkatan I	40	Klasikal	13/05/2024 s/d 16/05/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
183	Teknik Pembuatan Asap Cair/Cuka Kayu dan Briket Arang	40	Klasikal	13/05/2024 s/d 16/05/2024	BPLHK MAKASSAR	
184	Teknik Pencegahan Karhutla Bagi MPA Angkatan II	40	Klasikal	26/06/2024 s/d 29/06/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
185	Teknik Pengolahan Nira Aren Angk. II	40	Klasikal	10/06/2024 s/d 13/06/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
186	Pelatihan Teknik Agroforestri Angkatan II Tahun 2024	40	Klasikal	26/06/2024 s/d 29/06/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
187	Teknik Agroforestri Angkatan I Tahun 2024	40	Klasikal	26/06/2024 s/d 29/06/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
188	Pengelolaan dan Pemasaran HHBK Jambu Mete	40	Klasikal	25/06/2024 s/d 28/06/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN

No	Nama RO / Nama Pelatihan	Realisasi	Metode Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Satker Penyelenggara	Sumber Pembiayaan
189	TEKNIK PEMBUATAN ASAP CAIR/CUKA KAYU DAN BRIKET ARANG ANGKATAN II	40	Klasikal	05/08/2024 s/d 08/08/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
190	TEKNIK PEMBUATAN ASAP CAIR/CUKA KAYU DAN BRIKET ARANG ANGKATAN III	40	Klasikal	12/08/2024 s/d 15/08/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
191	USAHA BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN JAMUR TIRAM	40	Klasikal	18/09/2024 s/d 21/09/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
192	Pengelolaan Sampah di Bank Sampah	40	Klasikal	18/09/2024 s/d 21/09/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
193	Teknik Pengolahan Nira Aren	40	Klasikal	18/09/2024 s/d 21/09/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
194	Pelatihan Teknik Agroforestry Angkatan 3	40	Klasikal	24/09/2024 s/d 27/09/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
195	Teknik Pengolahan Nira Aren Angk. IV	40	Klasikal	23/10/2024 s/d 26/10/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
196	Pelatihan Teknik Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) Angkatan 3 Tahun 2024	40	Klasikal	28/10/2024 s/d 31/10/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
197	PEMBINAAN KELOMPOK TANI HUTAN RESPONSIF GENDER	40	Klasikal	15/10/2024 s/d 18/10/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
198	Usaha Budidaya dan Pengolahan Jamur Tiram	40	Klasikal	15/10/2024 s/d 18/10/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
199	Pelatihan Teknik Pembuatqn Minyak Atsiri Searai Wangi	40	Klasikal	09/10/2024 s/d 12/10/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN
200	Pengembangan Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2024	40	Blanded Learning	19/02/2024 s/d 24/02/2024	BPLHK MAKASSAR	APBN

Lampiran 3. Rincian Uji Kompetensi SDM Aparatur Tahun 2024

No	Profesi	Provinsi	Kenaikan Jenjang Jabatan		Alih Jabatan		Inpassing		Total	
			L	P	L	P	L	P	L	P
1	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP (PLH)	RIAU	5	7	0	0	0	0	5	7
2	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP (PLH)	KEPULAUAN RIAU	0	0	1	0	0	0	1	0
3	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP (PLH)	DKI JAKARTA	4	3	9	5	0	0	13	8
4	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP (PLH)	JAWA BARAT	24	14	1	0	0	0	25	14
5	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP (PLH)	KALIMANTAN TENGAH	0	0	6	3	0	0	6	3
6	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP (PLH)	KALIMANTAN TIMUR	1	0	4	2	0	0	5	2
7	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP (PLH)	SULAWESI SELATAN	8	5	0	0	0	0	8	5
8	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP (PLH)	MALUKU	0	0	0	3	0	0	0	3
9	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN (PEDAL)	RIAU	0	0	2	13	0	0	2	13
10	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN (PEDAL)	KEPULAUAN RIAU	0	0	0	6	0	0	0	6
11	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN (PEDAL)	DKI JAKARTA	4	9	6	14	0	0	10	23
12	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN (PEDAL)	JAWA BARAT	4	7	11	8	0	0	15	15
13	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN (PEDAL)	KALIMANTAN TENGAH	0	1	2	2	0	0	2	3
14	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN (PEDAL)	KALIMANTAN TIMUR	0	0	8	8	0	0	8	8
15	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN (PEDAL)	SULAWESI SELATAN	2	0	8	7	0	0	10	7
16	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN (PEDAL)	MALUKU	0	0	1	3	0	0	1	3
17	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN (PEH)	RIAU	32	16	42	18	0	0	74	34
18	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN (PEH)	KEPULAUAN RIAU	0	0	1	2	0	0	1	2
19	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN (PEH)	JAWA BARAT	65	51	69	55	0	0	134	106
20	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN (PEH)	KALIMANTAN TENGAH	3	0	15	5	0	0	18	5

No	Profesi	Provinsi	Kenaikan Jenjang Jabatan		Alih Jabatan		Inpassing		Total	
			L	P	L	P	L	P	L	P
21	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN (PEH)	KALIMANTAN TIMUR	17	5	11	0	0	0	28	5
22	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN (PEH)	SULAWESI TENGAH	3	2	0	0	0	0	3	2
23	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN (PEH)	SULAWESI SELATAN	45	16	41	27	0	0	86	43
24	PENYULUH KEHUTANAN (PK)	RIAU	2	7	6	2	0	0	8	9
25	PENYULUH KEHUTANAN (PK)	KEPULAUAN RIAU	0	0	1	2	0	0	1	2
26	PENYULUH KEHUTANAN (PK)	JAWA BARAT	12	9	10	9	0	0	22	18
27	PENYULUH KEHUTANAN (PK)	KALIMANTAN TENGAH	5	2	5	9	0	0	10	11
28	PENYULUH KEHUTANAN (PK)	KALIMANTAN TIMUR	1	0	3	1	0	0	4	1
29	PENYULUH KEHUTANAN (PK)	SULAWESI TENGAH	2	0	0	0	0	0	2	0
30	PENYULUH KEHUTANAN (PK)	SULAWESI SELATAN	6	1	4	2	0	0	10	3
31	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP (PELHI)	RIAU	2	0	1	0	0	0	3	0
32	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP (PELHI)	DKI JAKARTA	1	2	2	2	0	0	3	4
33	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP (PELHI)	JAWA BARAT	5	5	0	3	0	0	5	8
34	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP (PELHI)	KALIMANTAN TIMUR	0	0	1	0	0	0	1	0
35	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP (PELHI)	MALUKU	0	0	1	0	0	0	1	0
36	POLISI HUTAN (POLHUT)	RIAU	61	9	0	0	0	0	61	9
37	POLISI HUTAN (POLHUT)	KEPULAUAN RIAU	2	0	0	0	0	0	2	0
38	POLISI HUTAN (POLHUT)	DKI JAKARTA	1	0	2	0	0	0	3	0
39	POLISI HUTAN (POLHUT)	JAWA BARAT	80	14	0	0	0	0	80	14
40	POLISI HUTAN (POLHUT)	KALIMANTAN TENGAH	1	0	0	0	0	0	1	0
41	POLISI HUTAN (POLHUT)	KALIMANTAN TIMUR	25	5	18	4	0	0	43	9
42	POLISI HUTAN (POLHUT)	SULAWESI SELATAN	114	16	0	0	0	0	114	16
		Total	537	206	292	215			829	421
		Grand Total	743		507				1250	

Lampiran 4. Rincian Uji Kompetensi SDM Non Aparatur Tahun 2024

No	Profesi	Provinsi	Total	
			L	P
1	ANGGOTA TIM PENYUSUN AMDAL	DKI JAKARTA	16	7
2	ANGGOTA TIM PENYUSUN AMDAL	JAWA TIMUR	11	0
3	GANISPH PEMANENAN HASIL HUTAN	RIAU	9	0
4	GANISPH PEMANFAATAN HHBK MINYAK	JAWA TIMUR	12	13
5	GANISPH PEMANFAATAN HHBK MINYAK	BALI	12	4
6	GANISPH PEMANFAATAN HHBK MINYAK	SULAWESI TENGAH	0	1
7	GANISPH PEMANFAATAN HHBK BATANG	JAWA TIMUR	34	2
8	GANISPH PEMANFAATAN HHBK BATANG	SULAWESI TENGAH	1	0
9	GANISPH PEMANFAATAN HHBK GETAH	SUMATERA SELATAN	30	0
10	GANISPH PEMANFAATAN HHBK GETAH	BALI	3	0
11	GANISPH PEMANFAATAN HHBK GETAH	SULAWESI TENGAH	1	0
12	GANISPH PEMBINAAN HUTAN	RIAU	4	1
13	GANISPH PEMBINAAN HUTAN	SULAWESI TENGAH	23	10
14	GANISPH PENGUJIAN KAYU BULAT	RIAU	49	6
15	GANISPH PENGUJIAN KAYU BULAT	JAWA BARAT	0	1
16	GANISPH PENGUJIAN KAYU BULAT	JAWA TIMUR	18	1
17	GANISPH PENGUJIAN KAYU GERGAJIAN	JAWA BARAT	1	2
18	GANISPH PENGUJIAN KAYU LAPIS	RIAU	1	0
19	GANISPH PENGUKURAN DAN PERPETAAN HUTAN	RIAU	5	0
20	GANISPH PENGUKURAN DAN PERPETAAN HUTAN	JAWA BARAT	2	0
21	GANISPH PENGUKURAN DAN PERPETAAN HUTAN	SULAWESI TENGAH	4	0
22	GANISPH PERENCANAAN HUTAN	RIAU	20	1
23	GANISPH PERENCANAAN HUTAN	JAWA TIMUR	0	1
24	GANISPH PERENCANAAN WISATA ALAM	BALI	12	2
25	GANISPH PERENCANAAN WISATA ALAM	SULAWESI TENGAH	0	1
26	KETUA TIM PENYUSUN AMDAL	DKI JAKARTA	11	4
27	PELAKSANA PERAWATAN AC RESIDENSIAL	JAWA BARAT	20	0
28	PENANGGUNGJAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR	JAWA BARAT	25	0
29	PENANGGUNGJAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR	KALIMANTAN SELATAN	28	2
30	PENGUJI PENYUSUN AMDAL	DKI JAKARTA	7	3
31	PETUGAS PENGAMBIL CONTOH UJI AIR	KALIMANTAN TIMUR	5	1
		Total	364	63
		Grand Total	427	

Lampiran 5. Rincian Sekolah yang mengikuti Pembinaan Sekolah Adiwiyata Tahun 2024

No	Provinsi	SD/MI	SLB	SMA/MA/SMK	SMP/MTS	Total
1	ACEH	4		3	8	15
2	BALI	19		10	21	50
3	BANTEN	95	1	8	35	139
4	BENGKULU	2			2	4
5	DI YOGYAKARTA	27		17	15	59
6	DKI JAKARTA	38		17	16	71
7	GORONTALO	4			5	9
8	JAMBI	3		1	1	5
9	JAWA BARAT	195	3	42	84	324
10	JAWA TENGAH	353	8	157	264	782
11	JAWA TIMUR	463		78	317	858
12	KALIMANTAN BARAT	37		12	10	59
13	KALIMANTAN SELATAN	83		27	46	156
14	KALIMANTAN TENGAH	53		7	22	82
15	KALIMANTAN TIMUR	52		7	20	79
16	KALIMANTAN UTARA	4		3	4	11
17	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	9		5		14
18	KEPULAUAN RIAU	34	1	8	34	77
19	LAMPUNG	9		5	13	27
20	MALUKU	7				7
21	NUSA TENGGARA BARAT	5		1	5	11
22	NUSA TENGGARA TIMUR	3		2		5
23	PAPUA	16		14	15	45
24	PAPUA SELATAN	2		2	2	6
25	PAPUA TENGAH	5		2	5	12
26	RIAU	41		15	38	94
27	SULAWESI BARAT	6		1	4	11
28	SULAWESI SELATAN	101		10	25	136
29	SULAWESI TENGAH	6		5	7	18
30	SULAWESI TENGGARA	2			8	10
31	SULAWESI UTARA	2			2	4
32	SUMATERA BARAT	27		12	14	53
33	SUMATERA SELATAN	28	1	5	8	42
34	SUMATERA UTARA	54		7	14	75

Lampiran 6. Penghargaan Badan P2SDM sebagai terbaik ke 5 perolehan Nilai Pengelolaan Kinerja

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

NILAI PENGELOLAAN KINERJA (NPK) TAHUN 2023

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

TERBAIK KE – 5
KATEGORI UNIT KERJA ESELON I

LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN NILAI PENGELOLAAN KINERJA 84,67 POIN

Jakarta, 14 Juni 2024

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc

Lampiran 7 Penghargaan Badan P2SDM sebagai unit kerja dengan IKPA terbaik pertama tahun 2023